Arie Sujito

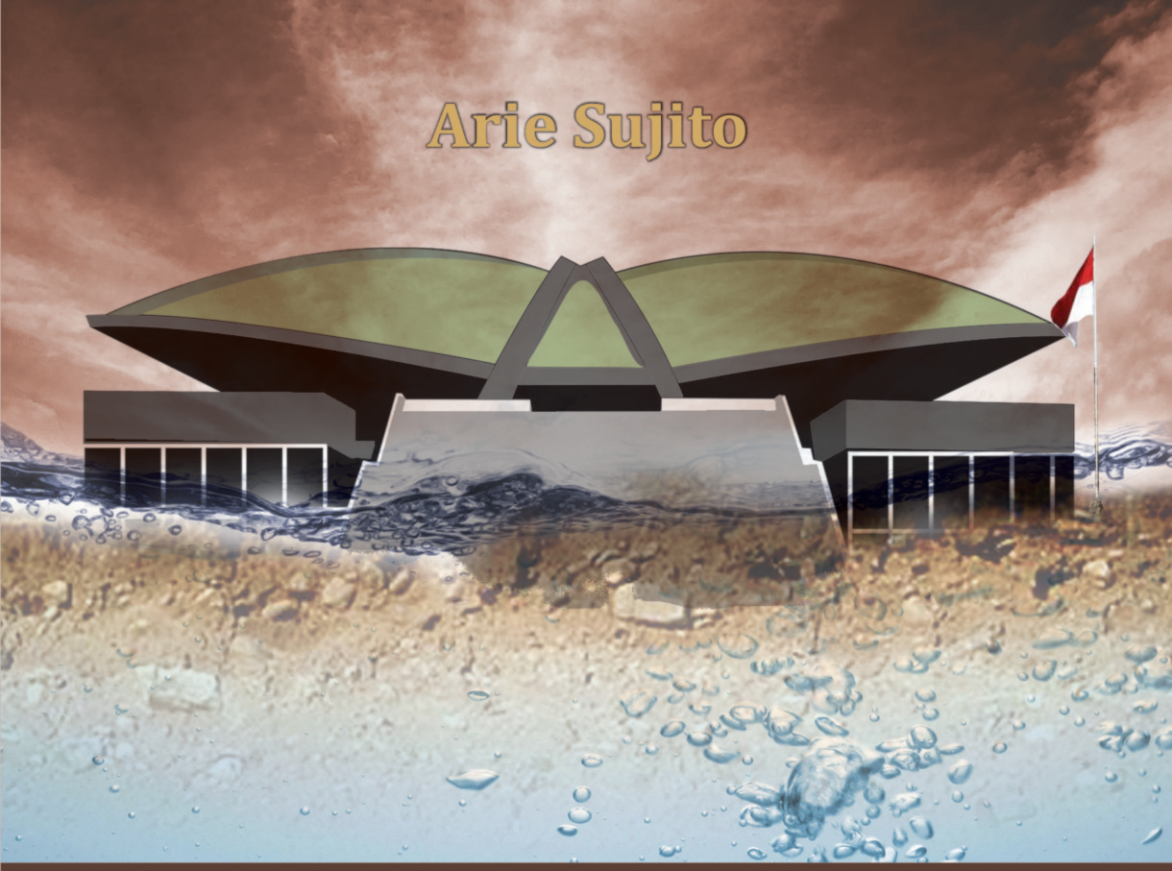

Pendangkalan Politik

Kata Pengantar: Dr. Aris Arif Mundayat

Editor: Aksan Susanto

IRE

Australian AID

The Asia Foundation

Pendangkalan Politik

ARIE SUJITO

Pendangkalan Politik

IRE
Australian AID
The Asia Foundation

PENDANGKALAN POLITIK

Penulis:
Arie Sujito

Editor:
Aksan Susanto

Kata Pengantar:
Dr. Aris Arif Mundayat

Sampul:
Ipank

Ilustrasi:
Maliq

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)

Sujito, Arie
Pendangkalan Politik; Yogyakarta: IRE; Editor: Aksan Susanto; Kata Pengantar: Dr. Aris Arif Mundayat; Cetakan Pertama, September 2012.
15,5 x 23 cm.
xx + 160 hlm.
ISBN 978-979-8198-83-0

©[2012] Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta

All rights reserved. Dilarang memperbanyak atau mengutip dalam bentuk dan cara apapun, baik dengan cara mekanik atau elektronik, termasuk mengkopi, atau dengan cara *information storage and retrieval system*, tanpa izin tertulis dari IRE Yogyakarta.

IRE Yogyakarta
Dusun Tegalrejo RT.01 RW.09 Desa Sariharjo, Ngaglik
Jalan Palagan Tentara Pelajar km 9,5 Sleman Yogyakarta 55581
Telp/Fax +62-74-867686 E-mail : office@ireyogya.org
http://www.ireyogya.org

Teruntuk:

Fenty Ariani
Panji Merah Balakosa
Saguna Marhaen Bajrayekti

Tentang Penulis

Arie Sujito

Lahir di Madiun 12 September 1972 dari keluarga petani di Madiun Jawa Timur. Menyelesaikan studi tingkat sarjana (1997) dan master (2004), kini tengah menyelesaikan disertasi doktoral di Program Studi Sosiologi UGM. Semenjak tahun 1999 sampai sekarang mengajar di almamaternya dengan memfokuskan kajian sosiologi politik, tema *local democracy*, serta resolusi konflik dan perdamaian.

Selain mengajar, sosiolog UGM ini juga menekuni riset dengan bergabung pada Institute for Research and Empowerment (IRE), sebuah NGO di Yogyakarta yang konsen pada kajian *governance reform*, *village and local democracy*, serta penanganan masalah kemiskinan. Di lingkungan kampus UGM, ia mengabdikan diri sebagai peneliti di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM, dan peneliti di Youth Study Center (YouSure) UGM.

Selama mahasiswa, aktif di Senat Mahasiswa, Dewan Mahasiswa, serta pers kampus. Pengalamannya sebagai aktivis dikembangkannya sampai kini dengan melibatkan diri pada organisasi massa "Pergerakan Indonesia" yang sejak 2010-2013 menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional. Sejak tahun 2012, ia juga tergabung dalam Dewan Nasional sekretariat nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).

Aktif menulis di media massa, jurnal dan buku. Di antara buku dan jurnal yang pernah ditulisnya adalah: *Demiliterisasi, Demokratisasi dan Desentralisasi* (sebagai penulis dan editor, 2002); *Refleksi dan Aksi untuk Rakyat* (2004); *Membangun Aceh dari Gampong* (2007); "Kebijakan Sosial di Daerah" (*Jurnal Sosdem*, FES 2008); *Mendahulukan si Miskin* (penulis dan editor, 2008); serta buku-buku lain yang ditulis secara bersama, yakni *Jalan Panjang Advokasi Kebijakan* (FPPM, 2009), *Pemuda Pasca Orba* (2012).

Alamat email: ariedjito@yahoo.com

Ucapan Terima Kasih

Pendokumentasian artikel analisis ke dalam bentuk buku ini, tentu atas peran berbagai pihak. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak.

Pertama, kepada Redaksi Harian *Republika* yang telah mengijinkan penerbitan naskah-naskah analisis yang pernah dimuat tiap hari Selasa selama lebih dari 2 tahun. Semoga pendokumentasian ini bermakna untuk perluasan wacana dan menambah khasanah pemikiran kritis yang bisa diakses publik secara lebih luas.

Kedua, kepada pengurus dan kolega di Institute for Research and Empowerment (IRE), serta The Asia Foundation yang memfasilitasi penerbitan dokumen analisis ini sebagai bagian dari komitmen mengembangkan program *knowledge sector*.

Ketiga, untuk Mas Aris Mundayat yang bersedia memberikan pengantar buku dengan perspektif tajam dan kritis. Salam selalu buat persahabatan ini.

Keempat, peran Mas Aksan Susanto sebagai editor yang cukup cepat dan kreatif dalam mengompilasi, mengedit dan menata tulisan saya sehingga bisa terbit.

Kelima, juga untuk Ipank Sumarmo dan Mas Yahya (Tiara Wacana), atas bantuan mereka, pekerjaan ini bisa kelar.

Salam,

Arie Sujito

Pengantar Editor

Bila kita membandingkan masa sebelum reformasi, maka demokrasi pasca reformasi di republik ini tampaknya sangat berhasil. Namun jika membandingkan (harapan) Indonesia yang demokratis dengan realitas yang sedang terjadi, keberhasilan tersebut sesungguhnya masih meragukan. Sebab dalam benak kolektif rakyat masih mengendap pertanyaan, apa makna demokrasi jika keadilan sosial bergerak makin menjauh?

Pertanyaan tersebut amat mudah dipahami manakala menyaksikan tingkah para elit politik dalam arena demokrasi yang riuh dan gemerlap saat ini. Kontras dengan nasib dan kepentingan rakyat yang kian terabaikan. Bersamaan dengan itu pemahaman terhadap politik, partai politik, pemilu dan esensi pemerintahan itu sendiri mengalami pendangkalan yang luar biasa.

Politik cenderung tidak dipandang sebagai kebebasan untuk memproduksi keutamaan bagi kehidupan kolektif, tetapi lebih dilihat sebagai kesempatan atau hak yang melekat sebagai azasi semata. Akhirnya politik seolah-olah hanya kekuasaan itu sendiri, sehingga tidak penting apakah kekuasaan itu bermanfaat bagi kolektivitas atau justru menjadi monster mengerikan yang akan menghancurkan kolektivitas, seperti yang digambarkan sebagai 'Leviathan' oleh Thomas Hobbes.

Fenomena tersebut membingkai tulisan-tulisan Arie Sujito dalam buku ini. Dalam rentang tahun 2010 hingga 2012, sosiolog UGM ini mengungkapkan respons kritis atas peristiwa demi peristiwa aktual

dalam keseharian, yang kemudian disajikan oleh harian *Republika* pada kolom tetap "Analisis" yang terbit setiap hari Selasa. Agar tidak menjadi bacaan yang berserakan, maka tulisan-tulisan itu dirangkai hingga jadilah buku ini.

Pandangan-pandangan kritis Arie Sujito yang dituangkan pada setiap tulisannya dapat dipahami bukan sebagai tebaran pesimisme atas situasi bangsa dan harapan masyarakat terhadap masa depan, melainkan sebagai kritik untuk menggugah kesadaran kolektif agar kesalahan masa lalu tidak berulang. Sebab, banyak kalangan mulai khawatir pendangkalan politik akan berimplikasi pada semakin menjauhnya politik dari rakyat dan rakyat dijauhkan dari politik.

Kekhawatiran bahwa rakyat merasa politik bukan menjadi bagian dari kehidupannya, salah satu contohnya, dapat dilihat dari tingkat partisipasi pada Pemilukada yang cenderung menurun hampir di semua daerah. Meskipun masih banyak instrumen lain yang dapat digunakan untuk mengukur keterlibatan masyarakat dalam politik, tetapi setidaknya Pemilukada adalah mekanisme yang paling simpel dalam konteks keikutsertaan rakyat membuat keputusan politik secara langsung.

Asumsi tersebut akan berkembang menjadi pertanyaan, bagaimana kontrol kekuasaan dapat dilakukan secara masif jika partisipasi politik *civil society* cenderung rendah? Pertanyaan tersebut barangkali terlalu dangkal, mengingat banyaknya persoalan lain yang saling terkait dan kompleks.

Buku ini memberikan referensi untuk menganalisis persoalan-persoalan yang terjadi di balik panggung politik tanah air, setidaknya dari sudut pandang sosiologi politik seorang Arie Sujito. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca.

Yogyakarta, September 2012

Aksan Susanto

Kata Pengantar

Arie Sujito adalah orang muda yang sejak mahasiswa telah aktif dalam kegiatan politik mahasiswa di UGM. Pemikirannya sangat dipengaruhi oleh ilmu-ilmu yang berkembang dalam disiplin sosiologi. Akan tetapi satu perspektif sosiologi saja tak cukup baginya, dia memerlukan sosiologi politik yang lebih mampu untuk melakukan perubahan melalui praksis politik. Garis pemikirannya, jelas berpijak pada cara berpikir sosial demokrasi yang menjembatani antara kepentingan rakyat dan pelaku ekonomi melalui instrumen politik demokrasi.

Demokrasi dalam pemikiran Arie Sujito yang dituangkan dalam kumpulan tulisan ini bukanlah sekadar proses-proses demokrasi prosedural yang sifatnya institusionalis, namun lebih merupakan upaya politik melalui representasi rakyat dalam tujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang menyeluruh. Cara berpfikir tersebut sangat tampak dalam tulisan ini, yang lebih merupakan protes sosial terhadap rezim demokrasi pasca reformasi 1998 yang sangat institusionalis prosedural dan mengesampingkan kesejahteraan rakyat.

Dalam karya Arie Sujito di awal tulisan ini menunjukkan bagaimana para politisi itu lebih mementingkan diri sendiri dan partai politiknya. Bahkan di dalam partai politik masing-masing pun terbelah lagi menjadi perjuangan kepentingan dari kelompok masing-masing. Akibatnya terjadi konflik di dalam internal partai, saling serang antar partai, hingga konflik dalam pemilukada yang seringkali berujung pada kekerasan. Semua ini merupakan ekspresi dari “mabuk kekuasaan”

yang dalam era reformasi akses menjadi lebih terbuka, termasuk akses pada keuangan negara yang berujung pada praktek korupsi.

Praktik-praktik uang dalam politik telah semakin membebani rakyat, karena telah menjelma menjadi politik biaya tinggi. Dalam konteks inipun para politisi berlomba untuk memperoleh posisi kuasa baik di partai maupun posisi kepala daerah dengan kekuatan uang bukan program untuk kesejahteraan rakyat. Tarik-menarik untuk sampai pada kuasa politik, transaksi politik antarpartai menjadi agenda dari partai untuk ikut memiliki akses terhadap sumber keuangan negara melalui departmen maupun badan anggaran di DPR. Akibatnya koalisi untuk menuju ke kursi presiden pun lebih merupakan transaski politik, demikian pula dengan penentuan posisi mentri dalam kabinet.

Dalam kacamata Arie Sujito, perilaku elite partai dalam demokrasi di Indonesia merupakan hedonisme dalam dunia politik, saat pelaku-pelaku politik mabuk kuasa. Akses terhadap kekuasaan bukanlah untuk membuka akses kesejahteraan rakyat, namun lebih merupakan upaya untuk membobol uang rakyat untuk masuk kedalam keuangan partai maupun pribadi. Perilaku politik transaksi dan demokrasi prosedural yang tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat, dalam hal ini telah menjadi 'lubang hitam' yang menyedot para politisi tanpa ideologi, kecuali pragmatisme, untuk berlomba-lomba membajak negara melalui prosedur demokrasi yang jauh dari fungsi menesejahterakan rakyat. Para politisi semakin membusuk di dalamnya, beserta partai-partai yang semakin jauh dari perjuangan rakyat. Dari situasi inilah dorongan untuk memunculkan politisi independen menjadi gairah dari politisi muda yang kurang percaya pada partai, karena politik telah semakin mengarah ke pembusukan.

Kekecewaan demi kekecewaan terhadap partai politik, dan kebuntuan demokrasi sebagai instrumen untuk mensejahterakan rakyat diamati oleh Arie Sujito dengan munculnya ormas yang 'go politic'. Peran mereka memang serba sulit, karena bukan partai politik, namun keberadaan ormas itu sendiri jauh lebih tua dari partai, dan memiliki akar yang kuat di tingkat akar rumput. Peran mereka pada dasarnya hanya sebatas pesan moral berpolitik, yang mereka sampaikan dengan berbagai cara. Namun pesan moral mereka larut dalam pusaran politik

yang memabukkan, sehingga kebermaknaannya tidak telalu memberi harapan pada kita semua.

Ketika kesejahteraan rakyat tidaklah secara serta merta dapat tercapai melalui demokrasi, praktik korupsi yang dibongkar oleh KPK semakin menyeruak ke tingkat permukaan. Badan Anggaran yang merupakan arena pertempuran posisi politik antar partai bekerja melalui uang APBN Perubahan. Di arena itulah negosiasi, koalisi, bahkan konfrontasi berlangsung, termasuk pencomotan posisi-posisi menteri yang bermuara dari partai. Posisi itu bukan sekedar jabatan karena prestasi, namun lebih merupakan ujung dari berbagai kesepakatan politik dan uang. Oleh karena itu ketika KPK diserang habis-habisan oleh anggota parlemen, perlu untuk dibaca sebagai fenomena ketidaksukaan elit politik dan oligarki karena diusik sumberdayanya.

Pada tingkat daerah Arie Sujito juga mengamati, fenomena tarik-menarik RUUK DI Yogyakarta, sebagai tarik menarik politik. Kegamangan untuk memberikan penetapan pada Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai gubernur secara otomatis, diamati oleh Arie Sujito bukan sekadar tarik menarik antara SBY dan Sultan HB X, namun juga dia melihat keberagaman tafsir dari berbagai pihak mengenai RUUK tersebut. Baginya, keberadaan Yogyakarta mestinya mampu menghasilkan model keragaman politik di Indonesia yang tidak perlu diseragamkan semuanya, namun yang lokal melengkapi nasional, bukan yang nasional meniadakan yang lokal, sehingga NKRI bukanlah politik penaklukan lokal untuk kepentingan nasional namun lebih merupakan politik bernegara yang saling mendukung satu sama lain.

Akhir kata, kumpulan tulisan Arie Sujito ini merupakan ekspresi dari pemikirannya yang selalu gelisah dalam melihat mengapa setelah demokrasi ditegakkan kesejahteraan rakyat belum menjadi agenda partai. Partai di Indonesia pada dasarnya tidak memiliki akar di tingkat rakyat, karena partai merupakan bentukan elite politik dan oligarki. Akibatnya akar partai hanya menggantung, dan tak pernah menyentuh rakyat, sehingga rakyat juga tidak merasa menjadi bagian dari kehidupan partai itu sendiri. Maka itu dapat dimengerti mengapa elite partai cenderung lebih sibuk pada dirinya sendiri, baik itu menghasilkan kegaduhan di dalam partai ataupun terhadap partai

lain. Politik seperti ini hanya menghabiskan energi, dana, dan tidak memberi pendidikan pada rakyat. Indonesia menanti pemimpin yang berasal dari rakyat bukan dari elite.

Dr. Aris Arif Mundayat

Daftar Isi

Tentang Penulis vii
Ucapan Terima Kasih ix
Pengantar Editor xi
Kata Pengantar xiii
Daftar Isi xvii

Bagian I
WAKIL RAKYAT DAN ATM
1. Petualangan 3
2. Mabuk Kekuasaan 5
3. Kontrol Kekuasaan 7
4. Politik Biaya Tinggi 9
5. Transaksi Politik 11
6. Capres 15

Bagian II
MAFIA MEMBOBOL ANGGARAN
1. Mafia Anggaran 19
2. Pembangunan Gedung DPR 21
3. Jual-beli Pasal 23
4. Proyek DPR 25
5. Uang Aspirasi 27
6. Hedonisme Elit dan Korupsi 31

7. Studi Tak Sebanding 33
8. Korupsi dan Biaya Politik 35

Bagian III
POLITIK SALING SERANG
1. Kepanikan Politisi..... 39
2. Politik Saling Serang..... 43
3. Pembubaran KPK? 45
4. Nyanyian Pencuri 47
5. Beking Koruptor..... 49
6. Surat Koruptor 51
7. Krisis Pengadilan Tipikor..... 53
8. Politik Kian Rapuh..... 55

Bagian IV
BELITAN KORUPSI PARPOL
1. Korupsi Parpol..... 59
2. Bersih-bersih Parpol 61
3. Ketegangan DPR dan KPK..... 63
4. Politik Dua Kaki 65
5. Koalisi Politik..... 67
6. Ormas Berpolitik..... 71

Bagian V
KABINET DAN POLITISASI BIROKRASI
1. Kabinet Comotan..... 75
2. Menteri Berpolitik 77
3. Ganti Menteri 79
4. Politisasi Birokrasi..... 83
5. Teka-teki *Reshuffle*..... 87
6. Kongres Partai Demokrat 89
7. Keterbukaan PKS..... 93
8. Muktamar PPP..... 97

Bagian VI
POLITIK KIAN MEMBUSUK

1. Politik Perburuan Koruptor 101
2. Pelemahan Kedaulatan Negara 103
3. Politik Kian Membusuk 105
4. Krisis Legitimasi 107
5. Politik BBM 109
6. Politik Penghematan 111
7. Menggoreng Berita 113
8. Sengketa dengan Malaysia 117

Bagian VII
AKROBAT SANG POLITISI

1. Politikus Muda 123
2. Capres Independen 125
3. Pasca Pemilukada 127
4. Politik Pilrek 131
5. Demam *Voting* 133
6. Kebohongan Publik 135
7. Moralitas Politik 137

Bagian VIII
RUUK DIY DALAM KONTROVERSI

1. Referendum Keistimewaan? 141
2. Polemik SBY dan Sultan 145
3. Manuver Politik RUUK 149
4. Dilema Politik RUUK 151
5. Subjek Politik 155
6. UU Parpol 157

BAGIAN I

Wakil Rakyat dan ATM

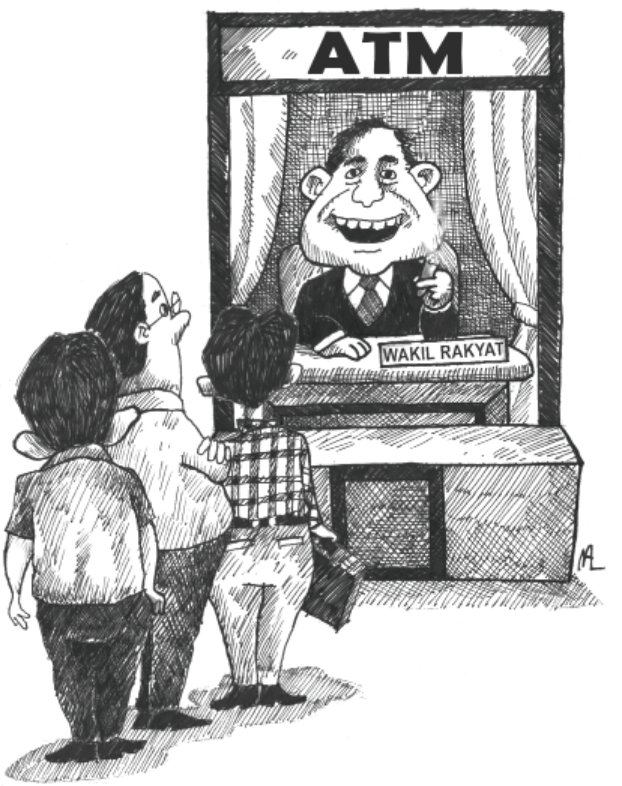

I. Petualangan

Simaklah betapa semaraknya persiapan perhelatan Pemilukada DKI Jakarta, yang telah menyedot perhatian berbagai kalangan. Gencarnya pemberitaan pesta perebutan jabatan Gubernur menjadi isu nasional, karena posisi pemimpin Ibukota Jakarta dianggap selevel nasional tingkat popularitasnya. Mari kita cermati gejala mobilitas para politisi, mereka yang sekalipun masih menjabat Walikota, Gubernur, dan para anggota DPR ternyata tertarik ikut perlombaan kuasa Ibukota.

Kekuasaan seolah segalanya. Dikejar sedemikian rupa, dengan cara apapun. Sejak keran demokratisasi dibuka, liberalisasi politik mengalir deras pemicu tingginya tensi hasrat kuasa. Kisah positif tercatat, betapa demokratisasi mendorong semangat partisipasi, mengontrol kekuasaan, bahkan mengupayakan tanggung jawab mandat pada rakyatnya. Hitam putih potret demokrasi yang terekam selama ini menjadi gambaran nyata, bahwa capaian demokrasi masih jauh dari harapan. Bahkan masih timpang.

Agenda mulia reformasi, yakni demokrasi yang menyejahterakan, belum sepenuhnya terwujud. Merosotnya kepercayaan publik pada penguasa, baik di legislatif dan eksekutif, termasuk yudikatif pada berbagai lini, memberi sinyal merah betapa kuasa politik makin menyusut daya legitimasinya. Pergantian kekuasaan tiap lima tahun seperti pemilu, pemilukada, dan sederat pertarungan kuasa tidak lebih sebagai peristiwa mekanistik, kurang memiliki daya ungkit gairah masyarakat untuk menciptakan imajinasi pencapaian cita-cita perbaikan.

Pragmatisme dalam struktur dan mentalitas politik makin menjadi-jadi. Ironisnya, sekalipun kekuasaan formal makin mendapat

reaksi negatif dan *distrust* dari rakyat, justru tidak membuat politisi berkuasa merefleksi diri, lalu secara bertahap membenahi. Sebaliknya, mobilitas politik dan hasrat kuasa kian melaju kencang. Gugatan rakyat yang mempertanyakan komitmen menjalani mandat, merosotnya etika politik, dan absennya tanggung jawab kekuasaan, seolah dianggap angin lalu. Suara dan aspirasi masyarakat disimplifikasi sekadar dukungan formal, berhenti saat pemilu usai.

Itulah konsekuensi proses pemilu sejak awal makin tergelincir pada pola transaksional yang diwarnai *money politic*, manipulasi suara, dan sederet tindakan kotor. Politik makin masuk konstruksi 'yang penting menang dan berkuasa'. Itulah konteks yang menjelaskan fenomena seseorang yang masih menjadi Bupati, Walikota, Gubernur, atau para anggota DPR yang belum selesai masa bakti menjalani mandat begitu mudah menginginkan pindah kuasa menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sekalipun wilayah sosial-politik (daerah) berbeda, tidak menghalangi hasrat itu.

Petualangan politik ini tidak salah secara hukum dan administrasi politik. Toh perundangan mengizinkan. Namun, secara etis menjadi problematik karena tanggung jawab atas mandat yang diembannya layak dipertanyakan. Politik tentu tidak sebatas hak dan kesempatan berkuasa. Namun tanggung jawab moralitas menjalani komitmen pada rakyat sebagai pemilih jauh lebih berharga sebagai bagian dari proses memberi makna kekuasaan yang bermartabat.

REPUBLIKA, 27 Maret 2012

2. Mabuk Kekuasaan

Meraih kekuasaan politik berbentuk jabatan, bagi sebagian orang merupakan kepuasaan tersendiri. Kekuasaan itulah yang menempatkan dirinya pada status kelas tertentu, dengan segala kenikmatan yang melekat. Apa yang diperoleh berupa kewenangan, fasilitas, kekayaan, ketenaran, cenderung mempertebal keyakinan dirinya untuk melanjutkan, memelihara, dan mengawetkannya. Kekuasaan yang dialaminya, bahkan telah menjadi candu yang memengaruhi kesadaran diri, akhirnya terus berupaya memperbesar dan menggunakan kekuasaan itu secara optimal dengan cara apapun.

Jabatan sebagai Kepala Desa, Bupati, Walikota, Gubernur, Presiden, atau menjadi anggota DPR (D) adalah kekuasaan yang dalam lapis tertentu disebut status elit pada lingkup masing-masing. Demi meraih kekuasaan, apapun dipertaruhkan. Harta kekayaan (uang dan materi sejenisnya), jabatan, identitas sosial, agama, suku, maupun sumber daya apapun yang dikomodifikasi guna mencapai kekuasaan. Sebut saja ramainya pesta politik pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) hampir semua daerah di Indonesia memiliki gejala yang sama.

Pertama, rata-rata Pemilukada dimeriahkan persaingan ekonomi, ditandai maraknya iklan pencitraan yang diwujudkan berupa gambar di pamflet, baliho, koran, radio, televisi yang menyedot dana begitu besar. Di daerah-daerah yang tergolong kaya misalnya, persaingan perebutan kekuasaan dalam Pemilukada biasanya masing-masing kandidat menghabiskan uang puluhan sampai ratusan miliar. Hasrat kuasa akhirnya menguras tabungan, menjual tanah, bahkan harta kekayaan habis-habisan dipakai untuk meraih kekuasaan. Maka tidak sulit untuk manarik garis hubung, bahwa perilaku royal para pejabat akhirnya mendorong mereka untuk korupsi melalui cara pemanfaatan

kekuasaan yang dimilikinya demi mengembalikan harta benda yang telah dipertaruhkannya.

Kedua, pada sebagian besar *event* Pemilukada, selalu saja ada petahana *(incumbent)*. Mereka yang telah menjabat satu periode, rata-rata tidak puas. Dengan berbagai alasan atau dalil pembenar kemudian maju kembali pada Pemilukada berikutnya. Padahal selama berkuasa seorang *incumbent* itu belum tentu memiliki prestasi membanggakan dalam ukuran tanggung jawab yang semestinya dilakukan.

Ketiga, begitu banyak Pemilukada diikuti dengan perselisihan antarkelompok yang menimbulkan bentrok, kekerasan, dan ragam ketegangan. Peristiwa teror disertai pembakaran fasilitas umum, tindakan saling serang antar kelompok yang bersaing demi merebut kekuasaan berbuah korban luka, kehilangan harta benda, bahkan nyawa melayang. Ini sungguh tragis, karena korbannya adalah masyarakat itu sendiri.

Gambaran di atas menunjukkan betapa kekuasaan yang hanya dilandasi nalar pragmatis demi meraih keuntungan posisi kelas tertentu, kerakusan status dan citra, serta diraih dengan cara-cara royal dan condong tidak beradab tentu tidak menghasilkan kebaikan. Kekuasaan yang diembannya seharusnya dipertanggung jawabkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai amanat konstitusi, tentu dengan landasan integritas diri bertumpu pada nilai dan moralitas sosial. Mabuk kekuasaan tidak lain adalah praktik pengingkaran, bentuk negasi amanah rakyat dalam berpolitik.

REPUBLIKA, 21 Februari 2012

3. Kontrol Kekuasaan

Pemilukada Kota Yogyakarta secara *defacto* sudah usai, meskipun secara yuridis masih menunggu keputusan akhir dari KPU Kota untuk menentukan hasil akhir dari sekian proses dan tahapan. Sejauh ini, kontestasi di antara para kandidat begitu kompetitif, karena perbedaan basis massa pemilih dan orientasi para kandidat yang memiliki titik tekan berbeda.

Secara umum model kampanye mereka nyaris tidak berbeda jauh dengan pengalaman daerah lain. Hanya saja, Pemilukada Kota Yogyakarta ini dihadapkan pada kecenderungan pertarungan keras. Gesekan antar massa, propaganda satu sama lain melalui sms dari *handphone*, serta provokasi pencopotan simbol-simbol di beberapa titik turut mewarnai dinamika Pemilukada. Bahkan fenomena *money politic* sempat menyedot perhatian masyarakat.

Pemilukada yang disebut berhasil, secara normatif ditandai derajat partisipasi yang tinggi oleh para pemilihnya, penyelenggaraan teknis yang tidak terkendala, serta proses demokratis dan jujur dalam berkompetisi. Dengan begitu, siapapun yang memilih demokrasi sebagai sistem politik, maka penyelenggaraan Pemilukada harus memperhatikan aspek itu. Damai, tidak ada kekerasan, berlangsung secara jujur dan akuntabel, serta mampu menghasilkan kepemimpinan terlegitimasi secara prosedural dan etik.

Tantangan terpenting sesungguhnya terletak pada pasca Pemilukada. Pengalaman sejauh ini menunjukkan, bahwa betapapun pelaksanaan Pemilukada meriah dan kompetitif, tetapi kadang tidak menjamin kekuasaan tersebut betul-betul amanah secara otomatis.

Karena itu prasyarat lanjutan yang perlu diperhatikan adalah kontrol aktif dari masyarakat pemilih atas kekuasaan yang terbangun.

Peran DPR Kota sebagai representasi rakyat, sudah tergariskan dalam batasan fungsi legislasi, kontrol, dan penganggaran sebagai jalur formal parlemen. Akan tetapi, peran yang mereka lakukan sebagai lembaga perwakilan itu belum menjamin kekuasaan di eksekutif akuntabel berdasarkan mandat konstitusi. Hal itu perlu diimbangi peran ekstra parlementer, yakni kontrol yang dilakukan oleh rakyat pada jalur dari luar.

Nalar kekuasaan secara praksis condong 'mempertebal kewenangan,' dan konsekuensinya bisa berjarak dengan pemilihnya. Di situlah titik krusial potensial *gap*, terjadinya jarak antara penguasa dan rakyat. *Mumpung* masih dalam kesadaran pemilih dan rakyat secara luas, pelajaran ini hendaknya dipikirkan sejak awal.

Seluruh janji dan visi-misi yang tertuang selama kampanye kandidat, hendaknya tercatat dengan baik dalam pikiran masyarakat, karenanya disebut dokumen politik. Kesemua itu akan termanifestasikan pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) Kota yang dipakai sebagai panduan arah pembangunan ke depan, dalam durasi lima tahun. Basis material program terwujud berupa tata kelola anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), sebagai indikator apakah ada konsistensi dan komitmen penguasa baru yang terbentuk.

Proses kontrol publik dari para warga secara keseluruhan pada Pemerintahan Kota Yogyakarta akan menjadi faktor penentu, bagaimana substansi pembaharuan dan perbaikan kebijakan akan berlangsung dan diwujudkan. Jika komitmen politik pemerintah dan fungsi parlemen di satu sisi diimbangi peran aktif kontrol masyarakat, di situlah sesungguhnya akan memberi makna penting Pemilukada bagi demokratisasi lokal untuk mewujudkan cita-cita perbaikan kehidupan Kota.

REPUBLIKA, 27 September 2011

4. Politik Biaya Tinggi

Makin sinis rasanya begitu orang membaca pemberitaan media massa atas kasus korupsi yang menimpa politisi Parpol. Hampir semua Parpol tengah risau dan goncang. Beberapa anggota Parpol pemegang kendali di eksekutif maupun legislatif di tingkat nasional ataupun daerah, tersandung masalah penyalahgunaan uang negara. Baik itu Golkar, PDIP, Demokrat, PAN, PKB, PKS, PPP, dan parpol kecil menengah lain, para kadernya berurusan di Pengadilan Tipikor dengan tuduhan korupsi.

Ada tiga hal penyebab semua ini. Pertama, corak politik berbiaya tinggi yang tengah berlangsung mengakibatkan politisi kian membabi-buta mencari uang demi mengongkosi sepak terjangnya meraih posisi kekuasaan, sekalipun dengan cara kotor. Kedua, lemahnya kontrol publik, terutama oleh konstituen atas perilaku politisi parpol. Bahkan ironisnya, pemilih tersedot dan terkondisi pada arus pragmatisme. Ketiga, manajemen Parpol yang oligarki mengakibatkan politik menjadi tidak akuntabel, gagal menjalankan amanah kepada publik sebagai lembaga representasi.

Memang mahal membangun 'citra politik instan' dizaman segala sesuatu serba memakai uang. Hampir semua Parpol terjebak menggunakan cara-cara royal saat mempengaruhi pemilih agar mendapat dukungan pada momentum pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun Pemilukada.

Rata-rata Parpol telah menjadikan semua hal yang 'tidak boleh terjadi' karena melanggar peraturan, menjadi 'hal yang biasa terjadi dan dimaklumi'. Pada batasan pemahaman nilai positif yang tercermin pada visi-misi, platform, serta program kerja, urusan moralitas terlihat nyata dan eksplisit, sesuatu yang indah dan membanggakan.

Namun, pada level praksis. tindakan politik nyata begitu mudah muncul pembenaran perilaku kotor. Begitu permisif menyaksikan pelanggaran moralitas terkait politik uang di lingkaran Parpol. Maka itulah, seorang bendahara Parpol berperan penting menjadi aktor pengumpul uang, melalui berbagai cara memanfaatkan jalur resmi dan ilegal demi mendapatkan uang membiayai politik organisasinya, maupun masuk kantong pribadinya.

Sementara itu, para pemilih juga terkondisi pragmatis, menjadikan politisi dan wakil rakyatnya ibarat ATM, sumber uang. Konstituen tidak dimampukan mengontrol para wakilnya, karena sejak awal rekrutmen politik dan atau saat proses Pemilu terkondisi transaksional. Mereka yang terpilih akhirnya tidak ada 'beban moral' untuk mempertanggung jawabkan jabatan politik pada pemilihnya atau konstituen.

Risikonya, pengingkaran jabatan senantiasa terjadi karena memang tidak adanya ikatan dan kontrol politisi Parpol dengan konstituen. Apalagi tanggung jawabnya sebagai lembaga representasi, tentu tidak berjalan karena watak pengelolaan Parpol juga oligarki.

Sudah saatnya memutus mata rantai pengait antara korupsi, politik biaya tinggi, serta watak oligarki. Kita harus yakin masih ada politisi parpol yang baik dan amanah, meskipun jumlahnya sangat minimal. Begitupun pemilih atau konstituen kritis harus diperbanyak melalui cara pendidikan politik untuk menjebol kebuntuan politik yang kotor.

Tantangan kita adalah mentransformasi nilai baru, membangun politik bermartabat agar demokrasi bermakna. Sudah saatnya berani mempraktikkan berpolitik dengan biaya yang tidak mahal, tetapi justru etika dan nilai sosial yang harus tinggi dan mewah.

REPUBLIKA, 21 Juni 2011

5. Transaksi Politik

Dalam sebuah perbincangan ringan di warung angkringan, seorang teman bertanya, bagaimana kira-kira memecahkan masalah transaksi politik yang makin liar pada tiap episode pemilu dan pemilukada. Menurutnya, masyarakat dan tim sukses kini makin terbiasa (tentu dengan sepengetahuan kandidat), menggunakan momentum pemilu untuk saling memperoleh 'keuntungan'. Wujudnya bisa bermacam-macam.

Mulai dari meminta uang untuk pembangunan, pemberian uang untuk dibagi-bagi (dikenal dengan *money politic*), janji-janji perolehan proyek jika berkuasa, sampai dengan pembagian jabatan. Pola-pola pragmatis dengan modus transaksi semacam ini tidak saja terjadi di daerah, namun juga nasional dengan gaya *high politic* ala mafia.

Saya menilai, model semacam itu banyak ditemui dalam perebutan kekuasaan, di level apapun. Gaya politik ini, pada mulanya hanya coba-coba. Di sejumlah kecenderungan demokratisasi yang menyediakan arena pemilu makin banyak, dulu publik pun menganggapnya sebagai bentuk 'penyimpangan', politik tidak bermoral. Karena tindakan itu tidak mengindahkan aturan dan norma pemilu sebagaimana dikehendaki demokrasi.

Akan tetapi, karena tidak adanya upaya penindakan hukum secara tegas, dan peristiwa itu makin ditoleransi, maka kegiatan 'menyimpang' justru menjadi 'moralitas baru' dalam pemilu. Artinya, jika pemain politik tidak bertransaksi, maka pemilu justru dianggap aneh. Gejala paradoksal. Disitulah, saya jadi teringat dalam sebuah acara diskusi yang membedah soal pemilukada. Menurut informasi para kandidat itu, umumnya mereka mengeluarkan uang lebih dari Rp 3 miliar untuk dana kampanye perebutan posisi bupati.

Mulai dari membayar periklanan, tim sukses yang tersebar sampai dusun-dusun, *nyogok* ke pengurus parpol, penyediaan uang transpor kepada peserta saat kampanye, sampai dengan pemberian bantuan langsung ke desa-desa. Ini memang tidak rasional. Bayangkan saja, jika mereka berkuasa 5 tahun nantinya, dengan asumsi menjalankan kekuasaan secara benar, apakah mungkin mereka itu dengan cepat mengembalikan modal kampanye sebesar itu?

Memang politik tidak sesederhana kalkulasi matematis seperti itu. Bisa saja, mereka mengeluarkan uang berapapun jumlahnya demi menjadi pejabat, karena alasan status. Menurut mereka, status sebagai penguasa daerah dan elit lokal menjadi *prestasi agung* yang mengasyikkan. Sekali lagi, hal-hal tersebut tentu menjadi kepuasan sang kandidat.

Tetapi, bagaimana jika mereka itu kalah dalam pemilukada? Tentu akan frustasi, karena pertarungan yang mereka lakukan 'minus nilai dan komitmen moralitas' hanya membuat mereka habis-habisan uang, pikiran dan tenaga. Apalagi, mereka yang 'nekat maju' itu hanya gara-gara didorong dan dikompori tim sukses. Begitu yakinnya mampu memenangkan pertandingan, bahkan *over confident*. Karena demikian, meskipun seorang kandidat gagal (kalah), *toh* tim sukses tetap saja 'sukses' memperoleh keuntungan. Itulah risiko politik transaksional. Bagaimana kita bisa mengatasi hal semacam ini? Kapan bisa diperbaiki?

Transaksi politik sudah berjalan agak lama. Tetapi keberanian mengambil langkah, masih saja terbatas. Jika kondisi ini dibiarkan terus, dan tidak ada terobosan baru untuk mengubahnya, maka citra demokrasi lokal juga kian merosot, persis apa yang tengah berlangsung di tingkat nasional. Saat ini dibutuhkan kenekatan nyali 'politik bermoral'. Butuh orang yang cerdas, bermoral baik, serta punya daya keberanian memadai untuk maju sebagai pemimpin dalam tiap pertarungan pemilu. Sekaligus dukungan dan dorongan rakyat yang solid, komit dan bersahaja. Dari segi waktu, untuk proses menuju lima tahun ke depan sudah menjadi keniscayaan untuk mulai perlu menata dan memperbaiki situasi, jika ingin demokrasi makin meningkat kualitasnya.

Mempersiapkan pemimpin bukan dengan cara instan, tetapi berproses agar kapasitasnya teruji. Begitu pula perlu membangun institusi representasi (parpol) yang betul-betul tangguh dan kredibel, yang ditandai lahirnya kader-kader handal dalam perjuangan politik. Bahkan, yang sangat penting adalah mendidik masyarakat agar cerdas, kritis, melek politik, agar demokratisasi kian bermakna dan mapan, demi perbaikan negeri ini. Politik tidak musti mahal, demi demokrasi yang bermartabat.

REPUBLIKA, 11 Mei 2010

6. Capres

Meskipun Pemilu 2014 masih dua tahun, kini mulai muncul spekulasi soal pencalonan presiden (Capres). Untuk sementara, nama-nama yang ikut mewarnai bursa Capres di antaranya Prabowo Subiyanto (Gerindra), Aburizal Bakri (Golkar), Hatta Rajasa (PAN), serta tokoh lain seperti Dahlan Iskan. Salah satu partai pemenang Pemilu, Partai Demokrat (PD), sebagian pengurusnya melemparkan ke permukaan nama Any Yudhoyono.

Untuk nama terakhir ini masih belum pasti. PD yang sedang digoncang 'prahara Nazarudin' tentu tengah menghadapi kerumitan konsolidasi internal, sehingga mempersulit penyatuan kekuatan untuk ikut mewarnai bursa awal. Nama Any Yudhoyono sengaja dihembuskan ibarat 'menjaga *image*' sebagai Parpol pemenang tidak ingin kehilangan *start*, sekalipun di dalamnya keputusan itu masih jauh dari konsensus final.

Bahkan, sebagai bagian manuver, PD juga menghembuskan langkah konvensi dalam penjaringan kandidat dalam pemilihan Capres, persis dilakukan Golkar di zaman Akbar Tandjung. Yang mengherankan, dinamika politik awal pencapresan itu ternyata tidak ditandai perubahan pola baru. Kritik dan cemoohan politik pencitraan yang selama ini berlangsung, dengan mengidentikkan pencitraan sebagai gaya khas SBY, ternyata terulang dan dipakai sebagian besar politisi. Bahkan model pencitraan SBY dijadikan sebagai rujukan tren memasarkan diri dalam perebutan kuasa politik formal.

Belajar dari pencapresan sebelumnya, dan kecenderungan pola yang berlangsung sejauh ini, hiruk pikuk pencapresan sangat kental dengan 'politik citra dan koalisi oligarki'. Parpol besar lebih dominan

mengambil inisiatif lebih awal karena percaya diri memiliki kursi di parlemen begitu besar, mengajukan kandidat melalui cara polesan begitu rupa sajian iklan merebak di mana-mana tersebar di media cetak dan elektronik. Bahkan, bentangan spanduk dan baliho juga bertaburan di sepanjang jalan, titik strategis bagian pameran di hadapan publik.

Sementara Parpol menengah, karena terdorong pula masuk pusaran pesta pencitraan, mereka juga ikut-ikutan memamerkan kandidatnya mengawali kampanye sebagai upaya kapitalisasi nama tokoh politik agar menjadi figur publik. Terlepas kandidatnya layak jual atau tidak, hasrat pencitraan nyaris dikerjakan secara berjamaah oleh para Parpol dan tokohnya untuk pencapresan.

Pertarungan politik yang hanya diwarnai pencitraan, tidak lebih sebagai pola pembentuk politik yang palsu. Rekayasa untuk membangun *image* seorang figur makin memerosokkan pada pendangkalan politik, karenanya rawan bagi krisis legitimasi atas kekuasaan yang terbentuk. Jika menginginkan agar kualitas demokrasi meningkat, salah satu fase pencapresan yang mulai muncul semestinya diarahkan atau diproyeksikan pada pembentukan arena pertarungan ideologi atau ide-ide dasar yang dipakai sebagai bahan pendidikan politik ke publik.

Mengenalkan sang kandidat dengan cara cerdas dan elegan. Memberi sentuhan nilai substansial, untuk mengajak masyarakat pemilih agar cerdas dalam menilai *track record* seseorang. Pencapresan tentu tidak sekadar pamer hasrat berkuasa, tetapi lebih merupakan media komunikasi kritis agar Pemilu dan kekuasaan yang terbentuk lebih bermakna dan berbobot.

REPUBLIKA, 29 Mei 2012

BAGIAN II

Mafia Membobol Anggaran

1. Mafia Anggaran

Praktik 'mafia anggaran' dalam kebijakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan daerah (APBD) beberapa waktu terakhir ini terus mencuat. Sebenarnya ini masalah lama yang sudah berurat-akar, dan sudah menjadi rahasia umum. Hanya saja, momentum untuk membongkar manipulasi tingkat tinggi elit kekuasaan semacam ini baru terwujud, seiring upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan para aktivis sosial memburu para koruptor di berbagai lini.

Beberapa bulan lalu Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA, 2011) secara meyakinkan menyampaikan kepada publik, bahwa politik penggunaan anggaran di parlemen sudah menyerupai mafia, menjadi sumber korupsi. Menurutnya, hal ini telah berlangsung dalam waktu yang lama dan tidak terbongkar, dengan risiko kerugian APBN besar-besaran.

Saat KPK menelisik proses pertautan kepentingan politisi di parlemen, birokrat pemburu rente, serta oknum pengusaha, maka pola-pola yang disinyalir FITRA itu makin jelas. Apalagi pengakuan para saksi maupun terdakwa dalam sidang-sidang kasus korupsi, serta diperkuat sajian investigasi para aktivis *Indonesia Corruption Watch (ICW)* misalnya, menyajikan data-data yang kadang mencengangkan kita semua. Indonesia dalam keadaan 'darurat korupsi.'

Dari jejak yang mulai terbongkar sejauh ini, menguatkan dugaan bahwa persekongkolan pembahasan perencanaan pembangunan dikonversi ke dalam mata anggaran yang akhirnya menjadi APBN, diduga melibatkan oknum pimpinan, komisi, Badan Anggaran DPR, pejabat kementerian, pejabat daerah, dan para pengusaha. Di situlah makin tersedia lahan subur peran para calo, sehingga manipulasi uang rakyat telah menjadi mafia.

Dibobolnya uang APBN dengan menyiasati prosedur anggaran, seolah-olah mereka itu telah melalui prosedur administrasi secara benar. Menggunakan dalil birokratik dan politik kebijakan, tahapan pembahasan sampai keputusan tersistematisasi. Padahal semua itu condong persenyawaan 'manipulasi berjamaah' dengan gaya 'tahu sama tahu,' yang akhirnya memaklumi setiap cara jahat sebagi hal yang biasa.

Kita bisa simak misalnya, rute awal bertajuk musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dikonstruksi sebagai perpaduan pendekatan partisipasi, teknokrasi, dan politik. Seluruh aspirasi warga (desa dan kelurahan) melalui perencanaan dari bawah *(bottom up)* ditempuh, kemudian diolah pemerintah secara teknokratik, lalu disepakati secara politik bersama parlemen. Hal ini berlaku di Pemda-pemda kabupaten/kota dan kementerian di tingkat nasional.

Tetapi faktanya, seluruh perencanaan dirancang partisipatif dari masyarakat itu dihancurkan saat berlangsungnya konversi dari perencanaan menjadi penganggaran yang melibatkan eksekutif dan legislatif. Studi-studi mengenai Musrenbang ini (FITRA, 2010; Prakarsa, 2009; IRE, 2010) misalnya menyebutkan bahwa dari pengalaman di kabupaten/kota bahwa kerjasama oknum eksekutif dan legislatif, membuat rakyat tidak pernah mendapatkan tempat dalam struktur anggaran.

Membongkar mafia anggaran pada rute penyusunan APBN, dapat dijadikan insprasi bagi langkah-langkah membongkar mafia anggaran di daerah. Bagaimanapun juga, pertarungan terbesar dalam kebijakan pembangunan adalah bagaimana menyusun, mengalokasi, dan implementasi APBN dan APBD itu secara nyata. Menelisik korupsi dari pintu APBN dan APBD dapat dijadikan jalan strategis mendorong reformasi birokrasi yang telah menjadi komitmen bersama demi terciptanya *good governance* dan *clean government*. Secara simultan juga mengukur komitmen politisi di parlemen dan parpol, agar secara serius membenahi politik kebijakan pembangunan di nasional maupun daerah.

REPUBLIKA, 4 Oktober 2011

2. Pembangunan Gedung DPR

Keinginan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR untuk membangun gedung baru sebagai fasilitas kerja bagi para wakil rakyat itu cukup kontroversial. Ada dua isu yang mencuat di media. Pertama, besaran anggaran yang dibutuhkan yakni Rp 1,6 triliun dengan desain tiga tahun anggaran tersebut dirasa terlalu boros dan mewah untuk ukuran pembangunan sebuah gedung wakil rakyat. Kedua, mengenai kelengkapan fasilitas seperti kolam renang dan spa untuk kebugaran, dianggap tidak relevan menunjang kegiatan dan kerja mereka. Pada mulanya, kecaman dilontarkan oleh elemen-elemen masyarakat di media massa, setelah ekspose isu ini demikian gencar.

Namun dalam perkembangannya justru BURT menuai protes dari para anggota DPR berbagai fraksi. Tuntutan mereka, agar meninjau ulang soal rancangan pembangunan Gedung DPR oleh BURT, bahkan membatalkannya. Sebagian di antara mereka menyebutkan, bahwa rancangan proyek itu tidak melibatkan Fraksi dan Badan Musyawarah (Bamus). Integritas para wakil rakyat saat ini memang terus diuji. Apakah peka atas keresahan masyarakat, ataukan *cuek* dengan segala kontroversi. Percepatan meningkatnya kontroversi isu ini merupakan bagian rentetan kasus yang menimpa para wakil rakyat.

Isu-isu sebelumnya sempat mencuat misalnya, soal kecurigaan mandegnya pengusutan kasus Bank Century, kenaikan gaji DPR, permintaan dana aspirasi, banyaknya anggota DPR yang absen dalam berbagai sidang, minimnya produktivitas kerja, serta sejumlah anggota dewan yang menjadi tersangka karena berbagai kasus, adalah rangkaian masalah yang menjadi sorotan dengan segala implikasi yang melekat di dalamnya. *Track record* semacam ini tentu makin akumulatif

di benak masyarakat. Karuan saja, jika ada kebijakan baru yang dirasa janggal dalam benak hati masyarakat, selalu mudah menyulut ledakan reaksi negatif berupa kecaman publik.

Komposisi para anggota parlemen begitu *fragmented*, ada 9 kelompok partai dengan haluan beragam. Namun, para politisi di Senayan itu secara umum wataknya cenderung pragmatis. Persaingan antar kelompok di tubuh parlemen, rata-rata arahnya untuk memelihara 'citra' politik, sekaligus memperkuat eksistensinya di mata publik melalui cara-cara instan di media massa dan advertisial.

Tetapi, sayangnya para politisi wakil rakyat itu lupa bahwa pola pemeliharaan pencitraan diri sebenarnya tidak sebanding dengan produktivitas dan komitmen nyata. Bahkan defisit kerja politik parlemen terjadi. Pencitraan memang mewabah di jagad politik kita. Cara-cara SBY memproduksi *image* mengesankan dirinya supaya eksis, makin dikembangkan pula oleh politisi di parlemen. Mereka itu, saat ikut berkompetisi dalam pemilu rata-rata memakai strategi pencitraan.

Wajar saja jika konstruksi berpikir masyarakat atas parlemen cenderung buruk, karena reputasi kerja yang merosot ternyata gagal dikompensasi dengan citra yang dikembangkannya selama ini. Tidak heran jikalau tindakan positif apapun yang berusaha diyakinkan oleh sebagian anggota parlemen, akhirnya tidak mampu meningkatkan daya dukung dan legitimasi masyarakat pada insititusi ini.

Sebagaimana diketahui, sebenarnya ada beberapa anggota parlemen berintegritas dan memiliki idealisme kuat. Namun mereka ini jumlahnya minoritas, dan seringkali tidak mendapat *space* memadai dalam proses kebijakan politik. Karenanya, minoritas idealis di parlemen ini terblokade oleh politisi oligarkis dan konservatif yang menguasai fraksi dan komisi.

Inilah pertaruhan besar parlamen. Kontroversi pembangunan gedung DPR harus dibaca dan dipahami sebagai dampak akumulatif jarak antara lembaga representasi ini dengan rakyat. Reaksi yang muncul tak cukup ditanggapi sesaat. Namun, seharusnya parlemen mengoreksi diri secara menyeluruh mengenai reputasinya yang kian merosot. Disanalah, perlu langkah besar untuk membangun kredibilitas lembaga representasi ini, agar legitimasinya kian kokoh di mata publik.

REPUBLIKA, 7 September 2010

3. Jual-beli Pasal

Cerita soal ulah politisi, pemerintah dan pemodal dalam persekongkolan untuk menggapai tujuan tertentu merupakan masalah lama. Bahkan sudah menjadi rahasia umum, peristiwa yang sudah diketahui khalayak, tetapi tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Kini isu itu mencuat kembali, saat sindiran keras yang dilontarkan para tokoh dan aktivis sosial yang dialamatkan pada lembaga wakil rakyat yang konon dituding banyaknya praktik jual beli pasal.

Harian *Republika* pernah memuat *headline* berjudul: "Legislasi Disandera Pemodal" yang di dalamnya mengulas betapa banyaknya Undang-undang (UU) yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pembatalan itu bukan semata kualitas yang buruk kebijakan legislasi nasional namun yang justru memprihatinkan adalah bahwa penyusunan perundang-undangan itu ternyata dikuasai segelintir pemilik modal yang syarat kepentingan (*Republika,* 17/11/2011).

Praktik konspirasi secara sistematik semacam itu memang sangat memprihatinkan jika dilakukan pihak yang memiliki otoritas politik dan hukum, yang cenderung berdampak kerugian masyarakat dan negara. Kendatipun telah nyata kasus itu terjadi, berlangsung lama, dan dialami para politisi. Tetapi *toh* tanggapan lembaga seterhormat DPR justru sangat reaktif dan condong defensif.

Para politisi yang mendapatkan tudingan semacam itu, dengan gaya 'kebakaran jenggot' meminta agar tudingan itu dibuktikan dengan melaporkannya kepada Badan Kehormatan (BK). Bagaimana mungkin, meminjam istilah Mahfud, sebuah bukti diminta membuktikan lagi? Karena fakta politik jika dikonversi menjadi bukti hukum selalu ada kesulitan merintangi. Padahal, nyata-nyata politisi itu 'tahu sama tahu' namun saling bersandiwara menutupinya.

Aromanya sudah tercium, begitupun pola lama yang berlangsung mengenai transaksi jual beli pasal telah terdeteksi terkait penyusunan UU. Tetapi nyatanya sulit untuk diangkat sebagai bukti hukum kecuali pelakunya mengaku. Kisah yang disampaikan Mahfud cukup menarik. Beliau membeberkan bagaimana dulu zaman pembahasan soal Jamsostek, pemerintah memboyong anggota DPR ke sebuah hotel lalu dibayar. Intinya mereka diminta membuat pasal tertentu yang akan direkayasa pengesahannya oleh DPR, padahal UU tersebut tidak ada dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Besar kemungkinan banyak kisah lain yang memiliki modus yang sama juga terjadi.

Tindakan transaksi ini tentu menggunakan uang yang bisa mencapai ratusan milyar, agar suatu UU itu bisa digolkan oleh DPR. Berproses secara tertutup dan sistemik ibarat mafia, di mana publik juga kadang tidak mampu mendapat akses menembus untuk mendapatkan informasi atau gambaran senyatanya atas keputusan-keputusan besar yang kadang kontroversial di republik ini.

Kasus ini terkait pula pengalaman parlemen di daerah. Misalnya produk politik perundangan yang sifatnya rekayasa jahat berupa peraturan daerah (Perda) yang digiring agar memenuhi selera sang pemodal. Caranya menyuap parlemen dan pemerintah daerah, tanpa sepengetahuan publik.

Di sinilah betapa kerumitan masalah transaksi jual beli pasal diibaratkan seperti 'gunung es,' begitu nampak ujungnya di permukaan. Padahal banyak kasus itu terjadi dibawah tidak terlihat atau luput dari pantauan masyarakat. Karena itu, kemunculan debat atas kasus jual-beli pasal perundangan hendaknya diolah atau dimanfaatkan sebagai pintu masuk, untuk menelisik lebih dalam pada jantung masalah kegagalan legislasi di Indonesia. Irisan kepentingan jahat politisi di parlemen, pemerintah, dan pemodal harus dibongkar.

Kesadaran kritis masyarakat mengenai rangkaian kasus semacam ini perlu terus diperkuat. Inilah hulu dari kebobrokan politik hukum di Indonesia sampai hilirnya dengan risiko makin tidak menentunya kebijakan dan arah perubahan.

REPUBLIKA, 22 November 2011

4. Proyek DPR

Apapun yang dilakukan oleh DPR kini terus menjadi sorotan publik. Itu konsekuensi logis sebagai lembaga politik yang mewakili aspirasi rakyat Indonesia. Apalagi dengan jumlah anggota DPR sebanyak 560 dengan latar belakang politik beragam dan orientasi serta perilaku yang begitu rupa, tentu dinamika mereka begitu kencang.

Kontroversi mutakhir yang menimpa DPR ini adalah soal pembengkakan budget renovasi ruang rapat badan anggaran (Banggar) sebesar Rp 20 miliar, menyusul sebelumnya debat ramai terkait pembenahan toilet yang juga menelan dana miliaran rupiah. Semenjak informasi *budget* ini tercium publik melalui olahan informasi media massa serta hasil telisik para aktivis anti korupsi dan gerakan transparansi anggaran, para pimpinan dewan begitu berang.

Para politisi Senayan 'kebakaran jenggot' merasa terus dipojokkan. Sekjen kesekretariatan dewan dituding tidak koordinasi dengan ketua DPR serta badan urusan rumah tangga (BURT) DPR. Tentu tudingan ini begitu mudah dipatahkan publik, dengan argumen bahwa prosedur penentuan *budget* sebagaimana tatacara dan rute penyusunan anggaran maka keputusan itu jelas sepengetahuan pimpinan DPR.

Reputasi lembaga yang dianggap sebagai pilar demokrasi ini memang terus tergerus, seiring begitu banyaknya kasus korupsi menyeret puluhan politisi di Senayan ini. Baik yang sudah dijebloskan ke penjara, maupun masih pada tahapan dan proses hukum oleh KPK. Apalagi jika mengungkap masalah politisi dengan variasi kasus yang telah terekspose di media massa, peristiwa sejenis dan ragam modus berlangsung di daerah yang dilakoni DPRD.

Itulah sebabnya mengapa publik makin sensitif atas apa yang dikerjakan politisi. Memang tidak bisa digeneralisasi bahwa semua

anggota DPR berperilaku buruk. Kita akui masih banyak wakil rakyat yang mampu menjalani tugasnya dengan benar. Setidaknya komitmen mereka memperjuangkan aspirasi berlandasan prinsip nilai serta moralitas. Hanya saja, sistem dan kultur politik yang terpelihara dan dilanggengkan telah membentuk karakter mereka sehingga secara umum politisi masuk tenggelam jebakan pragmatisme yang berlebihan.

Sebagian besar politisi pragmatis konon makin menikmati tindakan pengingkaran 'berjamaah,' bahkan menganggapnya sebagai hal biasa, terus diulangi. Tumbuh konstruksi, seolah korupsi dan manipulasi kekuasaan menjadi moralitas baru politik kontemporer. Keadaan ini jelas mengkhawatirkan di tengah harapan publik agar lembaga representasi ini menjadi motor memperbaiki demokratisasi yang telanjur disorientasi.

Dengan demikian, mencuatnya kontroversi anggaran proyek DPR ini perlu dipahami secara jernih. Maknanya, agar DPR terus menerus berbenah diri karena bagaimanapun juga lembaga ini telah dimandatkan sebagai tumpuan dan bagian pilar demokrasi Indonesia. Gugatan publik pada DPR jangan dibaca sebagai langkah sistematik mendemoralisasi politisi di Senayan tersebut, sehingga reaksinya harus lebih konstruktif.

Sikap kritis masyarakat sipil yang ditunjukkan oleh aktivis LSM, gerakan mahasiswa, akademisi kampus, serta media massa merupakan praktik kontrol untuk perimbangan kuasaan. Jika DPR sebagai lembaga legislatif mengontrol jalannya pemerintahan (eksekutif), maka apa yang diakukan masyarakat sipil menyoroti DPR dan Pemerintah tidak lain untuk memastikan agar mereka dalam menjalankan roda kekuasaan bernegara telah sesuai jalur yang ditentukan, berdasar konstitusi dan koridor demokrasi.

REPUBLIKA, 17 Januari 2012

5. Uang Aspirasi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), lembaga 'terhormat' dalam rezim demokrasi itu, kini kembali bermanuver. Mereka pernah mengukir prestasi gemilang saat di Pansus Century. Gebrakan spektakuler pengusutan *policy bailout* Bank Century yang dinilai *abuse of power* eksekutif, dipuji banyak pihak. Namun sayangnya, upaya penuntasan kasus Bank Century itu di mata publik belum juga rampung, bahkan terkesan bertele-tele.

Mungkin karena menganggap dirinya telah berprestasi menembus harapan publik soal Bank Century itu, kini manuver baru muncul. Para anggota DPR khususnya fraksi Golkar tiba-tiba secara ambisius mengusulkan agar para anggota DPR diberi jatah Rp 15 miliar tiap tahunnya untuk dana aspirasi di daerah pemilihan (Dapil). Jika dikalkukasikan, total bisa menyedot dana kurang lebih Rp 8,4 triliun diambil dari APBN.

Perdebatan dan kontroversi soal itu masih memanas. Pemerintah melalui Menko Ekonomi dan Menkeu menolak usulan itu. Beberapa Parpol juga bereaksi negatif. Namun, Golkar sebagai fraksi pengusul tetap bersikeras untuk bisa meraup uang, atas nama biaya aspirasi. Bahkan Golkar juga mengancam akan membuat *deadlock* pembahasan APBN 2011, seandainya pemerintah menolak usulan tersebut. Kira-kira apa yang melandasi usulan itu, dan apa maknanya?

Peran parlemen yang cukup besar mengontrol jalannya pemerintahan, adalah mandat positif yang harus diapresiasi. Tujuannya, agar kebijakan eksekutif benar-benar sesuai amanat rakyat dan garis konstitusi. Namun, bukan berarti hal itu menjadi pembenar bagi parlemen memasuki area *policy* di mana pelaksanaannya domain eksekutif.

Alasan parlemen untuk mendapat dana pembinaan, atau dibalut dengan judul distribusi *resources* ke konstituen, memang sulit untuk dinalar. Dalam konsep *governance* dan *citizenship*, tugas pemenuhan kebutuhan dan hak-hak warga negara merupakan tanggung jawab negara yang dikerjakan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, parlemen bertugas bukan sebagai implementor pembangunan atau pemberian bantuan kepada masyarakat. Semestinya tugas parlemen adalah mengawasi sekaligus memastikan agar bantuan, tanggung jawab, serta tugas-tugas pemerintahan melalui rangkaian program pembangunan mampu menjawab masalah dan hak warga negara.

Nah, jika parlemen mengambil uang APBN untuk kegiatan masyarakat di dapil, secara tidak langsung parlemen memasuki peran birokratik mengganti tugas pemerintah. Apapun alasannya. Misalnya soal disribusi yang selama ini tidak merata dalam pembangunan, karena pemenuhan tanggung jawab parlemen pada konstituen, atau demi mem-*back up* kerja parlemen untuk memberdayakan masyarakat. Itu bahasa dan argumen klise.

Tidak sulit menelisik kepentingan dan motif parlemen itu. Sesungguhnya mereka hanyalah berupaya menjaga citra 'dewa' pemberi bantuan konstituennya, saat berkunjung ke pemilihnya. Tindakan ini dilakukan, karena saat kampanye mereka menjanjikan perbaikan keadaan. Bahkan, banyak di antara anggota DPR itu terpilih karena membagi-bagi uang secara pragmatis saat Pemilu. Sementara, dalam pertarungan kebijakan, mereka tidak mampu mewujudkan itu secara konkrit melalui kebijakan strategis sesuai kewenangan yang melekat dalam dirinya.

Akhirnya, ditempuh langkah pragmatis dengan mengambil dana APBN, lalu dibagi-bagi saat berkunjung. Jika ini yang terjadi, para anggota DPR 'yang terhormat' itu tidak sedang membangun sistem pelayanan publik, menata *governance* yang baik, serta tidak mendidik warga negara secara cerdas. Bukankah pemenuhan hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya harus dipenuhi oleh negara dalam sistem sesuai dengan kerangka konstitusi? Itulah yang diabaikan para politisi di Senayan.

Para wakil rakyat itu justru sedang menceburkan dirinya pada tindakan birokratisasi politik, dan masuk area administrasi pembangunan. Salah-salah bisa terjebak korupsi. Jika saja mereka nekat dan mendapatkan 'jatah uang aspirasi' dari eksekutif, kemungkinan godaan penyalahgunaan uang demikian besar. Dengan begitu, bukan mustahil jika mereka memanfaatkan uang sekadar memperkaya diri, belum tentu demi perbaikan hidup konstituen. Mulai dari soal biaya perjalanan dinas, uang saku, dan bermacam bantuan yang kemungkinan bisa 'diakali'.

Kelakuan ini persis gaya birokrasi lama, warisan Orde Baru, yang suka memanipulasi. Wajar saja jika Golkar yang mengajukan usulan ini. Nah, nantinya anggota DPR akan belajar ilmu administrasi menyiasati uang atas nama aspirasi. Lagi-lagi, rakyat selalu jadi tameng atas nama aspirasi, namun keuntungan pribadi terus didapatkan. Semoga mereka menyadari semua ini.

REPUBLIKA, 8 Juni 2010

6. Hedonisme Elit dan Korupsi

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, memang bukan pekerjaan ringan. Dalam perkembangannya, ternyata struktur dan pola korupsi terbukti makin berurat akar dalam birokrasi pemerintahan, sistem politik, dan lembaga hukum. Bahkan kian memengaruhi pembentukan mental korup di tengah masyarakat. Pendekatan kuratif dengan cara mengejar, menghukum, serta memberi efek jera sang koruptor melalui strategi legal, ternyata belum efektif membendung golongan perampok uang negara ini.

Sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai motor utama, diakui memang telah menumbuhkan energi dan semangat perlawanan masyarakat pada para koruptor. Namun, upaya itu belum sepenuhnya berhasil membumihanguskan korupsi dalam praktik pemerintahan dan kegiatan politik berukuran besar, karena memang beban yang begitu berat. Di situlah relevansi peran serta masyarakat secara lebih luas, baik golongan akademisi di kampus, aktivis LSM dan ormas, serta media massa. Bahkan perlunya membenahi strategi dan pendekatan mengatasi korupsi.

Dalam sebuah sarasehan budaya di UII, Jumat (30/3/2012) malam, Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, menekankan upaya KPK mengombinasikan pendekatan kuratif dengan preventif, melalui cara memperkuat keluarga dan masyarakat sebagai basis pendidikan anti korupsi. Upaya legal membendung koruptor harus dibarengi pula membangun kesadaran pencegahan korupsi di lembaga paling bawah, yakni keluarga dan komunitas bawah masyarakat.

Merebaknya gaya hidup hedonis di kalangan elit politik dan para pejabat pemerintahan menjadi fakta yang mempermudah daya ko-

rupsi meningkat. Sikap royal dan bermewahan makin menjadi-jadi, saat rekayasa kebijakan 'rumah tangga negara' memfasilitasinya melalui cara-cara manipulasi administrasi. Jabatan tidak lagi dianggap sebagai amanah, atau bagian dari tanggung jawab yang melekat dalam tugasnya sebagai abdi negara, tetapi justru dijadikan sebagai ladang basah mengeruk keuntungan secara membabi buta.

Tidak heran jika elit kekuasaan cenderung serakah, memanfaatkan aksesnya untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Padahal, mereka saat dilantik memegang jabatan telah bersumpah di bawah kitab suci untuk menjalankan tugasnya secara tanggung jawab dan tidak korupsi.

Uniknya, sekalipun para koruptor diburu dan berhasil diadili oleh KPK, toh pola semacam ini terus berlangsung, dengan kasus-kasus baru dan aktor yang berbeda. Kian berkembang konstruksi sosial bahwa elit politik identik dengan sikap 'royal dan korup'.

Gerakan anti korupsi berbasis pendidikan keluarga dan masyarakat perlu dipahami, di satu sisi sebagai bagian pencegahan perluasan korupsi yang bermula dari entitas paling bawah. Sementara di sisi lain menyemai mental peduli, kritis, bersih, dan bertanggung jawab berangkat dari penanaman nilai-nilai kejujuran, integritas, dan keteladanan sejak dini dari keluarga dan masyarakat.

Gerakan semacam ini perlu pemaduan antar pihak untuk saling berjejaring sosial, membutuhkan visi perwujudan masyarakat bermartabat, dalam durasi jangka panjang. Mengepung para koruptor dari pinggiran sebagai bagian gerakan sosial. Karenanya strategi ini tidak bisa dinilai secara instan.

REPUBLIKA, 3 April 2012

7. Studi Tak Sebanding

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dituding suka *'ngelencer'* atau berwisata ke luar negeri yang dilabeli studi banding. Peristiwa mutakhir saat para wakil rakyat itu berkunjung ke Australia sempat menggegerkan publik. Rekaman video berisi dialog mereka dengan para pelajar dan mahasiswa Indonesia di Australia, terutama soal pertanyaan alamat email anggota dewan yang dijawab sekenanya dengan *komisi8@yahoo.com*, yang diunggah ke situs *Youtube* menjadi kontroversi.

Masalah utama sesungguhnya bukan soal sikap asal-asalan anggota DPR yang menyebut alamat email. Tetapi lebih dari itu, politik yang diperankan para pejabat, termasuk anggota DPR, kini senantiasa menjadi bahan umpatan dan ketawaan banyak orang. Persepsi atau cara pandang sebagian kelompok masyarakat cenderung miring, *distrust*, sinis atas tindakan atau perilaku para pejabat di negeri ini. Fenomena seperti ini adalah akumulasi gagalnya lembaga representasi memerankan diri sebagai wakil rakyat, tak mampu menjalankan tugas sesuai mandat.

Penilaian kritis studi banding DPR sebenarnya masalah lama yang berulang-ulang. Meskipun dihujat sana-sini, toh agenda studi banding tetap saja tiap tahun dilaksanakan, berdalih macam-macam. Sebagaimana dilansir *republika.co.id* (6/5/2011) misalnya, tiga LSM menemukan beragam fakta dari 58 kali studi banding, atau dari 143 kali kunjungan ke luar negeri yang dilakukan oleh alat kelengkapan (tidak termasuk Badan Kerja Sama Antar Parlemen/BKSAP) pada keanggotaan DPR periode 2004-2009. Selain hanya tiga laporan yang dipublikasikan di laman DPR *(www.dpr.co.id)* dan miripnya hasil studi banding yang dipublikasikan dengan informasi di sejumlah laman, aktivis LSM menyimpulkan betapa hasil studi banding tidak berkorelasi positif dengan produk kerja konkrit DPR.

Tercatat Komisi III sebelumnya telah melakukan studi banding ke Swiss (6-12 Juni 2009) dan Rusia (24-29 Mei 2009) dalam rangka pembahasan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang. Status RUU tersebut tidak selesai pada DPR periode 2004-2009. DPR periode 2009-2014 memasukkan RUU Pencucian Uang ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2010, dan kembali diprogramkan studi banding ke Perancis dan Australia pada 7-13 Juni 2010.

Kondisi yang sama dipratekkan pula oleh BURT saat melakukan studi banding ke Inggris dan Amerika Serikat (1-7 Mei 2011), berdalih studi perbandingan penguatan lembaga parlemen. Padahal Pansus RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, atau Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR yang dibentuk pada 2006 lalu telah melakukan serangkaian studi banding, dengan maksud dan tujuan yang sama.

Ini sungguh ironis. Idealnya, dalam program studi banding semestinya DPR mempersiapkan program dan skema kerja yang akan 'dibandingkan' dengan konsep dan praktik kerja di mana dituju. Tetapi, kenyataannya tidak ada sesuatu yang dibandingkan, bahkan cenderung mengulang-ulang sebelumnya. Program tersebut hanyalah berlapis administratif, formalitas belaka demi memanfaatkan anggaran. Wajarlah jika DPR dinilai royal.

Kondisi ini membuktikan, kemerosotan kepercayaan masyarakat pada para anggoata Dewan, sebenarnya semua itu akibat ulah DPR itu sendiri. Biaya begitu besar tersedot untuk studi banding mencakup transport, penginapan, honor, dan seterusnya 'tidak sebanding' dengan hasil yang didapatkan.

REPUBLIKA, 10 Mei 2011

8. Korupsi dan Biaya Politik

Biaya politik kian mahal, kualitas kekuasaan yang terbentuk cenderung murahan. Itulah kalimat yang mengekspresikan sinisme yang berkembang di masyarakat, yang terus bermunculan seiring gempita pesta politik rotasi kekuasaan di era demokrasi formal yang berlangsung beberapa tahun terakhir ini.

Mahalnya biaya politik terlihat dari besaran sedotan dana dari APBN dan APBD, untuk memfasilitasi kegiatan Pemilu Presiden, Parlemen, Gubernur, Bupati, dan Walikota. Begitu pula, dana ratusan miliar harus keluar dari kocek kandidat dan para bandar demi membiayai pembelian spanduk, baliho, iklan di TV dan media cetak, mobilisasi massa, dan upaya suap menyuap. Istilah populer sebagai *money politic*.

Hal itu belum menyangkut dana operasional sekretariat tim sukses seperti konsumsi, honor, dan biaya kegiatan mobilisasi. Bahkan yang kadang tidak masuk akal adalah sedotan uang biaya jasa survei hanya demi membangun pencitraan. Survei yang tidak dilakukan secara objektif atau model pesanan sebagai bahan kampanye dan propaganda, biasanya condong untuk menyenangkan pemesannya.

Apakah seluruh kalkulasi pengeluaran dana kampanye, dilaporkan secara jujur dan transparan kepada penyelenggara Pemilu? Sebagian besar tidak jujur, alias manipulatif. Jika mereka jujur kemungkinan banyak politisi yang dihukum karena melanggar. Partai atau kandidat, rata-rata *ngakali* antara laporan ke KPU(D) dengan pengeluaran riil dan pemasukan. Fenomena itu pada akhirnya 'tahu sama tahu', dan rata-rata publik sudah memperkirakan 'manipulasi' administrasi agar lolos dari jeratan undang-undang.

Sungguh memprihatinkan kenyataan royal dan mahalnya biaya politik yang masih saja dipelihara oleh Parpol. Ironisnya, fakta pengeluaran dana kampanye tidak sebanding dengan gaji atau honor resmi yang didapatkan saat nanti menjabat dalam struktur kekuasaan.

Di situlah terjadi kerawanan, dan kemungkinan adanya korupsi demi mengembalikan modal yang telah disebar dengan berbagai cara. Sudah menjadi rahasia umum, para politisi di parlemen banyak mengalami 'kebangkrutan' pasca Pemilu.Sekalipun menyandang status elit yaitu pejabat negara, beberapa politisi sampai menggadaikan SK pengangkatan jabatan untuk jaminan membayar hutang.

Beban melingkar itupun masih berlanjut. Politisi berhasil menduduki kursi parlemen, mereka juga tidak luput dari jebakan menjadi mesin 'ATM'. Politisi harus memenuhi permintaan uang dari para pemilihnya. Risiko saling kait, ibarat lingkaran setan korupsi dan pragmatisme politik biaya tinggi. Tindakan berpola transaksional tentu saja menggeser problem sistemik menjadi bersifat personal. Fungsi representasi politisi dan Parpol makin hilang tak berbekas.

Peristiwa mutakhir tertangkapnya secara beruntun para politisi di DPR dan DPRD oleh KPK karena tuduhan korupsi APBN maupun APBD sebagaimana ulah badan anggaran (Banggar) memperpanjang daftar masalah akibat politik biaya tinggi. Keprihatinan atas fenomena semacam itu sebenarnya terus dirasakan. Tetapi, lagi-lagi masih minim gebrakan atau terobosan baru yang bersifat sistematik.Tantangannya, bagaimana mengupayakan politik berbiaya murah sekaligus hasilnya berkualitas politik tinggi dan beradab.

REPUBLIKA, 17 Juli 2012

BAGIAN III

Politik Saling Serang

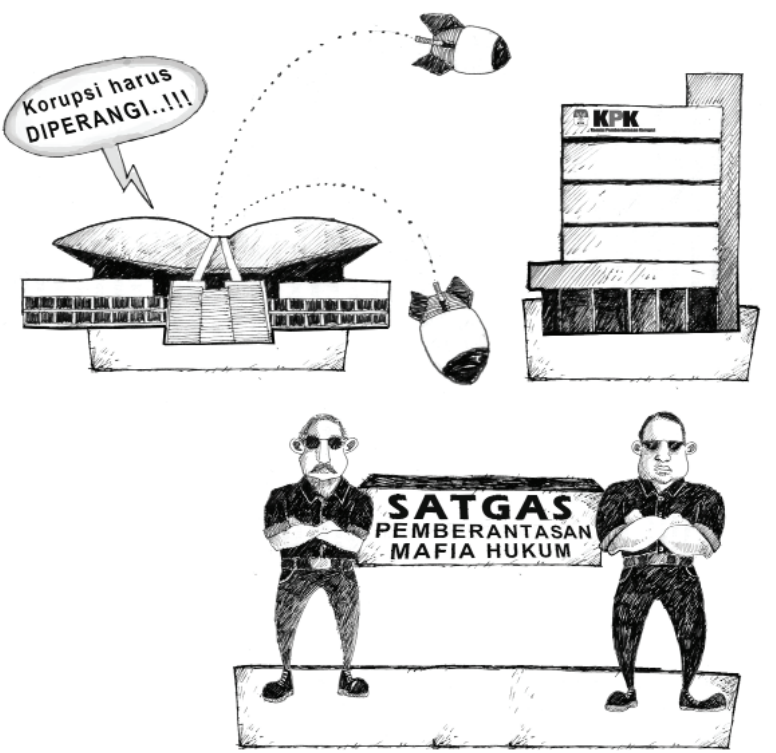

1. Kepanikan Politisi

Tekanan demi tekanan yang diarahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga ekstra negara ini untuk terus menjalankan mandat pemberantasan korupsi di negeri ini. Sepak terjang KPK untuk membongkar struktur mafia korupsi, tentu berdampak pada siapapun yang merasa terusik kepentingannya. Di antaranya, politisi Senayan.

Jika dulu Marzuki Ali, sang ketua DPR RI, pernah melontarkan pernyataan pembubaran KPK —meskipun karena desakan sana-sini akhirnya diralat—, kini ide itu muncul kembali secara lantang dan terbuka disampaikan Fahri Hamzah, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kontroversi ini adalah bagian dari akumulasi proses pertarungan KPK dengan DPR.

Pada bulan-bulan terakhir ini terjadi perselisihan KPK dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR terkait lanjutan pengusutan kasus penyuapan pengadaan proyek di Kemenpora, Kemenakertrans, dan beberapa Kementerian lain yang konon terindikasi secara sistematik melibatkan peran Banggar.

Langkah KPK untuk mengkonfirmasi temuan data sementara kepada Banggar dengan cara pemanggilan politisi di Senayan itu untuk dijadikan saksi, ternyata ditolak dengan dalih soal kewenangan serta proses penyusunan APBN yang belum rampung. Ketegangan pun berlanjut. Pernah suatu ketika KPK tidak menghadiri acara pertemuan dengar pendapat dengan DPR, yang konon dianggap sebagai reaksi balik sikap Banggar.

Pertengkaran terbuka KPK dan DPR ini kian memanas, sampai-sampai muncul *statement* Fahri Hamzah mengenai pembubaran KPK. Secara subjektif KPK dituding sebagai lembaga *superbody*

yang dinilai tidak taat sistem demokrasi. Sikap politik yang dianggap kontra produktif ini melahirkan reaksi publik, yang rata-rata bernada kecaman.

Tidak terlalu sulit menjelaskan bagaimana *pressure* politik sekelas DPR ini pada KPK. Karena keberanian lembaga penyelamat uang negara ini makin mendesak para koruptor pada area jantung kekuasaan. Kementerian dan DPR sebagai lembaga strategis yang berwenang memproduksi kebijakan, makin terindikasi praktik penyalahgunaan uang APBN dengan beragam modus.

Pelibatan Banggar DPR dalam kemungkinan *mark up* rekayasa anggaran proyek Kementerian, seringkali luput dari perhatian publik. Padahal praktik persekongkolan semacam itu sudah berlangsung pada kurun waktu lama. Tidak ayal jika upaya KPK mengusut kasus suap semacam ini dipastikan akan berhadapan dengan 'orang-orang kuat' di DPR dan Kementerian.

Dalam tahun-tahun terakhir ini, sudah banyak anggota DPR dan para menteri terjerat kasus korupsi, baik yang sudah diputus pengadilan maupun masih dalam proses hukum. Namun anehnya, makin ditelisik dan diusut jejak kasus yang tergolong besar, di situ pula para pejabat malah tersangkut. Kemungkinan terseretnya para orang berkuasa di eksekutif dan legislatif pada jeratan korupsi akan semakin besar, jika KPK tetap melanjutkan membongkar gunung es mafia politik ekonomi ini. Dengan begitu sikap panik politisi menghadapi keberanian KPK ini bisa dimaklumi.

Padahal, jika politisi itu 'merasa bersih' dan tidak menjadi bagian mafia kasus korupsi seharusnya tidak perlu bereaksi berlebihan, sampai-sampai menggunakan dalil yang tidak relevan dengan anggapan KPK lembaga *superbody*. Bagaimanapun juga kewenangan DPR yang meliputi: kontrol atas eksekutif, fungsi legislasi dan penganggaran adalah kekuasaan yang begitu besar dibandingkan KPK yang hanya sebatas pengusut kasus korupsi uang negara. Bukankah KPK tidak lain adalah lembaga bentukan pemerintah dan DPR berdasarkan Undang-undang?

Dengan begitu, tidak beralasan hanya karena kondisi panik politisi kemudian berupaya membubarkan KPK. Seharusnya, politisi

DPR makin terdorong membenahi tatakelola KPK yang dianggap masih lemah agar memenuhi kriteria profesional secara hukum demi komitmen perwujudan pemerintahan dan kekuasaan yang bersih. Kesemua itu dapat dijadikan sebagai modal politik bagi pelembagaan demokrasi yang kian mapan dan kuat.

REPUBLIKA, 11 Oktober 2011

2. Politik Saling Serang

Tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia memang terasa begitu berat. Langkah hukum untuk membongkar kasus sering kali menghadapi rintangan politisasi yang dangkal. Sebaliknya, strategi politik menciptakan tatanan demokrasi dan pemerintahan yang bersih, juga tak luput dari belitan mafia hukum dan kasus yang begitu sistematik.

Kasus mafia pajak salah satu contoh nyata. Sejak ditangkapnya Gayus sang aktor 'miliarder' simpul operasional manipulasi pajak, kemudian diseretnya dia ke meja hijau, banyak kontroversi bermunculan. Dalam persidangan Gayus menyebut beberapa nama orang dalam lingkaran penegak hukum (jaksa dan kepolisian) yang dianggap bagian penyokong kerja mafia. Sekaligus, membuka sinyal keterlibatan ratusan perusahaan pengemplang pajak. Konon, di antara perusahaan itu terkait dengan para tokoh politisi. Karuan saja terus meluas, saling berkait.

Setelah divonis 7 tahun penjara, untuk perkara awal, saat keluar persidangan tiba-tiba Gayus berceloteh, meluncurkan serangan pada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dengan segala dalih. Seolah-olah ada rekayasa sepihak Satgas atas kasusnya. Anehnya, ucapan Gayus ini membuat beberapa tokoh kebakaran jenggot dan ikut-ikutan menyerang Satgas, dengan alasan yang tidak masuk akal.

Padahal kita tahu, apa yang dilakukan Gayus itu hal lumrah sebagai bentuk pembelaan dirinya karena bagian dari mafia. Tentu saja Gayus sebagai salah satu sumber masalah tidak perlu dipercaya begitu saja, karena itulah bentuk provokasi atau politisasi kasus. Hal ini juga sempat berdampak menggeser substansi kasus mafia pajak. Para politisi di Senayan (DPR) sebagian menyerang satgas atas provokasi Gayus. Bahkan muncul ancaman agar Satgas dibubarkan. Ini memang

kenyataan ironis penegakan hukum, suatu ekspresi antar pihak yang sedang menggenggam otoritas politik maupun hukum ternyata saling tidak percaya, atau memang krisis legitimasi.

Pada sisi yang berbeda, baru saja kira-kira 19 anggota DPR ditetapkan statusnya menjadi tersangka oleh KPK atas kasus penyuapan saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Kemungkinan akan masih banyak lagi di antara anggota DPR yang bakal ditetapkan sebagai tersangka. Para politisi yang ditahan itu, konon dikenal garang saat pembongkaran kasus Bank Century yang sempat menaikkan *rating* nama sang wakil rakyat di mata publik.

Dengan ditahannya anggota DPR itu, praktis meruntuhkan kepercayaannya dimata masyarakat. Sebagai lembaga pemilik mandat memperjuangkan kepentingan rakyat *toh* terjerat hukum dalam lingkaran mafia politik.

Wajar saja, pada momentum pembongkaran kasus Gayus (mafia pajak dan hukum) serta diseretnya wakil rakyat (mafia politik) itu menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Mulai dari tokoh agama, intelektual, para aktivis mahasiswa dan LSM, jurnalis, kian melancarkan protes kepada sang penguasa. Gugatan ini, tentu bukan semata dialamatkan pada SBY sebagai penguasa utama pengambil keputusan strategis, tetapi juga kepada politisi di Senayan, aparat hukum, serta para aktor bagian dari mafia hukum dan politik.

Perlu dicatat, terbongkarnya rangkaian mafia itu jelas menjadi petunjuk betapa penegakan hukum dan perjuangan demokratisasi harus siap dan mampu menghadapi segala kemungkinan hambatan apapun secara konsisten dan teguh. Disanalah peran masyarakat sipil untuk lebih aktif mengawalnya sangat penting artinya, serta punya makna strategis bagi keberhasilannya.

REPUBLIKA, 1 Februari 2011

3. Pembubaran KPK?

Pernyataan Marzuki Ali, Ketua DPR, yang mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan karena dianggap tidak efektif dalam kerja penanggulangan masalah korupsi di Indonesia telah mengundang kontroversi. Beberapa peristiwa mutakhir yang mengarah serangan pada KPK, nampaknya kian menciptakan beragam spekulasi yang bertubrukan dengan nalar dan komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Ada apa di balik fenomena ini?

Kasus ocehan Nazaruddin dan sederet masalah yang melilit KPK akhir-akhir ini, membuat para politisi di Senayan kian sinis pada KPK. Tudingan Nazaruddin bahwa pengusutan kasus penyuapan proyek Wisma Atlit yang melibatkan pentolan Partai Demokrat (PD) merupakan rekayasa oknum KPK bekerja sama dengan elit PD menjadi alasan kuat untuk segera membongkar masalah ini.

Lepas dari benar tidaknya 'nyanyian' Nazaruddin, gagalnya beberapa anggota KPK untuk maju kembali menjadi pimpinan KPK, tentu terkait atas tudingan itu. Goncangan pada KPK ini memang bertubi-tubi, rata-rata meluncur dari para pejabat politik di legislatif maupun eksekutif, adalah pihak yang selama ini menjadi sasaran prioritas kerja KPK.

Masih ingat di kepala kita saat peristiwa di mana beberapa anggota Komis III DPR RI menolak bertemu dengan Bibit dan Chandra dalam forum rapat dengar pendapat dengan KPK. Argumen politisi waktu itu, kedua orang tersebut dianggap status hukumnya belum jelas dalam rangkaian 'pertarungan cicak dan buaya' yang pernah berlalu.

Setting yang melingkupi tindakan politik tersebut adalah, para politisi dinilai 'balas dendam' terkait penetapan sekelompok anggota DPR menjadi tersangka kasus dugaan penyuapan pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Begitu pula dengan kasus lain, di mana politisi parlemen telah divonis Pengadilan Tipikor karena telah menyalahgunakan uang negara.

Tidak heran jika nyanyian pencuri sekelas Nazaruddin dengan menggunakan pendekatan 'teori konspirasi' yang belum teruji kebenaran informasi itu, pada akhirnya dipakai sebagai dasar untuk menuding KPK tidak beres. Marzuki Ali adalah politisi DPR yang berkepentingan untuk melanggengkan *status quo*, membangun konstruksi bahwa KPK sebagai ancaman. Apalagi dia punya ide *nyleneh*, agar bangsa ini melakukan rekonsiliasi dengan koruptor.

Bagaimana mungkin rekonsiliasi dilakukan pada para koruptor, sementara uang negara hari demi hari terus dimanipulasi oleh koruptor. Sepak terjang KPK begitu kencang memburu koruptor, tetapi justru koruptor difasilitasi untuk berdamai. Ini sungguh tidak masuk akal jika dikaitkan dengan penyelesaian masalah bangsa.

Rekonsiliasi seharusnya diserukan buat komponen bangsa yang kebetulan sekarang berseteru karena konflik identitas, sengketa kekuasaan, atau pertarungan politik terkait sejarah masa lalu. Rekonsiliasi, artinya memberi makna positif atas politik pemaafan demi kepentingan bangsa. Karena itulah, rekonsiliasi tidak boleh diberlakukan pada koruptor, di mana negeri ini sedang memburu mereka demi menyelamatkan uang negara.

Bagaimanapun, KPK sebagai motor pemberantasan korupsi wajib didukung eksistensi dan kerjanya, meskipun ada keterbatasan. Kita harus akui, KPK telah menginjeksi energi memperbesar harapan bagi kehidupan Indonesia ke arah yang lebih baik.

REPUBLIKA, 2 Agustus 2011

4. Nyanyian Pencuri

Fenomena yang kini hangat menjadi perbincangan publik di media massa adalah munculnya 'nyanyian' kontroversial Nazaruddin, politisi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD). Sebagai politisi yang disangka sebagai pelaku korupsi kelas kakap, dari tempat persembunyiannya melontarkan serangan pada politisi di PD. Terlepas benar-tidaknya informasi yang terlontar, goncangan itu demikian menyedot energi publik.

Seorang tersangka korupsi begitu gagah dan beraninya terus memberondongkan peluru serangan yang diekspos melalui telepon pada acara *talk show*, lalu jalur komunikasi Skype yang dimuat media massa elektronik. SBY sebagai presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina PD sempat kewalahan.

Penetapan perintah penangkapan melalui jaringan Interpol, justru membuat tersangka lantang melawan. Ironisnya, situasi ini justru membuat SBY kian kendor. Dalam pidatonya, SBY hanya 'sekadar mengimbau' agar Nazaruddin pulang ke Indonesia.

Kisah ini membuat PD merasa perlu konsolidasi, menggelar forum rapat koordinasi nasional (Rakornas), yang baru saja usai. Sayangnya, 10 keputusan yang dihasilkan Rakornas tanpa menyebut spesifik langkah strategis penanganan kasus Nazaruddin, kecuali hanya cakupan normatif menjaga irama harmoni PD.

Fenomena nyanyian Nazaruddin ketika terdesak sebagai pencuri ini persis terjadi ketika Gayus Tambunan sang pelaku mafia pajak ditangkap. Gayus tiba-tiba mengekspresikan kegusarannya dengan cara 'menggigit' ke sana-kemari, yang dituturkan dengan menggelar konferensi pers.

Upaya mengungkap jaringan korupsi melalui cara mengorek sang aktor utama, wajar jika terus melebar ke sana-kemari. Membongkar sindikat pencurian uang negara berisiko perluasan cakupan masalah. Namun perlu dicatat, jangan sampai justru nyanyian si pencuri terjebak pada hilangnya jejak pencuri itu sendiri, manakala menautkan sederet kepentingan politik yang menyandinginya.

Bagaimanapun nyanyian Nazaruddin bisa berubah-ubah, begitu pula Gayus mengalami hal yang sama. Bisa benar, bisa pula sekadar ocehan bohong. Para pemburu koruptor, termasuk publik tidak perlu larut dalam permainan dan skenario pencuri, yang kadang justru menyelinap dibalik kegaduhan.

Salah-salah, gara-gara nyanyian merdunya, pencuri malah dianggap 'pahlawan' karena berusaha membeberkan masalah yang belum dicek kebenarannya, tetapi terlanjur masuk wilayah *entertaint*. Kita tahu persis, masalah pembongkaran korupsi godaannya adalah menjadikannya masalah korupsi sebagai komoditas 'industri pergunjingan'.

REPUBLIKA, 26 Juli 2011

5. Beking Koruptor

Proses hukum dan persidangan kasus suap pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia yang tengah berlangsung sampai kini, belum juga usai. Salah satu isu yang menghebohkan, sekaligus menjadi hambatan adalah sulitnya menghadirkan Nunun Nurbaety sebagai salah satu aktor kunci untuk menguak praktik korupsi yang melibatkan banyak anggota parlemen tersebut.

Belajar dari pengalaman memburu Nazaruddin (terpidana Korupsi kelas kakap di Kemenpora) yang sempat malang melintang di berbagai negara, faktor kuncinya adalah keseriusan aparat hukum mengejar sampai di manapun melalui berbagai cara. Kita perlu menunjukkan bahwa negara dengan segala perangkatnya 'lebih hebat' dibanding aktor yang diburu. Nazaruddin yang dulu diduga memiliki jaringan elit kekuasaan yang kuat, *toh* berhasil ditangkap.

Nunun tentu juga tidak sendiri. Konon ditopang 'kekuatan besar' yang sampai sejauh ini sama-sama masih spekulasi. Fakta bahwa status Nunun adalah istri dari Adang Dorojatun, sebagai mantan Wakapolri sekaligus kini anggota DPR, barangkali dapat dijadikan bahan untuk menjelaskan kerumitan perburuan ini.

Kepolisian, KPK, dan pihak-pihak intelejen yang telah bekerjasama dengan interpol sebagai institusi yang memiliki jaringan internasional sesungguhnya dapat dijadikan modal kuat melacak rantai hubung konspirasi jalur penyelinapan Nunun. Tetapi itu belum berhasil. Justru saat ini tengah berlangsung pertarungan statemen, saling tuduh sana-sini dibanding gerak perburuan itu sendiri.

Kasus ini menunjukkan betapa negara nampak begitu rapuh dan kerdil ketika menghadapi jaringan berpola mafia. Layaknya mafia,

kemungkinan kelompok itu dipilari orang-orang berpengaruh sebagai beking yang memiliki kuasa politik dan hukum, serta kaum bisnis.

Memang tidak cukup jika perburuan Nunun hanya menumpukan peran KPK sebagai institusi yang memulai membongkar kasus ini. Karena *power* KPK juga terbatas, apalagi beban tanggung jawab menguak sindikat korupsi di Indonesia juga tidak ringan. Andai saja politisi di parlemen memiliki komitmen kuat sekaligus membantu tegaknya politik hukum agar kredibel, kasus ini dapat dimanfaatkan oleh mereka untuk berperan secara nyata.

Posisi Adang Dorojatun yang kebetulan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapat dimanfaatkan sebagai pintu pembuka, menelisik jalur rumit itu. Itulah bagian ujian bagi politisi PKS yang senantiasa mengkonstruksi diri sebagai Parpol berorientasi penegakan moralitas anti korupsi. Tetapi politik senyatanya tak semudah memadu nalar normatif dan praktik empirik. Lika-liku pertarungan antar kelompok saat operasi politik selalu dibayangi jeratan pragmatisme, gesekan kepentingan yang seringkali mengubur urusan nilai-nilai ideal.

Spekulasi urusan beking di balik para koruptor, tentu jangan mengurangi keberanian dan keseriusan untuk menegakkan keadilan demi membangun *trust* di mata publik. Meskipun saat ini masih belum jelas sampai kapan berakhir perburuan pada Nunun, tetapi negara dengan aparat yang ada di dalamnya harus memastikan dirinya lebih kuat dibandingkan mafia yang pembeking terdakwa. Di sisi lain, masyarakat tentu perlu tetap mengawal proses hukum semacam ini secara kritis dan solid, sekaligus menjadi pilar bagi upaya penegakan politik hukum dalam koridor demokrasi.

REPUBLIKA, 29 November 2011

6. Surat Koruptor

Sejak ditangkapnya sang koruptor kelas kakap, Nazaruddin, oleh KPK dan menjalani proses hukum, berbagai spekulasi dan manuver bermunculan. Akankah Nazaruddin berani 'buka-bukaan' atas informasi sesungguhnya terkait kasus yang dialami dan dituduhkannya? Mungkinkah Nazaruddin berubah menjadi bungkam menyembunyikan fakta korupsi yang konon melibatkan para petinggi politik? Atau jangan-jangan nyanyian Nazaruddin dari tempat persembunyian adalah pepesan kosong?

Beberapa pertanyaan terus bermunculan, baik bernada optimistis maupun pesimis. Upaya membongkar 'gunung es korupsi' di Indonesia ini memang tidak mudah. Yang unik dalam kasus ini adalah munculnya sepucuk surat politik yang dibuat Nazaruddin ditujukan kepada Presiden SBY. Dalam suratnya, secara eksplisit Nazaruddin memohon kepada SBY agar keluarganya (anak dan istrinya) dilindungi dari segala ancaman apapun. Konsesi dia tidak akan membongkar pelibatan pihak-pihak yang dapat merusak citra Partai Demokrat (PD) serta KPK demi kelangsungan bangsa.

Surat tersebut mengindikasi beberapa hal. Pertama, kekhawatiran Nazaruddin adanya tekanan yang menimpa keluarganya, dan dengan demikian SBY diminta melindungi. Kedua, kemungkinan pelibatan para aktor strategis, khususnya politisi yang berdampak pada eksistensi PD serta KPK. Dalam waktu tidak terlalu lama, SBY akhirnya menjawab surat itu. Intinya Nazaruddin diminta mengikuti proses hukum dengan cara kooperatif, membuka secara transparan dan menjelaskan duduk masalah hukum di depan KPK sehingga peradilan yang akan menentukan semuanya.

Dalam setiap kasus hukum, yang melibatkan siapapun, SBY menegaskan tidak pernah, tidak akan —dan memang tidak boleh— mencampuri proses hukum yang harus independen, bebas dari intervensi siapapun. Sementara terkait ketenangan keluarganya, SBY memerintahkan agar aparat penegak hukum bekerja profesional, menjamin keselamatan semua pihak yang terkait, bahkan seluruh warga negara. Meskipun, itu bukan berarti juga perlindungan atau kekebalan dari proses hukum jika warga negara yang bersangkutan terjerat suatu perkara.

Surat SBY sudah dipastikan mengarah pada substansi yang sifatnya normatif, sesuatu yang wajar. Dengan cara demikian, publik juga akan mencatat pernyataan SBY itu dapat dijadikan rujukan mengenai netralitas posisinya. Betapapun kasus ini menyangkut ancaman eksistensi PD, institusi politik di mana SBY sebagai ketua Dewan Pembina, mau tidak mau SBY sebagai Presiden tidak boleh memanipulasi integritas diri secara pragmatis.

Di zaman serba transparan semacam ini, monitor media massa begitu mudah mengungkap isu yang tidak bisa ditutupi, meskipun itu menyangkut posisi penguasa. Inilah risiko politik yang serba liberal warna citra yang begitu kental, berkonsekuensi pertaruhan *image*. Surat Nazaruddin dan balasan Presiden SBY hanyalah bagian episode upaya pemberantasan korupsi, yang memilik arti bahwa publik harus mengetahui beragam peluang kebocoran dan manipulasi penegakan hukum pemberantasan korupsi. Karena itu konsistensi KPK dan kontrol masyarakat sangat dibutuhkan, agar energi yang sudah terserap mengawal kontroversi kasus Nazaruddin ini benar-benar bermakna untuk perbaikan.

REPUBLIKA, 23 Agustus 2011

7. Krisis Pengadilan Tipikor

Dalam pekan terakhir ini, terus bermunculan kontroversi usulan pembubaran pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) di daerah. Ide yang dilontarkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD ini mendapat reaksi dari berbagai pihak. Kita bisa telaah secara kritis, agar mendapat makna dibalik kontroversi ini.

Bisa jadi ide Mahfud ini muncul sebagai ekspresi kejengkelan atas peristiwa Selasa 11 Oktober 2011, di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung memutus bebas terdakwa Walikota Bekasi nonaktif, Mochtar Mohammad. Konon, hal itu adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah peradilan Tipikor di Indonesia, terdakwa korupsi diputus bebas murni. Keputusan ini dirasa mencurigakan dan dinilai perlu ditelusuri (*republika.co.id*, 12/10/2011). Mochtar sebelumnya divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 300 juta atas empat perkara korupsi yang dituduhkan atasnya.

Kemudian rentetan vonis pada kasus-kasus korupsi tiba-tiba bermunculan di berbagai daerah. Bupati nonaktif Lampung Timur, Satono korupsi dana kas APBD Lampung Timur senilai Rp 119 miliar, divonis bebas Senin (17/10/2011) oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Hanya selisih dua hari, Rabu (19/10/2011), giliran mantan Bupati Lampung Tengah, Andi Ahmad Sampurna Jaya, yang divonis bebas.

Berikutnya pada Selasa (25/10/2011), Bupati nonaktif Kepulauan Aru, Thedy Tengko terdakwa dalam dugaan korupsi penggunaan dana APBD Kepulauan Aru tahun 2006 senilai Rp 42,5 miliar, divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Ambon. Terakhir, Pengadilan Tipikor Samarinda memutus bebas beberapa terdakwa kasus korupsi dana

operasional anggota DPRD Kutai tahun 2005 yang merugikan negara sebesar Rp 2,9 miliar. (*Vivanews.com,* 7/11/2011).

Mencermati sekilah data itu, wajar saja jika posisi dan peran pengadilan Tipikor daerah tengah menjadi sorotan masyarakat karena maraknya vonis bebas terhadap koruptor yang dikeluarkan majelis hakim di sana. Kita bisa rujuk misalnya hasil rekam jejak yang dihimpun *Indonesia Corruption Watch* (ICW), paling tidak sebanyak 40 terdakwa kasus korupsi divonis bebas di pengadilan Tipikor daerah. Pada 40 vonis bebas itu terdiri dari empat vonis bebas di Bandung, satu di Semarang, 14 Samarinda, dan 21 Surabaya. (*kompas.com,* 9/11/2011).

Pembaharuan peradilan di Indonesia memang masih lamban. Khususnya terkait soal korupsi, di mana Indonesia dalam situasi yang parah. Peran komisi pemberantasan korupsi (KPK) sebagai motor utama ternyata belum berbanding lurus dengan akselerasi kualitas dan komitmen peran lembaga peradilan mengawal jalannya upaya perwujudan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi. Kehadiran pengadilan Tipikor daerah seharusnya bisa menjadi kekuatan baru, mengatasi perkara korupsi secara hukum dengan lebih cepat di daerah.

Sejumlah ironi putusan bebas sebagaimana digambarkan di atas, barangkali tidak harus disimpulkan dengan langkah pembubaran pengadilan Tipikor daerah. Namun dapat dijadikan alasan kuat mengoreksi dan mengevaluasi menyeluruh sistem dan kualitas komitmen para penegak hukum serta kontrol jalannya peradilan tersebut.

Bagaimanapun juga, masalah korupsi di tingkat pusat maupun daerah hingga kini masih marak, dan sebagian besar belum tersentuh secara hukum. Padahal lembaga peradilan konvensional di daerah kurang berarti perannya menyusuri belitan korupsi yang merajalela.

Apa yang disampaikan Mahfud MD tentu punya makna penting, setidaknya peringatan banyak pihak agar memperhatikan dan mengawasi kinerja pengadilan Tipikor daerah. Kehadirannya jangan sampai kontra produktif bagi upaya penegakan hukum, sebaliknya diharapkan mampu menjadi pilar strategis akselerasi memerangi korupsi.

REPUBLIKA, 15 November 2011

8. Politik Kian Rapuh

Perubahan politik, di sejumlah kasus mengalami kejenuhan. Potret politik tersaji penuh buram, paling tidak itu yang bermunculan di berbagai media massa. Perselisihan antar aktor di Parpol, yang kadang terlontar kata-kata kotor tak beraturan, menjadi tontonan hampir tiap tayangan berita dan *talk show* di televisi. Koran dan media elektronik juga getol menyuguhkan menu masalah politik dengan judul begitu bombastis.

Pada sejumlah diskusi pun, bertubi-tubi keluhan, umpatan, keresahan, bahkan pesimisme menyikapi suasana politik yang berlangsung. Sumpah serapah cacian, bahkan menjadi bahan olok-olokan. Politik begitu memaklumkan beragam bentuk pengingkaran nilai moralitas. Tak ayal, jika politik diidentikkan manipulasi, atau tipu-tipu. Seseorang pernah bilang bergaya sinis saat berkomentar atas kisah-kisah konyol dalam relasi kekuasaan, 'namanya juga politik'.

Beginikah politik sesungguhnya? Memang kita tidak sedang menghakimi keadaan. Tetapi, paling tidak merasakan ada kesalahan terjadi atas realitas. Secara kritis kita mencoba menafsir gejala kekuasaan, mulai dari ukuran kecil di komunitas masyarakat sampai dengan negara. Pada level lokal, nasional, sampai global. Di situ pula berharap menemukan jalan positif membenahi negeri ini.

Sejatinya politik di dalamnya terkandung nilai. Yakni seni meraih, mendistribusi, dan mengontrol kekuasaan sesuai konteksnya. Sebagai seni berkuasa, nilai-nilai dasar itu terekspresikan berupa kemampuan saling mempengaruhi melalui diplomasi, partisipasi dan mengorganisir diri demi pencapaian tujuan dan kepentingan tertentu.

Dengan demikian, mempraktikkan politik dalam sistem demokrasi, berarti menjalani kekuasaan berlandaskan humanisme, dialogis,

penghargaan perbedaan, kebebasan, partisipatif, dan keseimbagan dalam *power*. Begitu pemaduan politik demokrasi, di situ pula ekspresi peradaban manusia berproses.

Sayangnya, politik kenyataannya terjebak sebagai tindakan 'sekadar berkuasa', menempuh dan membenarkan beragam cara. Sekali pun cara itu bertentangan dengan moralitas yang diyakini dirinya. Mulai tindakan manipulasi dukungan dengan uang sogokan, korupsi mandat saat mengoperasikan otoritas, pemalsuan diri bergaya pencitraan, sampai-sampai berpolitik cara royal yang abai atas realitas nasib warganya.

Begitu pula soal demokrasi, yang hanya berhenti sebagai praktik prosedural meraih kuasa. Menggunakan peraturan perundangan berbalutan otoritas. Mengklaim atas nama rakyat, padahal tindakannya menciderai rakyat sebagai pemilih yang seharusnya diwakili. Demokrasi akhirnya tersandera oleh kelakuan oligarkis elit politik dan ekonomi. Pada saat mengambil keputusan strategis, justru melupakan aspirasi konstituen. Demokrasi dikubur oleh elit 'demokrasi' itu sendiri.

Politik telanjur rapuh, tidak mampu membangkitkan energi baru demi membangun demokrasi yang kuat dan kokoh. Politik telanjur identik pemalsuan, gagal menghadirkan otentisitas kuasa yang bermakna. Mulai dari pemalsuan 'surat' sampai pemalsuan 'mandat'. Politik telanjur terjebak kedalam lumpur halusinatif bernama 'pencitraan'. Politik, dengan demikian makin membuka rongga-rongga kebangkrutan.

Inilah masalah yang harus segera disadari negeri ini dalam meniti arus berliku perubahan. Bagaimana mengembalikan politik pada jalurnya, yakni mampu mempraktikkan seni berkuasa dengan cara yang benar dan bermartabat, agar demokratisasi Indonesia kian bermakna.

REPUBLIKA, 19 Juli 2011

BAGIAN IV

Belitan Korupsi Parpol

1. Korupsi Parpol

Risah skandal korupsi yang melibatkan politisi parpol, dalam rentang tiga tahun belakangan ini begitu marak. Para pengurus elit dan parpol tersandung sangkaan korupsi, baik yang masih dalam tahap awal penyidikan sampai dengan putusan akhir pengadilan. Ukurannya pun tidak main-main.

Dari ratusan juta sampai dengar ratusan miliar di tingkat pusat sampai daerah, dengan ragam pola korupsi menyedot APBN, APBD, sampai urusan permainan tender proyek yang menyalahi prosedur. Kali ini publik sedang memperhatikan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani peristiwa penyuapan di Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora), yang diduga berkait dengan bendahara Partai Demokrat, Nazaruddin, yang saat ini telah dipecat dari kepengurusan DPP.

Hampir semua parpol, mulai dari Partai Demokrat, PDIP, Golkar, PAN, PKB, PKS, PPP, dan parpol-parpol menengah dan kecil lainnya tersebar di nasional dan daerah, kadernya tersangkut masalah penyalahgunaan kekuasaan, mengkorupsi uang negara.

Sungguh tragis dan ironis. Gencarnya perburuan oleh KPK pada para politisi yang menduduki posisi anggota DPR dan DPRD, kementerian dan birokrasi di bawahnya, sampai dengan pejabat di tingkat daerah, belum efektif menghentikan gurita politisi menyedot uang negara secara ilegal.

Ibarat menyaksikan 'gunung es', seolah hanya sedikit saja kasus dan pelakunya, tetapi realitas korupsi yang tidak tampak dan di bawah permukaan begitu banyak, satu sama lainnya saling berkait. Yang mencengangkan adalah, rentetan korupsi oleh politisi telah membentuk mafia, menyeret para aparat hukum seperti kepolisian, kejaksanaan, dan hakim.

Jika dikaitkan dengan pola kerja parpol secara umum dalam meraih kekuasaan yang makin 'liar dan membabi buta', kebutuhan uang demi menopang usaha persaingan di antara mereka, bisa menjadi faktor yang menjelaskan mengapa kelakuan politisi itu begitu mudahnya menabrak aturan.

Politik bagi sebagian para pelaku korupsi hanyalah tindakan pragmatis, membenarkan segala cara tanpa memperhatikan moralitas sebagai dasar mencapai kuasa. Penyimpangan aturan karena nafsu mengalahkan yang lain saat pertarungan politik dianggap hal biasa. Sistem internal parpol dan konstruksi yang berlaku di lingkungan pergaulan politisi, pada umumnya mengkondisikan 'permakluman manipulasi', bercorak 'tahu-sama tahu' dalam persaingan.

Seorang bendahara umum parpol misalnya, lepas dari modus korupsi itu rekayasa karena telah menjadi keputusan lembaga ataukah tindakan personal semata, terlalu sering terlibat '*ngakali* keuangan'. Kebutuhan dana demi membiayai kegiatan parpol maupun di kantong pribadi sulit dipilah-pilah. Parpol begitu rendah derajat akuntabilitas administrasi keuangannya.

Lingkaran setan korupsi struktur kekuasaan menjadi masalah serius yang harus ditangani. Antara perilaku korupsi politisi di parpol, biaya pemilu yang mahal, lemahnya kontrol atas kekuasaan, budaya pragmatis saat pergantian kekuasaan, serta pudarnya ideologi dan idealisme sistem politik Indonesia hendaknya segera dipotong.

REPUBLIKA, 31 Mei 2011

2. Bersih-bersih Parpol

Dalam suatu pidatonya, Jumat (15/6/2012), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebutkan bahwa Partai Demokrat (PD) memang menghadapi masalah korupsi yang harus segera diatasi. Agar kredibilitas politiknya pulih, maka para koruptor itu harus keluar dari Parpol.

SBY juga meyakini berdasarkan data-data yang disampaikannya, Parpol-parpol lain dinilai tidak kalah korupnya dari PD. Suatu sindiran yang dialamatkan terutama pada Parpol-parpol besar yang selama ini dirasa memanfaatkan menguatnya fenomena korupsi PD sebagai bagian bahan kritik tajam sesama kompetitor.

Pernyataan SBY itu tidak lain menjadi bagian upaya membela diri, sebagai reaksi atas serangan bertubi-tubi yang dialami PD sejak terungkapnya banyak kasus korupsi yang melibatkan Nazaruddin kala masih menjadi Bendahara Umum PD, baik dari sesama anggota Setgab maupun oposisi.

Sebagaimana diketahui, kasus-kasus korupsi yang menyeret Parpol dan politisi memang kian memprihatinkan, dan dialami hampir semua Parpol besar dan menengah. Lembaga politik yang dianggap bagian pilar demokrasi mengalami krisis legitimasi, karena para politisinya tersandung penyalahgunaan kekuasaan dengan merugikan uang negara. Inilah bagian dari momentum bagi Parpol untuk segera introspeksi diri.

Parpol lain yang merasa menjadi bagian dari tuduhan tersebut, meskipun sempat 'kebakaran jenggot', perlu merespons sindiran SBY itu dengan cara saling berbenah dan memperbaiki diri, dan tidak perlu defensif. Sinyal merah bagi Parpol yang ada sekarang, sudah saatnya

menunjukkan komitmennya memperbaiki institusi dan kadernya, terutama perilaku politisinya di berbagai lini.

Belitan korupsi yang dialami parpol makin meresahkan dan menurunkan kredibilitasnya di mata rakyat. Pembenahan atas kualitas berpolitik bisa menjadi cara mengembalikan kredibilitas. Selain itu, SBY dituntut pula konsistensinya untuk bersikap tegas sesuai komitmennya, agar PD serius membersihkan diri dari para koruptor. Jangan kesemua itu tidak lebih sebagai 'pantun' yang ditanggapi sinisme Parpol lain dengan 'berbalas pantun'.

Jika SBY dengan PD tidak konsisten, terlalu mudah untuk dikonstruksikan sebagai pencitraan berpola lama, yang terjebak sebagai demagog. Bergaungnya pidato-pidato di berbagai momen terkait pemberantasan korupsi kadang terlihat ironis, antara seruan dan kenyataan masih senjang. Posisi SBY sebagai Presiden serta Ketua Dewan Pembina PD jelas memiliki tanggung jawab lebih besar dalam pemberantasan korupsi.

Sikap saling kritik antarparpol, atau sesama politisi untuk saling membongkar kasus-kasus korupsi yang dialaminya perlu terus-menerus dilakukan, sekaligus disebarluaskan di lingkungan masyarakat sipil. Dalam skema yang sederhana, bagaimana menjadikan problem korupsi sebagai 'musuh bersama' yang harus diperangi. Dengan begitu, energi publik akan dikonsolidasikan untuk upaya akselerasi pembentukan pemerintahan yang bersih *(good governance)*, bertumpu pada partisipasi aktif masyarakat.

Penguatan kesadaran kolektif dengan strategi gerakan sosial, pengawasan struktural, serta pendekatan kultural melawan korupsi di lingkungan Parpol, lembaga representasi (parlemen), area eksekutif dan yudikatif perlu menjadi prioritas. Agar demokratisasi benar-benar mampu menjawab problem bangsa secara lebih bermakna.

REPUBLIKA, 19 Juni 2012

3. Ketegangan DPR dan KPK

Ditahannya 23 anggota DPR oleh KPK karena diduga terlibat penyuapan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGBI), telah melahirkan reaksi keras para wakil rakyat. Saat rapat konsultasi komisi 3 dengan KPK menindaklanjutki pengusutan kasus Bank Century, beberapa politisi menolak kehadiran Bibit-Chandra. Kedua pimpinan KPK ini dianggapnya tidak layak secara formal mengikuti pertemuan itu, mengingat status hukumnya masih bermasalah, meskipun oleh kejaksanaan dinyatakan *deponeering*.

Tindakan anggota DPR ini tentu dinilai kontra produktif, jika dikaitkan rangkaian perjalanan perdebatan posisi Bibit-Chandra. Saat terbongkarnya persekongkolan penyuapan bertajuk 'cicak dan buaya', yang telah menyeret Anggodo sang operator dalam kursi persidangan, kasus itu kian meluas.

Susno Duadji menjadi pintu pembuka pembongkaran mafia juga telah menjalani proses penyidikan internal kepolisian, bahkan 3 nama Jenderal Polisi telah diseret ke pengadilan. Saat itu DPR berteriak lantang agar kasus itu dibongkar, harapannya menjadi babak pembenahan hukum melalui strategi politik. Politisi DPR memanfaatkan dukungan masyarakat sipil agar KPK diselamatkan, karenanya bersepakat menolak upaya konspiratif kriminalisasi KPK khususnya kasus Bibit-Chandra.

Nah, ketika KPK berproses sesuai koridor pemberantasan korupsi, sampai akhirnya mengungkap penyuapan kasus pemilihan DGBI, tiba-tiba reaksi balik muncul dari DPR yang mempermasalahkan status Bibit-Chandra. Inilah ujian konsistensi dan komitmen politisi itu, sekaligus menjadi petunjuk kepada masyarakat bahwa pertarungan hukum dan politik dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia tidak mudah.

Proses tersebut memang unik dan saling bertubrukan. Penegakan hukum yang prosedural atau legal formal, atas dugaan kriminalisasi KPK berhasil diintervensi secara politik. Sementara, ketika pendekatan politik dengan pertimbangan sosiologis atas kasus Bibit-Chandra berhasil berwujud *depoonering* oleh kejaksaan, tiba-tiba saja DPR sebagai lembaga politik berupaya mengembalikan pendekatan prosedural legal-formal dengan mempermasalahkan status Bibit-Chandra.

Melihat ketegangan semacam ini, kunci masalahnya terletak pada kian merosotnya kepercayaan publik pada lembaga hukum dan politik. Dilema yang dihadapi adalah, jikalau sekadar mengandalkan pendekatan hukum prosedural ternyata selalu gagal karena memang hukum (konteks, isi, aparat dan kultur) belum dirombak atau dibenahi dalam skema reformasi.

Sebaliknya, jika tumpuannya pada pendekatan politik atas penegakan hukum cenderung masuk jebakan konspirasi karena bekerjanya kuasa politik dan ekonomi yang masih menggurita di negeri ini. Masalah semacam ini kemungkinan akan terus berulang kembali, sebagai sejarah buruk penegakan hukum dan politik di era reformasi.

Oleh karena itu, dalam jangka panjang diperlukan *grand design* yang berisi agenda penegakan hukum dengan nalar publik yang lebih sistematis, terarah dan mendasar. Pada sisi yang berbeda, sistem politik sebagaimana mandat reformasi harus segera dirombak, baik pada aras struktur, agen dan kultur dalam kekuasaan.

Mulai dari reformasi parpol, sistem rekrutmen politik, sampai bangunan pemerintahan yang kredibel di semua lini dan sektor. Agenda itu perlu dikawal oleh masyarakat sipil, terutama kelompok menengah yang menjadi pelopor reformasi, agar perubahan yang berlangsung ke depan tetap dalam rel dan jalur yang benar.

REPUBLIKA, 8 Februari 2011

4. Politik Dua Kaki

Gejala politik dua kaki makin diperlihatkan para politisi dalam meniti proses perebutan kekuasaan. Sejumlah politisi sering berpindah Parpol, 'membelot' sana-sini karena berbagai sebab. Ada pula yang lagi *ngetrend* masuk dalam Ormas bergaya Parpol tetapi masih juga menjadi jajaran pengurus Parpol yang berbeda haluan.

Ada pula, seorang birokrat yang seharusnya 'netral' tidak boleh menjadi partisan Parpol, tetapi secara diam-diam menjadi bagian mesin pendukung Parpol tertentu. Entah itu untuk membuka akses dan pemanfaatan posisi, menyuplai energi dengan mencarikan proyek, bahkan sampai bersiasat sempit yang mengarah *abuse of power*.

Perilaku semacam ini gampang dipahami dalam situasi politik yang diwarnai spekulasi dan gelombang pragmatisme yang terus meningkat. Menginjakkan kaki di dua tempat sekaligus agar dapat kesempatan memenangkan Pemilu. Itulah strategi licik perilaku serakah mengais kuasa. Pemilu akhirnya kehilangan makna, bukan lagi sebagai praktik etika meraih kekuasaan, tetapi hanya sebatas medan tempur menggunakan ketrampilan mendapatkan jabatan.

Padahal, Pemilu itu merupakan ukuran elementer bagaimana kekuasaan bisa dibentuk dan dibangun dengan fondasi nilai demokrasi. Meskipun biaya Pemilu begitu mahal, tetapi jika hanya dijalankan dengan akal licik manipulatif, maka hasilnya tentu murahan.

Fenomena itu mempengaruhi kian menipisnya harapan demokrasi Indonesia. Kita bisa ilustrasikan beberapa hal. Misalnya, soal Pemilu lima atau enam tahun lalu, rasa prihatin dan resah atas dinamika politik sudah mengemuka.

Munculnya beragam bentuk *money politic*, manipulasi atau kecurangan kampanye, jual beli suara, konflik dan kekerasan, dan se-

terusnya. Tetapi, *toh* tidak diatasi dengan baik. Bahkan, perilaku dengan modus hampir mirip kembali berulang pada Pemilu berikutnya, tanpa ada perbaikan berarti.

Di zaman sekarang, masalah substansi berdemokrasi tidak menjadi bagian prioritas. Sejumlah pihak nyaris mencibir jika bicara soal ideologi politik. Ideologi konon dianggap tidak laku lagi. Pembicaraan di lingkungan politisi Parpol umumnya, Pemilu dipersempit pada sekadar arena-arena pragmatis memperoleh kekuasaan melalui berbagai cara. Terlepas cara itu mengabaikan aturan hukum ataukah tata krama berpolitik.

Dalam hal kapasitas seseorang berdemokrasi, kita bisa pilah secara sederhana menjadi tiga, yakni pengetahuan, ketrampilan dan etika. Selama ini, para politisi, bahkan yang menyebut dirinya sebagai tokoh sekalipun, rata-rata mereka hanya memperhatikan soal pengetahuan dan ketrampilan berdemokrasi semata. Tetapi, urusan etika (nilai-nilai panduan berkuasa) tidak diperhatikan. Kemewahan berdemokrasi tanpa dibarengi etika kekuasaan, demokrasi menjadi tidak bermakna.

Dapat disimpulkan, bahwa ulah politisi yang menggunakan siasat politik dua kaki untuk memenangkan Pemilu yang dilandasi hasrat licik meraih untung melalui berbagai cara, tentu dapat disebut sebagai tindakan penggerogotan demokrasi. Bagaimanapun juga politik adalah pilihan yang bertanggung jawab dengan segala risiko yang melekat. Sudah saatnya kita segera menghentikan pola-pola licik meraih kuasa dengan segala cara tanpa mengindahkan etika, agar demokrasi dapat diperbaiki sehingga berkualitas.

REPUBLIKA, 25 Januari 2011

5. Koalisi Politik

Kelangsungan koalisi politik penopang pemerintahan SBY tengah mengalami goncangan. Komposisi pendukung pemerintahan SBY yang terdiri dari PD, PAN, PPP, PKB, Golkar dan PKS beberapa kali menunjukkan sikap tidak solid. Semenjak voting usulan hak angket pembentukan Pansus Mafia Pajak, yang akhirnya dimenangkan kubu penolak, kontroversi terus berlanjut.

Pada sidang Pleno DPR pengambilan keputusan, Golkar dan PKS secara terang-terangan berseberangan sikap dengan anggota koalisi yakni PD, PPP, PKB, PAN. Buntut dari peristiwa itu, kian menguatlah sikap PD yang mendesak agar SBY meninjau ulang koalisi, yang intinya mengeluarkan PKS dan Golkar dari koalisi karena dianggap telah beberapa kali mengkhianati kesepakatan.

SBY akhirnya memberi sinyal kuning. Dalam pidatonya merespons kontroversi koalisi ini, SBY akan mengevaluasi komposisi gabungan Parpol pendukung pemerintahan berdasarkan kesepakatan awal. Secara implisit SBY menegur PKS dan Golkar. Intinya, jika memang tidak lagi sejalan dengan garis koalisi maka para pembangkang itu dipersilakan keluar. Disanalah beragam spekulasi bermunculan. Semenjak muncul penyataan resmi SBY itu, nampak jelas bahwa manuver politisi PKS dan Golkar kian menyusut, jauh berbeda dengan sebelumnya di mana PKS dan Golkar begitu garang dan lincah bermanuver. Itulah fase negosiasi dan tawar-menawar.

Keberanian sikap SBY yang berencana menendang sebagian anggota koalisi ini tentu karena ada beberapa alasan. Munculnya beragam manuver Golkar dan PKS pada episode kedua kekuasaan SBY awal-awal terbentuk dulu, telah membuat PD sebagai kekuatan utama pemerintahan makin gerah. Politisi Golkar dan PKS di Senayan,

dianggap tidak dapat dikendalikan lagi dengan implikasi pada stabilitas internal koalisi. Wajar jika banyak penilaian, koalisi ini kian rapuh, karena tidak bisa dibedakan antara anggota koalisi dengan oposisi.

Manuver dan serangan PKS dan Golkar, dinilai PD condong mempersulit posisi pemerintahan SBY. Namun, karena kalkulasi kekuataan parlemen PD masih membutuhkan mereka, maka sikapnya selalu terbatasi. Muncullah model moderasi dan politik permakluman. Selama belum ada kekuatan baru yang dikonversi ke dalam pasukan koalisi, maka daya tekan PD pada PKS dan Golkar masih tentu melemah. Begitu sikap Gerindra (yang selama ini berperan sebagai bagian 'oposisi') merapat menjadi bagian koalisi dalam kasus penentuan sikap kasus Pansus Mafia Pajak, hal ini mengubah konfigurasi politik.

Masuknya Gerinda dalam blok koalisi berkonsekuensi menguatnya niat PD untuk menendang PKS dan Golkar dari koalisi. Apalagi, PDIP (faksi Taufik Kiemas) juga memberikan sinyal mendukung tawaran SBY agar memasukkan kader PDIP dalam komposisi kabinet. Politik negosiasi dan perang urat belum selesai, yang kemungkinan melahirkan manuver-manuver baru.

Mengenai kerenggangan koalisi, sejak semula gejala semacam ini berpeluang terjadi mengingat gerbong ini dirancang bukan karena alasan ideologis, tetapi hanya semata orientasi pragmatis yakni bagi-bagi jabatan menteri. PKS, Golkar, PAN, PKB, PPP menjadi bagian koalisi dalam mendukung pemerintahan SBY yang dimotori PD bukan karena agenda dan platform yang menemukan dirinya bersatu dalam sekubu.

Diakui atau tidak, kepentingan mendapat kue kekuasaan berupa jabatan menteri menjadi alasan utama. Begitupun kelompok oposisi seperti PDIP, Gerindra, dan Hanura saat itu mengambil pilihan di luar ring kekuasaan bukan terkait substansi agenda perjuangan pada garis parpol, tetapi karena akomodasi yang tak sepenuhnya tercapai. Lingkungan pragmatis, beragam manuver politisi yang kadang sulit ditebak, serta fragmentasi kepentingan yang kompleks menjadikan dinamika politik tidak menentu.

Dapat disimpulkan, bahwa koalisi atau oposisi sebenarnya hanyalah soal kursi di kabinet. Selama proses transaksional berpolitik masih cukup dominan, pola pragmatisme dijadikan pilar penggerak atau

motif kekuasaan, maka demokrasi ini terus disandera oleh nafsu elit politik oligarki. Pertanyaannya, mampukah kita memastikan agar, baik yang bagian koalisi maupun oposisi bergerak pada lintasan mandat rakyat mewujudkan demokrasi yang menyejahterakan?

REPUBLIKA, 8 Maret 2011

6. Ormas Berpolitik

Soal posisi organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam urusan politik praktis, hingga kini masih belum jelas. Meskipun sudah sering menjadi topik pembicaraan pada tiap kongres, muktamar, maupun pemilu, toh kebimbangan masih saja menyelimuti mereka. Terutama umat atau konstituen.

Hampir semua pihak menyerukan, biasanya tertuang dalam konsensus formal, bahwa secara organisasi tidak diperkenankan terlibat dukung-mendukung untuk urusan posisi berkuasa. Tetapi, benarkah dalam praktiknya tidak terlibat berpolitik praktis? Bagaimana pula nasib anggotanya jika mereka bertanya, siapa yang harus didukung dalam kontestasi politik? Ini memang tidak mudah dijawab.

Gambaran paling nyata, misalnya organisasi besar (dengan landasan agama) seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), KWI, PGI, Walubi, dan organisasi-organisasi lainnya, sampai kini selalu diliputi perdebatan soal itu ketika harus dihadapkan kenyataan perebutan kuasa dalam kontestasi elektoral di zaman demokrasi. Secara historik, ormas tersebut lahir lebih dulu dibandingkan organisasi politik seperti parpol.

Karena itu, lingkup dan daya jangkau ormas tentu saja lebih luas, dibandingkan batas-batas parpol yang sifatnya parokial. Mandat ormas juga berbeda, tak semata berorientasi pada perebutan kuasa politik, namun lebih pada pesan normatif, simbolik dan moralitas keumatan. Nilai-nilai tersebut, lalu terejawantahkan berbentuk kegiatan sosial, ekonomi, dakwah agama, pendidikan, kesehatan, dan sejenisnya.

Apa yang bisa memastikan bahwa pesan moralitas keumatan tersebut dapat diwujudkan? Secara normatif, tumpuannya adalah AD/ART, konvensi dan tata-krama organisasi, selain ditopang oleh daya komitmen yang melekat didalam diri pengurus dan anggotanya.

Kekuasan selalu menggoda. Itu kira-kira yang seringkali mempersulit artikulasi batasan normatif dalam kenyataan empirik.

Ada sejumlah kecenderungan, elit-elit ormas tidak semua mampu berkomitmen menapaki jalur normatif itu, saat harus masuk dalam pusaran perebutan kuasa politik. Pada sejumlah kasus, tak bisa dipungkiri, bahwa para elit ormas banyak memanfaatkan posisi strategisnya di ormas, untuk daya mobilisasi suara terutama berurusan dengan kepentingan dukung mendukung. Jika muncul fenomena itu, tanggapan formalnya pasti bisa ditebak: ormas 'netral' dan tidak terlibat dukung-mendukung.

Tapi kenyataannya, jika di lapis atas mencitrakan 'netral', ternyata di bawah pada gerilya dengan mengkomodifikasi ikatan ormas untuk urusan politik. Benarkah, ada ormas netral? Sebenarnya tidak ada. Pada umumnya mereka pasti berpihak. Nah, soal pemihakan ini pada apa, dan siapa? Lalu, bagaimana cara artikulasi dukungannya, bisa bermacam-macam. Ada yang terang-terangan, lalu ada pula yang disamarkan. Ada model kasar, tapi ada pula yang cerdas.

Pesan-pesan itu disampaikan sekadar menyampaikan hasrat memperoleh dukungan, ataukah dengan pesan simbolik mencerdaskan. Faktanya, ormas tidak mungkin steril dari pertarungan kepentingan. Hanya, kita memang harus mendiskusikan bagaimana pertarungan kepentingan itu punya makna positif, dan memiliki kandungan pesan nilai dan etika, serta moralitas sesuai mandat ormas itu sendiri.

Karena politik terkadung dikonstruksikan 'buruk dan tidak bermoral', maka semestinya posisi ormas dalam berpolitik harus menebarkan pesan-pesan moralitas, kesantunan, serta perjuangan nilai dalam realitas perebutan kekuasaan. Jangan sampai sebaliknya, ormas dirusak oleh nilai-nilai yang kotor dalam arena perebutan kuasa yang membenarkan segala cara.

Pada akhirnya, tidak mungkin ormas menghindari dari tuntutan anggota atau konstituen untuk memberi petunjuk dan penerang ke arah mana mereka berjalan dan memandang, mengarungi arena politik dan demokratisasi. Disinilah butuh keteladanan dan komitmen pengurus ormas disatu sisi, dan kecerdasan anggota atau masyarakat disisi lain. Ormas harus berpolitik dengan cara yang benar, agar peran mereka bermakna bagi bangunan demokrasi.

REPUBLIKA, 4 Mei 2010

BAGIAN V

Kabinet dan Politisasi Birokrasi

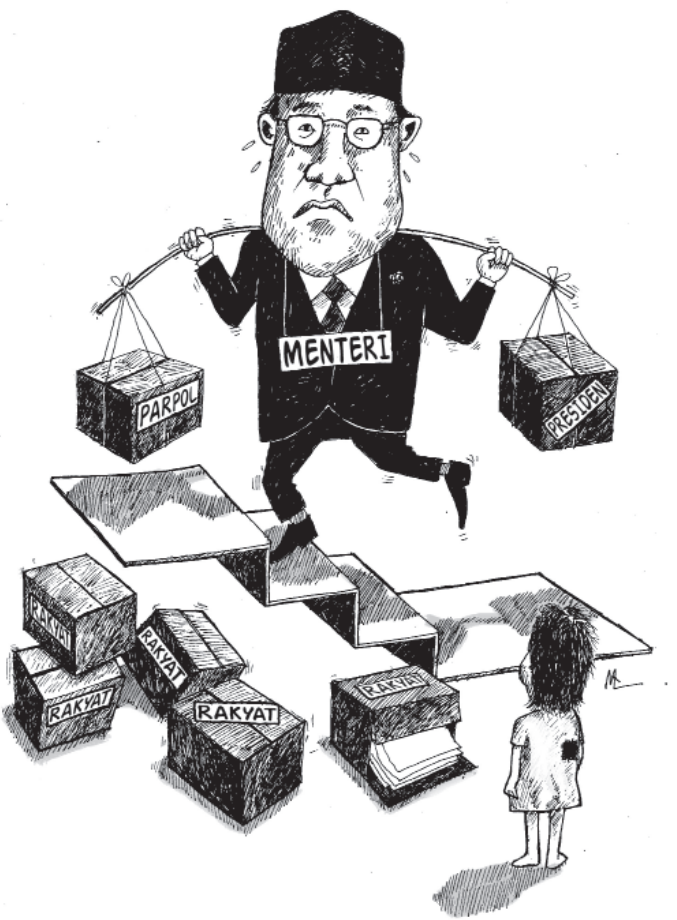

1. Kabinet Comotan

Makin kuat ditarik simpulan, bahwa gaya politik Presiden SBY memang 'citra dan neo korporatik.' Isu paling mutakhir soal perombakan menteri. Dalam satu bulan terakhir ini, politik nasional sedang dipenuhi berita 'sinema *reshuffle*' yang tak ubahnya audisi, persis dua tahun lalu saat penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) untuk periode kedua.

Reshuffle, atau pergantian jabatan politik kementerian sebenarnya hal biasa. Namun menjadi sesuatu yang luar biasa, saat media mengangkatnya menjadi sebuah drama kolosal yang dimainkan sang presiden. Uniknya, SBY sengaja menikmati model semacam itu yang dikapitalisasi secara politik, seolah seluruh kebijakannya menjadi bagian wacana publik. Isu *reshuffle* pun menggeser agenda-agenda strategis soal penanggulangan kemiskinan, kontroversi pengesahan UU Intelejen, pembahasan RUU Desa, atau soal-soal KPK yang sedang memburu para koruptor.

Sedikit catatan soal langkah SBY yang memainkan isu *reshuffle* yang begitu dramatik itu. Saat kinerja pembantu Presiden dievaluasi, hasilnya dinyatakan merah atau jeblok, beragam manuver mulai dimainkan. Fenomena itu menyulut ketegangan internal Setgap sebagai koalisi pendukung pemerintahan SBY. Tak ayal jika menyembul manuver antar politisi, merepresentasikan kepentingan kartel antar kekuatan politik penopang kekuasaan.

Pada awalnya, penilaian evaluatif itu bersifat teknokratik yang bertumpu pada ukuran kinerja kelembagaan sesuai program besar dan visi-misi KIB 2. Semestinya upaya penggantian jabatan Menteri dimaksudkan sebagai langkah membuat kinerja teknokrasi kementerian semakin membaik. Namun sayangnya, akibat manuver

politisi dan sikap SBY yang ragu-ragu itu, penilaian teknokratis dan manuver politik justru dijawab cara-cara akomodasi. Atau bolehlah disebut pragmatis.

Misalnya saja dipergemuknya jabatan di kementerian dengan menambah begitu banyak Wakil Menteri. Posisi Wakil Menteri tidak ubahnya seperti *ganjel*. Menteri-menteri yang selama ini direkrut dari golongan Parpol, dinilai tidak beres dan terlalu banyak gorengan isu dibanding kerja kelembagaan. kehadiran wakil menteri, menurut SBY bisa mengatasi kekeroposan kerja kabinet.

Tetapi SBY mungkin agak lupa. Problem kementerian sebenarnya terletak pada buruknya sistem (struktur, regulasi dan mentalitas SDM) dalam birokrasi yang selama ini belum di-*reform* secara memadai. Karena itu, penggemukan struktur birokrasi belum tentu menjawab masalah kinerja Kabinet dan Kementerian.

Bagaimanapun juga, menteri tidak hanya dibutuhkan untuk mengurus hal-hal formal, tetapi justru peran kendali strategis institusi dalam menjalankan program. Menteri adalah aktor utama yang diharapkan mampu membongkar kejumutan, konservatisme serta korupsi dalam birokrasi yang telah berurat berakar berlangsung begitu lama.

Menteri adalah 'komandan utama' dan bertanggung jawab menata birokrasi lembaganya sesuai mandat reformasi secara lebih efektif. Siapapun menterinya, baik dari golongan Parpol atau profesional, harus memiliki kriteria: cerdas, berintegritas, serta berani mengambil gebrakan membenahi lembaganya.

Kehadiran wakil menteri yang 'dicomot' dari komunitas profesional sekalipun, jika tidak berani membuat langkah strategis membongkar bobroknya birokrasi, ya percuma saja. Tidak lebih sekadar politik akomodasi, merawat citra dan melembagakan *neokorporatism*. SBY tidak mau berselisih dengan Parpol di Setgap, apalagi mendisiplinkan menteri, tetapi justru menambahkan beban kabinet dengan menambah wakil menteri.

REPUBLIKA, 18 Oktober 2011

2. Menteri Berpolitik

Pada saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Kepresidenan (Kamis, 19/7/12), Presiden SBY memberikan peringatan keras kepada para menteri agar mampu mengerjakan tugas kenegaraan lebih fokus. Para menteri yang tidak bisa membagi waktu kerja antara urusan Parpol dengan tugasnya sebagai pembantu Presiden, diminta untuk mundur dari kabinet.

Teguran ini tentu memiliki sinyal geram dan jengkel, menyaksikan kecenderungan para menteri yang banyak mencurahkan waktu sekadar 'kampanye', urusan Parpol dibanding menjalani tugas profesional dan komitmen perannya sebagai pejabat negara. Apalagi, belakangan juga banyak goncangan indikasi keterlibatan sejumlah menteri tersangkut pada kasus korupsi.

Rekam jejak menteri yang mencurahkan waktu untuk urusan Parpol, memang tidak bisa diingkari. Ragam kegiatan kenegaraan menteri, ternyata juga tersedot untuk keperluan Parpolnya. Entah untuk bertemu pengurus, bagi-bagi proyek, ataupun membangun citra di hadapan konstituennya.

Fenomena itu sudah menjadi rahasia umum. Ditutupi karena secara normatif tidak boleh, tetapi hampir semua menteri 'melanggarnya' dan memaklumi sebagai hal biasa. Itulah risiko dari proses rekrutmen politik para pejabat ber-*setting* 'bagi-bagi jatah' saat Pemilu Presiden.

Koalisi struktur kekuasaan pasca Pemilu di zaman SBY, juga presiden-presiden sebelumnya, mengekspresikan orientasi pragmatis untuk mendapatkan posisi tertentu dalam kekuasaan. Idealnya, seseorang dari basis kelompok tertentu direkrut untuk posisi dan

jabatan kenegaraan, maka pengabdiannya berdasar tugas dan konstitusi adalah pada negara di mana Presiden sebagai representasi institusi itu, dan bukan pada Parpolnya.

Itulah fatsun (tata krama) politik, sikap negarawan yang mencerminkan tanggung jawabnya sesuai etika dan aturan main. Mengutip Kennedy, "*My loyality to my party will end when my loyality to my country begin*." Namun, dalam kenyataan politik praksis di lingkungan kekuasaan di Indonesia sejauh ini tidak terjadi.

Parpol yang berlomba mendekat dan merasa menjadi bagian kekuasaan, menancapkan kepentingan utamanya yakni meraih posisi menteri berarti didapat pula jalur atau akses ekonomi, popularitas, kewenangan, dan sederat keistimewaan yang melekat dalam jabatan tersebut. Tidak heran jika dimanfaatkan seoptimal mungkin, sampai-sampai melanggar aturan dengan cara korupsi atau menyalahgunakan untuk kampanye.

Para politisi gagal mentransformasi sikapnya menjadi negarawan, mereka berhenti mengenyam kepentingan parokial kelompoknya. Dampaknya, layanan publik terbengkalai, prestasi kerja kementerian buruk, dan karenanya jabatan tidak amanah.

Kemarahan Presiden SBY seharusnya dibuktikan dengan kekuatan nyali, atau komitmen nyata. Dalam sistem presidensiil, para menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Semestinya SBY dengan penilaian dan indikator tertentu bisa memecat menterinya jika memang telah menyimpang.

Paling tidak mengawali dengan memberhentikan menteri dari Partai Demokrat (PD), agar tumbuh kepercayaan atas sikap itu. Tidak mungkin menunggu kerelaan menteri Parpol lain dalam Setgap itu untuk mundur, karena mereka rata-rata juga pragmatis menganggap jabatan menteri sebagai tujuan ekonomi dan politik, bukan praktik kekuasaan yang bertatakrama.

REPUBLIKA, 24 Juli 2012

3. Ganti Menteri

Setiap terjadi keributan di elit kekuasaan, selalu saja muncul isu *reshuffle* kabinet. Kali ini pembicaraan pergantian menteri kembali menghangat bahkan ada ketegangan, dipenuhi manuver. Bermula saat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang bertugas mengawasi kinerja menteri, menyebut ada tiga kementerian yang mendapat rapor merah, yaitu Kemenkum HAM Patrialis Akbar, Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Kemenkominfo Tifatul Sembiring.

Isu ini terus membesar, dan makin mendorong para elit "berpantun politik" secara spekulatif. Inilah risiko kekuasaan yang rapuh. Koalisi antar kelompok dengan cara transaksional, di zaman reformasi ini sudah beberapa kali terjadi. Sejak era Gus Dur, Megawati, sampai dengan SBY.

Menteri, berdasar landasan konstitusi dipilih dan ditentukan berdasar hak prerogatif presiden. Normalnya, apapun keputusan presiden, itulah menjadi dasar utama. Pertimbangannya bisa bermacam-macam. Mulai dari soal kapasitas, kompetensi, serta politik akomodasi. *Reshuffle* kabinet menjadi diributkan, karena politik akomodasi berlebihan sebagai konsekuensi kekuasaan bermodel koalisi itu.

SBY dikenal sebagai presiden yang selalu bergerak pada jalur normatif, terutama karena beban pencitraan yang menjadi tumpuannya. Model *fit and proper test* dikenalkan SBY saat menyusun kabinet, pada edisi awal tahun 2004 lalu. Kemudian berlanjut saat berkuasa kedua kalinya, pada tahun 2009. Modusnya sama. Hampir seluruh jajaran kabinet berdasarkan daftar nama yang diajukan oleh wakil parpol sebagai penopang terbentuknya kekuasaan saat pilpres.

SBY secara simbolik menguji, sembari menjajagi derajat loyalitasnya, lalu dipilih. Perlu dicatat, saat parpol mengajukan calonnya, secara internal tentu tidak terlalu ketat menyeleksi berdasarkan kapasitas. Rata-rata siapa yang menjadi elit parpol, dianggap telah berjasa, mereka itulah yang berpeluang. Soal kompetensi nomor sekian.

Wajar saja, jika seorang calon menteri yang diajukan ke presiden terpilih mewakili parpolnya masih dipertanyakan kapasitasnya dalam rangka mengemban tugas sebagai sang teknokrat memimpin kementerian. Hal ini terlihat dari kinerjanya, apakah mampu ataukah tidak saat menjadi nakhoda lembaga strategis tingkat nasional itu.

Giliran dinilai berdasar kriteria tertentu, dan ternyata hasilnya memburuk terutama dari sisi kebijakan yang ditelurkan maupun kinerjanya selama menjalani tugas, muncullah reaksi macam-macam. Politisasi sebagai reaksi atas penilaian, baik oleh UKP4 maupun sikap kritis publik atas menteri, selalu saja menyeruak. Kadang-kadang wacana resuffle diarahkan pada konstruksi *like and dislike*. Tak pelak jika bermacam manuver lalu-lalang, bahkan tak luput ancaman sana-sini, jika seorang menteri wakil parpol itu diisukan akan di-*reshuffle*.

Sayangnya, SBY sebagai presiden dengan tipologi "melankolis", cenderung tidak memiliki sikap yang tegas dan berani ambil risiko. Bahasanya dinilai khalayak bertipe ragu-ragu dalam tindakan. Apalagi, jika ada tekanan politik beberapa kelompok di Senayan. Dari sanalah, berkembang perdebatan soal loyalitas para menteri. Para, menteri itu, mengikuti skenario parpol di Senayan, ataukah tunduk pada presiden?

Seorang menteri anggota kabinet sistem presidensial, seharusnya mengikuti perintah dan bertanggung jawab pada presiden. Namun, sekali lagi karena bangunan kekuasaan bernalar koalisi akomodatif (disebut pula pragmatis), maka suara keras parpol koalisi di parlemen tentu menjadi goncangan memengaruhi sikap SBY.

Tidak heran jika urusan akuntabilitas kepada publik seringkali diabaikan. Berkenaan kinerja dan prestasi kementerian pada akhirnya hanyalah wilayah kebijakan elitis, sebagai produk 'kongkalikong' persekutuan elit bergaya oligakhis. Inilah watak kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif pada umumnya.

Mereka hanya berburu posisi, tetapi tidak dilandasi etika yang kuat dan tanggung jawab kepada publik. Hasrat menduduki posisi,

cenderung melampaui urusan mandat dan amanah rakyat. Akibatnya, terciptalah *distrust* pada para pejabat, jikalau tidak boleh disebut delegitimasi kekuasaan.

Kapasitas menteri adalah salah satu aspek pertaruhan sistem kenegaraan, yang berdampak pada kualitas berdemokrasi. Kini saatnya mulai menumbuhkan sikap refleksi diri agar '*ngrumangsani*', bahwa jabatan menteri merupakan tanggung jawab besar, dan jangan hanya dipandang sebagai citra status sosial yang dikejar dengan dorongan nafsu berkuasa.

REPUBLIKA, 21 September 2010

4. Politisasi Birokrasi

Sejak otonomi daerah dan desentralisasi diterapkan, dilandasi UU No 22/1999, lalu diganti UU No 32/2004, dinamika politik lokal makin hidup. Gairah itu makin nyata saat kontestasi pemilihan pemimpin daerah dilakukan secara langsung melalui pemilukada. Struktur politik dan pola kepemimpinan di aras lokal juga beragam. Nadi demokrasi partisipatif makin meningkatkan harapan pembaharuan dan perubahan keadaan masyarakat dan tata pemerintahan.

Tak bisa dipungkiri, jika inovasi dan kreasi pemerintahan makin marak. Pembenahan sistem kekuasaan yang beriorientasi *good governance*, perencanaan dan implementasi pembangunan yang bertumpu pada partisipasi warga, beragam perbaikan kebijakan pelayanan publik, serta makin populernya *social policy* untuk urusan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Capaian dan pelajaran positif seperti di Kota Yogyakarta, Jembrana, Sleman, Solok, Sragen, Purbalingga, dan beberapa daerah lain layak diapresiasi. Meski demikian, tak luput pula dinamika politik lokal menstimulasi bangkitnya masalah-masalah yang rumit. Misalnya jebakan lokalitas diisi oleh sentimen etnisitas, konflik dan kekerasan yang mewarnai *local electoral*, munculnya raja-raja kecil yang korup, sampai bermacam rekayasa birokrasi akibat politisasi.

Urusan serius yang menimpa daerah saat ini adalah, makin kuatnya nuansa politisasi atas birokrasi produk dari praktik pemilukada yang tidak sehat. Pertanyaannya, sejak kapan hal ini berlangsung? Apa dampaknya bagi tata pemerintahan dan demokrasi lokal?

Di zaman Orde Baru, tindakan memperalat birokrasi untuk urusan politik bukan barang aneh. Era dimana korporatisme ditancapkan,

politik kekuasaan Orde Baru ditopang tiga pilar; ABRI, Birokrasi dan Golkar (ABG). Pembentukan kekuasaan, kebijakan pembangunan ekonomi dan politik selalu lahir dari tiga penjuru itu. Politisasi birokrasi ordebaru bentuknya adalah, birokrasi dijadikan sumberdaya ekonomi bagi Golkar, dikontrol para tentara dalam watak yang represif dan oligarkis.

Semenjak reformasi berlangsung, lalu Orde Baru tumbang, harapannya pola-pola politisasi birokrasi harus ditinggalkan. Birokrasi, dalam sistem demokrasi, tentu tidak boleh direcoki oleh sikap politik yang diproduksi kemauan sekelompok kepentingan oligarki.

Betapapun kelompok pemenang kompetisi kekuasaan memiliki kewenangan mengatur dan menentukan sistem dan arah kebijakan, bukan berarti dengan seenaknya 'mengganggu' jalannya tata pemerintahan. Birokrasi dinilai baik jika sistem itu mampu melayani kebutuhan masyarakat, mengikuti tata dan nalar publik, terukur berdasar norma-norma demokrasi.

Sayangnya hal ideal itu, di zaman reformasi ini juga belum sepenuhnya terwujud. Seringkali ditemukan fakta, terjadi penguasaan sumberdaya birokrasi oleh elit dan politisi terpilih tanpa mengindahkan norma-norma publik. Bahkan sampai memotong jalur, mengabaikan tata kelola yang baik.

Jabatan-jabatan strategis dikuasai, tetapi tidak diikuti persyaratan teknokrasi dan kompetensi. Misalnya, seorang kepala daerah terpilih begitu mudah menggunakan kewenangannya mengganti pejabat daerah, staf strategis tanpa memperhatikan kemampuan semestinya. Semua tergantung selera penguasa. Apalagi anggaran seringkali disedot untuk urusan pribadi dan kelompoknya.

Saya menilai, perilaku semacam ini konsekuensi pola transaksional saat pemilukada. Para pendukung politisi terpilih diberi sejumlah janji jabatan tertentu, meskipun kapasitasnya tidak memadai. Secara realis, hal demikian bisa dimaklumi. Namun, tendensi transaksi tanpa diimbangi kapasitas, kompetensi dan visi penataan sistem yang baik, jelas akan mempertaruhkan dan mengorbankan fungsi birokrasi sebagai pelayanan publik.

Program dan kegiatan pembangunan, serta rangkaian proyek seringkali harus berkompromi dengan interest pragmatis, dibagi-bagi

berdasarkan pengaruh kelompok di eksekutif dan kekuatan politik di parlemen. Hal ini sungguh ironis, karena politisasi birokrasi ujung-ujungnya mengorbankan kualitas pelayanan publik dan pembangunan. Jika mau jujur, kejadian didaerah itu sessungguhnya persis sama polanya dengan transaksional kekuasaan di aras pusat kekuasaan, politik nasional.

REPUBLIKA, 15 Juni 2010

5. Teka-teki *Reshuffle*

Beberapa kali kabinet Indonesia bersatu jilid II yang dinahkodai SBY terhembus isu *reshuffle*. Selama itu pula, muncul beragam spekulasi mengenai kemungkinan perombakan komposisi para pembantu presiden itu. Biasanya isu *reshuffle* ini mencuat dipicu adanya kasus yang dialami menteri kemudian diikuti politisasi, disodok sana-sini. Tidak mudah memang menelisik kepastian *reshuffle*, ibarat teka-teki, beberapa hal pertanyaan terjawab tetapi ternyata terbentuk pertanyaan baru.

Sejak Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) diberi tugas mengevaluasi kinerja kementerian, lalu hasilnya diumumkan ke publik berupa penyimpulan raport merah, SBY melontarkan seruan agar pembantunya memperbaiki diri. Disusullah kementerian berbenah diri, diumumkanlah 'prestasi-prestasi' baru, sehingga disimpulkan bahwa performance sang pejabat politik telah diberbaiki. Di situlah selesai sebagai isu, tetapi masalah makin bertambah.

Mengapa soal *reshuffle* ini selalu menjadi teka-teki? Benarkah Kementerian dan birokrasi di bawahnya, telah melakukan perombakan secara mendasar? Sejak awal diyakini, bahwa konsekuensi dari struktur kekuasaan koalisi pragmatis maka tarik-menarik kepentingan di antara mereka tidak terhindarkan.

Bagaimanapun juga, pembagian kue di jabatan politik kementerian yang telah berlangsung selama ini (zaman Gus Dur, Mega dan SBY). Mereka tidak dipandu oleh kesamaan nilai,ideologi dan orientasi saat menggabungkan diri. Kecuali, blok politik tersebut hanya karena urusan pemenangan dan perolehan jabatan demi eksistensi insitusi dan politisi di Parpol.

Meskipun dalam satu blok kekuasaan bersama, tetapi senyatanya antar Parpol yang tergabung berlabel 'Setgab' itu memiliki nada dasar yang beragam. Bergaya politik harmoni dan neo-korporatisme, SBY senantiasa memainkan citra bahwa dirinya bisa mengakomodir kekuatan politik semacam itu, bahkan percaya diri mampu memuaskan semua pihak. Di situlah citra harmoni dapat tersandang. Padahal dengan gaya semacam itu mempersulit posisi SBY untuk menunjukkan komitmennya kepada publik mengenai langkah-langkah strategis yang akan dicapainya.

Kita bisa lihat misalnya, kinerja kementerian secara umum relatif *mandeg*. Tidak ada lompatan berarti, bahkan muncul kontroversi, benturan satu sama lain antar kebijakan yang diproduksi oleh kementerian. Saat UKP4 mengumumkan hasil evaluasi, sebenarnya dapat dijadikan alasan kuat bagi SBY untuk membenahi jalannya pemerintahan. Ternyata SBY terbelit keraguan bertindak untuk menegur, mencopot menteri, bahkan me-*reshuflle* beberapa komposisi kabinet. Seringkali manuver dan ancaman sana-sini yang dihembuskan kelompok tertentu, membuat SBY *muntir*.

Bisa ditebak, SBY meyakinkan ke publik dengan tetap menjaga citranya. Berulang-ulang hal itu terjadi, bahkan menjadi pola. Agenda pemberantasan korupsi, perbaikan pelayanan publik dan kebijakan sosial, pemenuhan infrastruktur, serta skema ekonomi politik makro bertajuk reformasi birokrasi nyaris compang-camping. Beberapa prestasi parsial yang telah diraih pemerintahan SBY ternyata tidak mampu dijahit dengan baik, karena reformasi birokrasi tidak efektif.

Andai saja benar ingin melakukan *reshuffle*, semestinya bukan hanya karena soal menteri itu terkena kasus. Hal itu terkesan sekadar 'darurat.' Tetapi yang substansial adalah, sebagai konsekuensi dan konsistensi menempuh rute dan jejak reformasi birokrasi yang dicanangkan SBY.

Karena itu, perlu terus dievaluasi kinerja birokrasi di bawah kementerian bahkan sampai dinas-dinas di Pemda yang sampai sekarang wataknya belum berubah. Ada kasus atau tidak dengan menteri, jika birokrasi kementerian tidak beres dan menjadi kontra produktif dengan agenda reformasi, SBY seharusnya tidak ragu membuat langkah besar dalam kabinet.

REPUBLIKA, 20 September 2011

6. Kongres Partai Demokrat

Perhelatan politik bakal digelar Partai Demokrat (PD). Rencananya, tanggal 21-23 Mei 2010 ini, bertempat di Bandung, partai terbesar sebagai pemenang pemilu 2009 lalu itu akan menyelenggarakan kongres ke-2, bertema "Memajukan Partai Demokrat untuk Kejayaan Bangsa". Persiapannya begitu meriah. Paling tidak, iklan diputar di berbagai media televisi, spanduk dan baliho terpampang dimana-mana sepanjang jalan di kota-kota di Indonesia, koran-koran pun juga dimeriahkan promosi kandidat ketua umum.

Sebagai partai pemenang pemilu —menguasai kursi di parlemen dan pemenang Pilpres tahun 2009—, PD memang tergolong berusia muda. Kelahirannya merupakan produk dari liberalisasi politik semenjak sistem multipartai digelar dalam rentang reformasi. Partai ini, sejak awal dikenal sebagai partai terbuka yang bukan berhaluan sektarian. Pada awal kelahirannya tidak begitu diperhitungkan, karena pada pemilu 2004 hanya memeroleh 56 kursi DPR sekitar (10,2 persen).

Namun yang mengejutkan, keberhasilannya mengkomodifikasi SBY sebagai ikon pemimpin (saat itu memenangkan pemilihan presiden 2004), maka tiba-tiba tahun 2009 PD melejit menjadi pemenang pemilu (148 kursi DPR RI) dengan mengantongi suara 20,85 persen. Banyak orang terkaget. Tapi, itulah politik yang tidak mudah diprediksi dengan kasat mata. Wajar saja, jika partai-partai tergolong besar seperti Golkar dan PDIP, juga partai menengah PAN, PPP, PKB dan PKS merasa tak habis pikir tentang hasil itu. Lepas dari segala spekulasi apapun, kemenangan PD telah mengubah konfigurasi politik nasional.

Tak bisa dipungkiri, kemenangan PD sebagian besar karena faktor menumpukan dirinya pada figur SBY. Para politisi yang ada di PD

memang tidak istimewa. Partai ini juga belum memiliki jaringan organ-organ sektoral ke bawah yang kuat, serta reputasinya masih terbatas. Tetapi, karena tahun 2009 lalu parpol-parpol yang pernah berkuasa mengalami 'radang' akibat terlalu terlena dengan strategi politiknya, maka jebakan PD relatif berhasil.

Ketika politik mengalami titik *distrust*, pencitraan atas figur SBY yang diolah PD menjadi efektif dalam arus politik yang pragmatis. Namun yang menarik, politik pencitraan itu toh juga menular. Karena sebagian besar parpol peserta pemilu 2009 lalu juga meniru dengan gaya yang sama, namun pencitraan sudah melekat dalam figur SBY.

Beban berat yang dirasakan PD setelah memenangkan pemilu dan berkuasa secara formal, adalah, mampukah mereka mempertahankkan untuk episode berikutnya? Sebagaimana kita tahu, SBY sebagai figur PD tidak mungkin lagi maju di pemilu presiden 2014. Disinilah pertaruhan besar.

Kongres ke-2 PD memiliki beban berat. Apakah PD mampu membuat strategi baru pasca SBY, lalu merumuskan *platform* dan program-programnya mengungguli parpol-parpol lain, serta topangan manajemen partai yang efektif. Tentu, ketua umum dan sekjen terpilih nantinya menjadi salah satu faktor kunci menjawab agenda itu.

Kemunculan 3 nama kandidat, seperti Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, dan Marzuki Ali, adalah nama-nama yang kemungkinan menjadi nahkhoda PD masa 2010-2015. Tokoh-tokoh ini, tentu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Jika kongres berhasil menelorkan gagasan brilian mengenai strategi keberlanjutan parpol, serta ketepatan memilih pengurus, maka PD tidak bimbang menghadapi persaingan politik 2014 yang makin keras.

Akan tetapi sebaliknya, jika kongres ini hanya menjadi kegiatan mekanis, ritual politik penggantian pengurus, maka PD terancam mengalami penyusutan kepercayaan dan reptasi, persis dialami parpol-parpol lain yang condong konservatif. Kunci terpenting dalam kongres ini adalah, mampukah PD membuat terobosan diri untuk menjadi partai modern dan demokratis?

Paling tidak kongres hendaknya menghasilkan program-program yang progresif, manajemen parpol yang inovatif, serta digerak-

kan kader-kader handal dan komitmen pada perjuangan untuk konstituen. Semoga materi tersebut menjadi bahan perdebatan serius, dibandingkan sekadar intrik perebutan pengurus.

Karena itu, sudah saatnya PD me-*reform* diri agar kompatibel dengan sistem pemilu serta dinamika masyarakat yang begitu cepat berlangsung saat ini dan dimasa mendatang. Menjadi partai yang besar, bukan karena urusan uang atau modal. Tetapi cita-cita, konsistensi, serta komitmen berdemokrasi secara benar.

REPUBLIKA, 18 Mei 2010

7. Keterbukaan PKS

Dalam Munas ke-2 tahun 2010 yang digelar beberapa hari lalu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mendeklarasikan diri sebagai partai yang inklusif. Sebagaimana ditegaskan oleh Ketua Dewan Syuro PKS, Hilmi Aminuddin, partainya terbuka menerima kader berasal dari kalangan non-muslim, yang kesemua itu bagian dari konsekuensi pelaksanaan ajaran Islam. Di dalamnya harus menerima pluralitas sebagai kesadaran positif mendorong dinamika kehidupan. Dalam konteks ini, inklusivitas bukan taktik atau strategi, tapi pelaksaan ajaran Islam yang hakiki (*republika.co.id*. 21/06/2010).

Langkah PKS ini memang menarik dicermati. Semenjak dirinya memasuki fase dan tahapan demokrasi, PKS telah dikonstruksikan sebagai Parpol Islam eksklusif. Meskipun beberapa Parpol menyatakan dirinya berhaluan Islam, seperti PPP, PBB, PKNU, dan beberapa partai kecil lainnya, tapi sorotan tajam pada PKS sebagai Parpol yang dianggap mengunci diri dan menjadi ancaman kelompok nasionalis begitu kuat.

Mengapa demikian? Karena daya kerja politik PKS sejak Pemilu 1999 sampai 2009 sungguh fenomenal. Selain meningkat perolehan kursi di parlemen (pusat dan daerah) serta beberapa pimpinan eksekutif daerah direbutnya, akselerasi Parpol ini dibandingkan partai Islam lainnya relatif beda. Saya menilai, dinamika perubahan sosial dan konfigurasi politik tentu memaksa PKS untuk terus merefleksi posisi dirinya. Faksionalisasi dalam tubuh PKS, antara kelompok haluan keras dan golongan moderat menjadi bagian dan babak menarik terkait benturan pemikiran yang melahirkan sikap politik, dari eksklusif menjadi inklusif.

Terlepas apakah hal ini hanya sebentuk taktik-strategi ataukah memang dilandasi oleh nilai ideologis Islam sebagaimana disampaikan Ketua Dewan Syuro PKS, saya menilai sikap politik ini merupakan bentuk kemajuan. Paling tidak, ketegangan dan tarik menarik itu menjadi bukti bahwa dalam tubuh PKS tidak monoton. Kira-kira, apa yang bisa dianalisis dibalik perubahan diri secara formal dalam tubuh PKS ini?

Pertama, kuatnya citra PKS (begitu juga dengan Parpol Islam lainnya) sebagai Parpol Islam, ternyata tidak beriringan dengan daya dukung masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Faktanya, secara sosiologis betapapun komunitas muslim adalah kelompok dominan, tetapi mereka adalah entitas sosial moderat bukan bergaris puritan atau ''garis keras'. Karena itu, konstruksi 'agama' dalam struktur masyarakat Indonesia tidak kompatibel dengan nalar politik PKS yang cenderung ekslusif. Pemeliharaan citra dan simbolik agama, tentu tidak menguntungkan bagi PKS.

Kedua, pertarungan antar kelompok dalam demokratisasi Indonesia akhir-akhir ini kian pragmatis adanya. Ketika sebagian besar Parpol belum mengubah karakter dirinya yang oligarkis, bahkan justru makin membentuk pola kartel, maka suasana semacam ini menjadi pertimbangan PKS untuk menyiasati. Modal besar PKS dengan anggapan kelebihan berupa komitmen kader, kekuatan jaringan, soliditas struktur organisasi, menjadi titik tolak bagi peningkatan diri sebagai Parpol alternatif. Tetapi sayangnya, PKS terjerat dalam konstruksi eksklusif yang tidak mungkin modal itu mampu dikonversi menjadi daya tarik pemilih masyarakat muslim moderat, apalagi non-muslim.

Ketiga, sementara itu muncul gelagat bahwa Parpol-parpol 'garis tengah' nasionalis kian membentuk gugus baru, khususnya Parpol besar semacam PD, Golkar dan PDIP dengan membuat pembatasan kontestasi berupa usulan penetapan 5% untuk *parliementary threshold* (PT) pada Pemilu 2014, dari 2,5% pada tahun 2009 lalu. Jika langkah itu menjadi ketetapan undang-undang, maka beberapa Parpol di bawah 5% akan rontok, dan kemungkinan PKS kian ditepian garis PT karena saat ini hanya mengantongi 7% saja. Dengan begitu, jikalau PKS tetap mengunci diri pada lintasan Parpol eksklusif, maka posisinya kian tersudut karena kesulitan mengembangkan diri dan memperluas konstituen.

Apapun alasan PKS untuk memilih posisi dan sifat barunya adalah realitas politik. Jika berpegang pada nilai-nilai Islam inklusif dilengkapi strategi membangun Parpol yang moderat, visioner dan modern, kemungkinan memiliki tempat makin meluas dan berpeluang besar sebagai kekuatan politik diperhitungkan dalam demokrasi Indonesia. Namun, jika perubahan ini hanya semata jalan pragmatis mengadaptasikan pola-pola Parpol pada umumnya, maka besar kemungkinan PKS juga terjebak pada permainan dan manuver dangkal. Kita lihat proses dan hasilnya kelak.

REPUBLIKA, 22 Juni 2010

8. Muktamar PPP

Pada awal Juli 2011 ini, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar muktamar VII di Bandung, Jawa Barat. Peristiwa rutin tiap lima tahun bagi organisasi politik ini sangat penting, selain sebagai momentum rotasi kepengurusan juga menentukan masa depan ke arah mana memproyeksi diri yang tercermin dalam agenda-agenda strategisnya.

PPP merupakan partai generasi lama, yang lahir dan berproses sampai mengalami kristalisasi pada era Orde Baru. Menasbihkan dirinya sebagai Parpol berhaluan Islam, PPP tidak lain adalah hasil fusi beberapa Parpol identik aspirasi komunitas Muslim. Parpol ini pernah merasakan begitu lama menjadi 'ornamen simbolik' representasi Islam, bersama PDI sebagai kelompok nasional membayangi Golkar sebagai partai pemerintah Orde Baru.

Pada era reformasi yang ditandai liberalisasi politik, pertumbuhan Parpol yang konon berlabel Islam begitu subur. Keadaan ini praktis menjadi kompetitor PPP. Misalnya PKS, PBB, PKNU. Bahkan begitu terasa adalah adanya parpol berlabel 'nasional' berbasis golongan santri, seperti PKB (NU) dan PAN (Muhammadiyah), dan Parpol lainnya dengan pola sejenis.

Dinamika politik sejak Pemilu 1999, 2004, dan sampai 2009, PPP tidak mengalami perkembangan signifikan. Justru dapat dikatakan kian merosot. Bahkan mengalami perpecahan, sebagaimana munculnya PBR (Partai Bintang Reformasi), yang menyebabkan perolehan kursi PPP terus menurun. Saat ini, jumlah anggota DPR fraksi PPP sebanyak 57 orang.

Secara demografis, jumlah pemilih Islam (formal) sangat dominan. Akan tetapi fragmentasi aspirasi golongan santri ini, baik itu modern maupun tradisional, mengindikasikan tidak ada korelasi positif komposisi komunitas Islam ini tersedot ke Parpol Islam. Justru yang menguasai kursi parlemen adalah Parpol berlabel nasionalis. Kita bisa sebut misalnya tiga besar pemenang pemilu, Partai Demokrat, PDIP, dan Golkar.

Perlu dicatat, bahwa kemenangan Parpol besar inipun sesungguhnya tidak merepresentasikan golongan nasionalis tulen, karena toh Parpol nasionalis saat kampanye secara simbolik juga tidak luput dari upaya mengkomodifikasi golongan Islam. Kemunculan tema atau isu kampanye tergantung target yang disasar.

Secara umum, beban berat kontestasi politik dalam pemilu memang tidak hanya dialami PPP sebagai Parpol Islam. Pergeseran Parpol terjadi besar-besaran, sebagai akibat lingkungan politik yang kian menebalkan pragmatisme. Politisi saat ini rata-rata terbebani 'politik berbiaya tinggi', sementara watak secara organisasi parpol juga oligarkis. Pemilih juga tertular penyakit 'suap suara' oleh rekayasa politisi yang menggunakan uang untuk mendapat dukungan.

Paling tragis adalah, gaya-gaya transaksional di lingkungan wakil rakyat terpilih di lembaga parlemen. Situasi ini menyebabkan kemungkinan kualitas demokrasi terus merosot. Pertanyaannya, mampukah PPP akan meniti jalan baru membenahi keadaan melalui momentum Mukatamar ini?

Andai tetap menjadi parpol yang menumpukan dirinya sebagai orpol Islam, perlu diingat bahwa lingkungan politik makin tidak kondusif dimana gelombang *distrust* terus meluap. Cita rasa parpol di hadapan pemilih makin pudar, baik itu Parpol Islam maupun berlabel nasionalis.

REPUBLIKA, 5 Juli 2011

BAGIAN VI

Politik Kian Membusuk

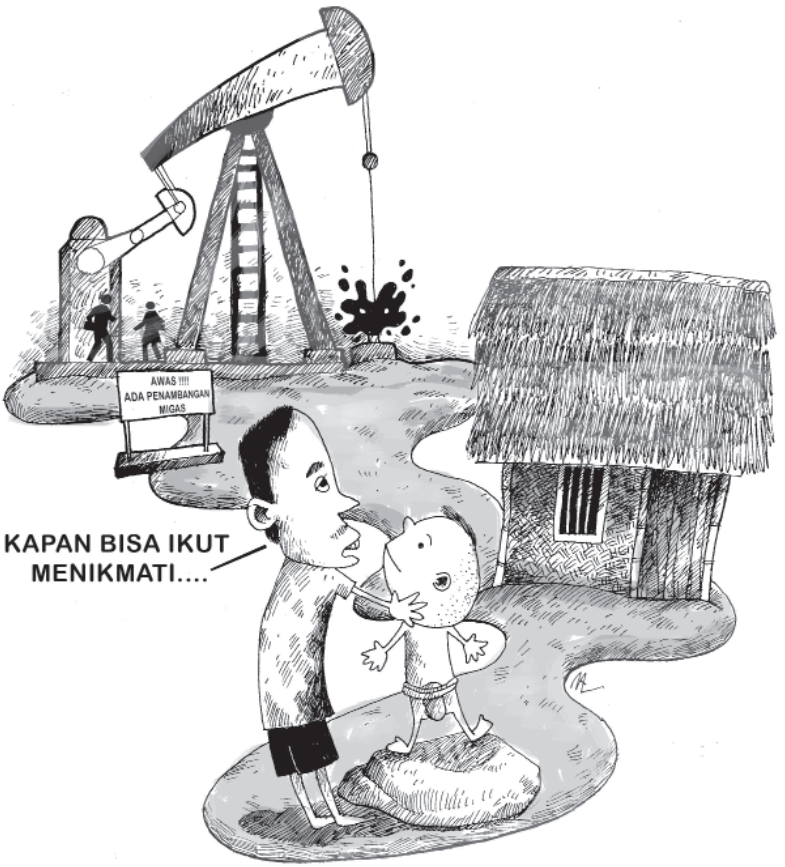

I. Politik Perburuan Koruptor

Sonjang-ganjing perburuan tersangka koruptor, paling tidak yang dianggap berkasus dengan korupsi, menjadi gejala menarik, menggoyah sekaligus memeriahkan pertarungan kelompok dalam pentas politik nasional. Dua aktor yang tengah menjadi sorotan publik kali ini adalah Nazaruddin (disangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi soal proyek di Kemenpora, Kemendiknas, dan proyek lainnya) dan Nunun Nurbaety (disangka menjadi bagian kasus penyuapan pada anggota DPR dalam pemilihan Deputi Senior Gubernur BI). Kontroversi kasus mereka menyeruak, karena cenderung 'digoreng' dengan irisan isu yang kian meluas.

Mengapa fenomena itu begitu menyedot perhatian publik? *Pertama*, kasus itu berkait dengan pelibatan institusi politik dan elit kekuasaan, atau Parpol besar. *Kedua*, aktor yang dimaksud kebetulan 'dianggap kabur' dan dinilai tidak kooperatif pada proses hukum oleh KPK. *Ketiga*, kebetulan posisi aktor tersebut dinilai strategis dalam lembaga politik yang berkuasa. Sehingga memunculkan beragam spekulasi atas dampak jika aktor tersebut benar-benar terseret ke pengadilan oleh KPK.

Nazaruddin adalah mantan bendahara umum Partai Demokrat (PD), yang diasumsikan menggenggam 'kunci dapur' dan seluk-beluk keuangan Parpol, yang hingga saat ini menjadi objek tudingan sebagai mesin politik yang dekat dengan kasus-kasus korupsi. Tak terkecuali PD, Parpol-parpol lain juga dihinggapi masalah yang hampir sama.

Begitupun Nunun, kasus yang menyeretnya terkait dengan politisi di parlemen anggota Parpol besar seperti PDIP dan Golkar. Kedua aktor ini juga dinilai tidak kooperatif, karena dituding 'melarikan diri' ke luar negeri, sehingga tidak memenuhi panggilan KPK. Upaya

politik PD untuk menjemput Nazaruddin ke Singapura juga gagal, dengan segala peran simbolik maupun negosiasi jelas tidak mudah meyakinkan tentu dengan segala kalkulasi risiko politik maupun hukum yang akan dialaminya. Begitupun Nunun, yang kebetulan istri Mantan Jendral Polisi Dadang Dorojatun (politisi PKS), kini ditetapkan sebagai perburuan interpol. Ancaman-ancaman demi bermunculan, politik saling sandera.

Bagi SBY dan PD, kasus Nazaruddin ini serba dilematik. Di satu sisi mereka berupaya menegaskan sikap dan komitmen sebagai pelaku garda depan pemberantasan korupsi. Dengan alasan citra ataupun agenda strategis, rezim SBY dan PD berkali-kali meyakinkan mengenai keseriusan komitmen tersebut. Sementara di sisi lain, semakin dalam membongkar kasus di sarang dan jantung institusi politik itu, justru makin terbuka peluang munculnya serangan dari musuh-musuh politik. Pola dan modus semacam ini, nyaris sama dialami kekuatan politik besar.

Hambatan mendasar yang dialami dalam upaya pemberantasan korupsi hingga kini, kecenderungan politisasi kasus, yang mengaitkan kepentingan subjek kekuasaan dominan yang bisa mempengaruhi proses hukum melalui berbagai cara. Apalagi hal itu diperparah oleh gurita mafia kasus dan konspirasi pembusukan hukum tengah menimpa berbagai institusi seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, Mahkamah Agung (MA). Bahkan ancaman penyuapan juga dialami oleh lembaga hukum prestisius seperti Mahkamah Konstitusi (MK).

Fakta ini diperparah oleh langkah sistematik gejala pelemahan lembaga-lembaga hukum esktra negara, seperti KPK, dengan arah revisi UU KPK yang makin mempersempit ruang gerak institusi pemberantasan korupsi. Ironisnya, pelemahan itu justru dikerjakan oleh lembaga-lembaga representasi politik, yang konon merekalah yang dulu berteriak lantang memberantas korupsi.

Dengan begitu, perburuan koruptor oleh KPK yang selalu dibelit kesulitan sebagaimana diilustrasikan diatas, adalah bagian episode pelemahan gerakan anti korupsi akibat politik yang serba bebal.

REPUBLIKA, 14 Juni 2011

2. Pelemahan Kedaulatan Negara

Pernyataan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pada Penutupan Tanwir Muhammadiyah di Hotel Horison, Bandung, Ahad (24/6/ 2012), yang menilai kedaulatan negara dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan budaya lemah, perlu mendapat perhatian publik terutama berkenaan dengan kecenderungan perubahan sejauh ini dan masa depan bangsa.

Menurut Sekretaris Umumnya, Agung Danarto, mestinya pemerintah segera menempuh langkah-langkah konkret mengatasi permasalahan ini agar tak beralarut-larut. Beberapa contoh di bidang ekonomi, terdapat undang-undang tentang eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang merugikan masyarakat Indonesia. Gejala yang makin marak adalah kekayaan sumber daya alam dan otoritas politik makin dikuasai kepentingan asing.

Pemerintah diimbau mengembangkan ekonomi konstitusional dengan melindungi dan memberdayakan ekonomi nasional yang berpihak pada rakyat. Bidang politik terdapat kecenderungan negara sangat kompromistis, tidak memihak kebijakan yang menguntungkan publik. Wajar jika diserukan pemerintah dan DPR merevisi atau mencabut produk perundang-undangan yang menggerus kedaulatan negara.

Krisis kedaulatan jugaterjadi pada penegakan hukum di Indonesia, sementa di ranah budaya, watak dan karakter bangsa melemah digantikan rasa rendah diri dalam menghadapi globalisasi. Pada isu lain, maraknya praktik korupsi, banalisasi, friksi-friksi dalam masyarakat, belum terwujudnya pemerataan atas hasil pembangunan nasional, serta tingginya angka kemiskinan.

Seruan tersebut sebenarnya bagian dari sikap kritis yang selama ini telah didengungkan oleh beberapa pihak yang resah atas situasi kebijakan strategis bidang politik dan ekonomi Indonesia, yang condong kian dikendalikan oleh pola dan watak neoliberalisme. Kebijakan itu menumpukan otoritas pasar sebagai pemegang kendali arah kebijakan.

Sekalipun dalam UUD 1945 telah menegaskan kedaulatan negara untuk menggunakan otoritasnya bagi kesejahteraan rakyat, namun praktiknya makin bergeser jauh dari harapan. Ironi kemiskinan rakyat Indonesia, di mana berlimpahnya sumber daya alam tetapi jurang kesenjangan sosial ekonomi dan penguasaan modal oleh pihak asing kian membawa situasi pada krisis dan pelemahan kedaulatan.

Pada sejumlah kasus, aset-aset nasional terjebak pada privatisasi sehingga pemanfaatannya keuntungan mengalir ke negara-negara maju. Teori lama yang yang menjelaskan pola soal penjajahan atau kolonisasi, secara sistematik masih terjadi dan mengalami pergeseran bentuk yakni berwujud 'kerja sama' perdagangan internasional. Perspektif baru juga menegaskan betapa perjanjian antar negara yang terjadi sejauh ini toh ujung-ujungnya Indonesia 'dikadali' (dibohongi) dengan dalih pasar bebas dan kapitalisme global.

Mulai dari produk hukum, kelembagaan dan tata kelola keuangan serta konstruksi pengetahuan yang menggerakkan kebijakan telah membawa dampak eksploitasi dan ketergantungan Indonesia pada negara asing. Fakta pelemahan kedaulatan itu beroperasi pada kurun waktu panjang, dengan risiko makin nyata praktik pemiskinan. Karenanya, seruan dan teguran itu perlu menjadi perhatian masyarakat dan pemegang kekuasaan agar segera mengoreksi kebijakan pembangunan dengan mengembalikan pada jalur konstitusional yang benar.

REPUBLIKA, 26 Juni 2012

3. Politik Kian Membusuk

Makin terasa bau busuk menyengat dalam politik Indonesia. Jika selama ini pusaran masalah senantiasa diwarnai sepak terjang kuasa politik dan ekonomi serta lembaga hukum di tingkat nasional, kini hal itu terus merembet ke daerah. Praktik-praktik keangkuhan penguasa lokal di dalam memproduk kebijakan, regulasi dan tata kelola sumberdaya banyak melahirkan reaksi negatif dari masyarakat.

Protes dan gejolak secara sporadis terus berlangsung, seiring munculnya rentetan problem ketidakadilan, korupsi, pelanggaran HAM, kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta ragam manipulasi yang mengekspresikan keangkuhan pemegang otoritas. Kisah-kisah itu tergambarkan begitu nyata, betapa situasi sosial kian mengindikasikan kefrustasian dengan segala kecemasan. Bentrok dan kekerasan antar warga, tindakan represi penguasa dengan memperpanjang daftar buruk peran aparat keamanan, bahkan sejumlah risiko masyarakat yang terus dialami sebagai dampak kebijakan yang tidak beres.

Peristiwa pembakaran kantor Pemda Bima serta beberapa fasilitas lain yang rusak akibat kerusuhan sosial beberapa waktu lalu, merupakan episode lanjutan ledakan kekerasan sebelumnya yang menelan korban jiwa masyarakat sipil oleh karena penembakan aparat keamanan. Sayangnya, semenjak itu tidak ada intensitas respon pihak bupati terkait tuntutan substansial agar dilakukan pembatalan kontrak tambang.

Itulah basis letupan yang makin membara, saat protes sosial dianggap sepele atau hanya direaksi dengan cara-cara represif. Modus semacam ini nampaknya terus berkembang di berbagai daerah, saat munculnya gejolak sosial condong diremehkan bahkan disumbat dengan kekerasan.

Kegiatan eksploitasi sumberdaya alam adalah bagian dari konteks akar masalah membumbungnya konflik struktural yang dalam rentang waktu mendatang kemungkinan meningkat frekuensinya. Pencaplokan lahan masyarakat untuk aktivitas industri tambang, perkebunan, kehutanan, serta praktik kapitalisasi aset daerah menjadi pola-pola yang sejauh ini belum dibenahi.

Sungguh ironis memang. Semenjak terjadi desentralisasi kekuasaan di aras lokal, dengan konsekuensi bobot kewenangan berproses di kabupaten/kota berdasar UU 22 Tahun 1999 lalu berubah menjadi UU 32 Tahun 2004 sepakterjang bupati atau wali kota pada sejumlah kasus makin liar. Kebijakan politik dan ekonomi yang semestinya dikoridori peran kontrol oleh parlemen daerah (DPRD) kian menumpul, serta pemihakan untuk kepentingan masyarakat senyata makin hilang. Persekutuan oligarkis antara eksekutif dan legislatif menguatkan rajutan temali kepentingan bersama pengusaha, yang ujung-ujung mengabaikan hak-hak dan aspirasi komunitas lokal.

Reformasi belum mampu mendorong pembaharuan paradigma pembangunan di aras lokal, apalagi menstimulasi *governance reform*, kecuali hanyalah sekadar memindah eksploitasi yang dulu sebagai keputusan pemerintah nasional kini kebijakan itu menjadi domain pemerintah daerah.

Konflik kebijakan atas sumberdaya alam di Bima semestinya menjadi pelajaran berharga bagi daerah lain. Misalnya DIY dan Jawa Tengah agar tidak mengulang dengan mereplikasi pola yang sama. Sebaliknya perlu transformasi demokrasi lokal sebagai basis utama perbaikan kebijakan berorientasi kesejahteraan masyarakat serta pemerataan akses dan kelola sumberdaya alam secara adil.

REPUBLIKA, 31 januari 2012

4. Krisis Legitimasi

Begitu sering rasanya muncul permakluman, seolah politik itu diidentikkan dengan absennya moral, atau abai atas nilai-nilai kesantunan dan kejujuran. Begitu menyeruak gugusan masalah menimpa politisi di parlemen ataupun pemerintah. Misalnya soal korupsi dan watak royal yang dipertontonkannya, maka caci maki atau sumpah serapah dari masyarakat selalu bermunculan.

Intinya mengutuk perilaku buruk sang elit atau pejabat. Saking seringnya hujatan atas kejadian buruk setiap politik dipenuhi kontroversi dan terlekat manipulasi, lama-lama dianggaplah sebagai sesuatu kisah biasa. Uniknya, begitu jadwal pemilihan umum datang yang rutin tiap lima tahunan, ternyata perilaku yang pernah dihujat itu terlupakan begitu saja.

Kampanye yang mengumbar 'janji palsu' dan kontes citra disertai ragam kemasan bombastis dilakukan sang politisi yang pernah mereka soroti itu, buktinya mampu menghipnotis kesadaran pemilih pada *event* kampanye. Alhasil angka partisipasi Pemilu masih tergolong tinggi dan kekuasaan baru terbentuk berwajah lama. Pola semacam itu terus berulang ibarat siklus politik berproses secara mekanistik.

Semenjak demokrasi diterapkan di Indonesia mengakhiri politik otoriterisme, begitu banyak kesempatan kegiatan pertarungan politik meraih kuasa terus digelar melalui Pemilu. Penyelenggaraannya makin bebas dan terbuka. Masyarakat sering ikut terlibat Pemilu, mulai dari memilih Presiden, Legislatif, DPD, sampai dengan Pemilukada memilih Gubernur, Bupati/Walikota, bahkan pemilihan Kepala Desa.

Aturan pemilihannya berbeda, namun polanya hampir sama. Karena seringnya Pemilu dijalani masyarakat, nyaris mereka sudah

hapal proses dan bagaimana cara menjalani prosesnya. Kecuali bagi pemilih pemula. Pertanyaannya, apakah tiap pengalaman itu menghasilkan sesuatu yang baru dan bermakna?

Karena Pemilu hanya sekadar menjadi tindakan teknis atau rutin, maka praktik itupun hanya pemenuhan prosedur berdemokrasi. Nyaris tidak ada sama sekali nilai baru yang menumbuhkan harapan progresif dan imajinasi yang menerobos dari seputar rutinitas itu, kecuali tidak lebih menghasilkan pelantikan pejabat legislatif dan eksekutif.

Yang memprihatinkan adalah Pemilu semacam itu kecenderungannya juga tidak luput dari rangkaian gejolak sosial dan kekerasan, manipulasi, sampai hingar bingar tidak menentu. Bahkan Pemilu yang tidak berkualitas semacam itu toh biayanya begitu mahal. Miliaran rupiah dana disedot dari APBN dan APBD, ditambah pesta pora yang dikeluarkan dari kantong kontestan.

Makin banyak kisah ironi dan keprihatinan bermunculan, tetapi tidak juga muncul lompatan berarti untuk membenahinya. Kuasa politik dan ekonomi tengah mengalami krisis legitimasi, mempertontonkan ketidakberesan pada berbagai bentuk.

Tidak mungkin berharap krisis legitimasi segera dibenahi hanya sekadar menunggu penguasa itu sadar atas kesalahannya. Kecuali jika rakyat secara cerdas dan berani memaksa mereka untuk berubah, memperbaiki keadaan.

REPUBLIKA, 7 Februari 2012

5. Politik BBM

Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini mengundang pro kontra. Di satu sisi, pemerintah merasa sedotan dana dari APBN untuk menyubsidi BBM begitu berat, dengan pertimbangan keterbatasan keuangan negara beriringan dengan naiknya harga minyak dunia. Di sisi lain, sebagian besar yang menolak merasa, implikasi pencabutan subsidi BBM jelas akan berefek domino.

Berdasarkan pengalaman sejauh ini, hal itu akan memicu meningkatnya harga-harga terutama bahan pokok (makanan, minyak, gula, dan seterusnya) yang tak terbendung dan gagal dikendalikan. Bagi orang kaya, kenaikan BBM dapat diatasi dengan mengurangi konsumsi sebagai opsi realistis. Tetapi bagi orang miskin yang opsinya terbatas, maka kenaikan harga BBM dan harga bahan pokok pasti menjadi pukulan telak, karena sumber daya mereka terbatas.

Jika kita lihat problem makro, khususnya di Indonesia, betapapun resesi dunia dan fluktuasi harga minyak yang terjadi begitu dinamis tetapi pemerintah kurang mampu membuat langkah-langkah strategis merombak tata kelola BBM. Sebagaimana menjadi rahasia umum, betapa praktik buruk kelola minyak mengarah pada mafia atau sindikat, bahkan bukan mustahil belitan korupsi mengitarinya.

Persekongkolan antar pengusaha minyak dengan oknum pemerintah serta aparat hukum dengan memanfaatkan lemahkan negara dan perangkat hukum yang memilarinya, telah menjadi indikasi betapa kendali kebijakan minyak dioperatori sistem konspiratif untuk menggerogoti otoritas kebijakan APBN.

Jika pemerintah mampu membongkar struktur manipulatif tata kelola minyak itu, kemudian mereformasinya dengan landasan prinsip

transparansi dan akuntabilitas berorientasi prioritas peruntukan untuk masyarakat kebanyakan, maka jebolnya APBN untuk menyubsidi BBM bisa diatasi. Itikad pemerintahan SBY untuk mereformasi birokrasi, terutama soal manajemen minyak, belum menunjukkan keseriusan yang memungkinkan membuat terobosan baru selain mengurangi subsidi.

Selebihnya, rencana kenaikan harga BBM yang dikompensasi dengan pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) bukan langkah yang tepat. Betapapun disebut sementara, namun pengalaman sebelumnya dengan argumen yang sama penerapan bantuan langsung tunai (BLT) masa lalu ternyata tidak efektif. Selain bantuan tersebut ibaratnya seperti 'balsem' pengobat sementara untuk menahan rasa sakit, *toh* itu tidak akan menyembuhkan sakit karena akar masalah bukan pada itu.

Sekali lagi, pemerintah tidak mampu mengendalikan dampak lanjutan kenaikan harga barang yang membebani masyarakat di kemudian hari. Apalagi, kebijakan BLM yang dulu ditandai oleh sistem implementasi atau penyaluran dana BLM yang buruk dan manipulatif, melahirkan reaksi balik timbulnya masalah pertengkaran di masyarakat. Dengan demikian, nalar berfikir yang keliru dengan skema kebijakan yang tidak tepat, tak ayal akan memunculkan masalah yang berangkai.

Pelajaran berharga tersebut seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil langkah mengatasi problem BBM. Saya memprediksi, politik kebijakan menaikkan BBM terlalu berisiko menggoncang struktur sosial dan gejolak politik, yang jika tidak diantisipasi akan menciptakan masalah yang membelit pemerintahan SBY.

Upaya mengurangi beban APBN jangan sampai justru dialihkan menjadi beban masyarakat, tetapi sebaiknya prioritaskan dulu memperbaiki tata kelola minyak dari beragam tindakan manipulasi dan sindikat penggerogot keuangan negara.

REPUBLIKA, 13 Maret 2012

6. Politik Penghematan

Dalam pidatonya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/5/2012), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan lima kebijakan penghematan BBM dan listrik secara nasional. Menurut SBY, secara khusus hal itu untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

Jika cara lain dilakukan banyak negara yaitu menaikkan harga BBM dan TDL (tarif dasar listrik), maka kenaikan itu tidak dilakukan oleh SBY terutama setelah sekian rentang resistensi dari berbagai pihak. Menurutnya, gerakan penghematan besar-besaran harus dilakukan serius agar APBN aman.

SBY menyerukan lima gerakan penghematan, di antaranya pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU, dengan kemajuan teknologi yang sudah ada. Setiap kendaraan akan didata elektronik. Pemerintah melarang BBM subsidi untuk kendaraan pemerintah dan BUMN, dengan stiker khusus bagi kendaraan yang dilarang.

Seruan penghematan listrik dan air di kantor-kantor pemerintahan BUMN dan BUMD serta penerangan jalan yang diberlakukan Juni 2012. Demikian pula, pemerintah juga melarang BBM subsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan dengan stiker. Selebihnya akan dilakukan konversi BBM ke BBG untuk transportasi. Pengalihan ini menjadi program utama nasional sebagai upaya mengurangi ketergantungan BBM.

Pertanyaannya, apakah politik penghematan itu menjadi pintu masuk untuk mengatasi krisis 'manajemen' energi dan mempertimbangkan konsep reformasi tata kelola BBM? Secara substansi, seruan tersebut punya makna positif, sekalipun masih normatif.

Perlu disadari, upaya mengatasi masalah energi dan minyak di Indonesia, saat ini dan di masa mendatang memang krusial. Presiden bisa berargumen soal perlunya mencari jalan keluar mengatasi beban berat APBN karena tersedot untuk subsidi BBM, di mana kalkulasi 'teknokratik' ekonomi semacam itu wajar dikemukakan sebagai pengelola anggaran.

Namun, hal itu tidak bisa dilepaskan perlunya menata ulang kebijakan penghematan BBM dan APBN dalam skema mengatasi buruknya manajamen sumber daya energi di Indonesia. Terutama terkait dengan memberantas ragam penyalahgunaan, penyelundupan, serta penimbunan BBM yang rata-rata bersumber karena lemahnya penegakan hukum.

Pengalaman sejauh ini menunjukkan, integritas pemerintah di level nasional dan daerah dalam mengawal kebijakan yang dibuatnya sendiri makin jeblok, karena kurang berhasilnya skema reformasi birokrasi untuk menjaga konsistensi kebijakan, apapun. Pola pengawasan distribusi BBM, penyaluran subsidi, serta pemanfaatan energi alternatif cenderung 'gembos' di tengah jalan. Normatif di atas kertas, begitu meyakinkan dipidatokan, tetapi implementasi kedodoran.

Selain karena aparat biokrasi dan hukum kurang kredibel, juga legitimasi suatu kebijakan begitu minim. Tidak heran jika sebagian masyarakat pun merasa problem tersebut terbaca sebagai 'permainan pasar dan aparat negara'. Itulah merupakan bagian rantai ketidakpastian mengelola energi dengan segala dampaknya.

Seruan SBY ini, jika ingin efektif dan menjadi bagian kerangka membangun harapan baru untuk masa depan energi di Indonesia, maka harus ditopang keseriusan komitmen pemerintah di semua lini dalam implementasi kebijakan.

REPUBLIKA, 5 Juni 2012

7. Menggoreng Berita

Dalam pekan terakhir ini, para pejabat dan mantan penguasa sedang gerah terkait pemberitaan media massa. Pemberitaan di dua harian Australia, *The Sydney Morning Herald* dan *The Age* terkait kawat diplomatik yang dibocorkan WikiLeaks membuat para politisi risau. Di situ beberapa nama tokoh disebut seperti SBY, Ny Ani Yudhoyono, Jusuf Kalla, Taufik Kiemas, Agung Laksono, Hendarman Supanji, dan nama lain yang sebagian besar isinya dianggap kontroversi.

Berita ini melahirkan gugusan spekulasi, karena mudah 'digoreng' menjadi bagian perdebatan saat situasi politik Indonesia yang mengalami gelombang isu yang mudah meningkat akibat informasi tersebut. Lepas dari benar atau tidaknya berita itu, dapat disimpulkan bahwa media massa berperan sentral memengaruhi manajemen dan arah isu nasional.

Semenjak era reformasi, posisi media massa begitu 'menentukan' dinamika politik Indonesia. Kebebasan media massa memang dianggap sebagai indikator demokrasi bekerja. Di situlah publik dijamin kebebasannya mendapatkan, menyebar, dan mencari informasi berdasarkan konstitusi. Dalam praktiknya, secara prosedur kebebasan informasi dikerangkai melalui peraturan perundangan, dijalankan melalui mekanisme yang sifatnya terukur, agar setiap kegiatan informasi dapat dipertanggung jawabkan.

Prosedural itu harus dijiwai kematangan sikap dan mental siapa pun, etika sosial yang beradab agar kebebasan informasi bermakna mencerdaskan atau mencerahkan bagi publik. Siapapun itu, tidak pandang bulu memiliki hak dan tanggung jawab proporsional diatur konstitusi dengan landasan nilai-nilai etis.

Goncangan dari WikiLeaks ini pernah dialami oleh Amerika Serikat (AS) beberapa bulan lalu, yang juga melahirkan kontroversi. Pembocoran informasi-informasi yang sebenarnya dianggap 'super rahasia' karena status dokumen AS saat itu, tentu membuat geram. Bahkan langkah hukum dan politik kini juga sedang berproses di sana. Begitupun, yang dialami Indonesia kini dengan modus yang hampir mirip.

Para elit politik Indonesia jelas kena dampaknya. Dokumen itu sebenarnya bagian dari konstruksi 'kawat diplomatik', hasil olah pembicaraan (formal maupun informal) yang belum tentu dimaknai sebagai fakta. Berbasis tafsir sosial, sebenarnya rumor, isu, atau informasi yang bertebaran dapat dikatagorikan sebagai data.

Namun, data-data tersebut belum tentu berisi fakta otentik yang telah teruji kebenarannya secara empirik. Bisa jadi sekadar opini, atau pendapat bebas yang muncul dari siapapun. Karena itulah, soal benar tidaknya suatu berita sangat dipengaruhi oleh sudut pandang dan posisi memahami informasi itu. Di sinilah pertaruhan integritas seseorang atau pelaku penyebar informasi serta aktor-aktor yang tersebut atas pemberitaan yang disebarkan kepada publik.

Berkait dengan itu, perdebatan sebenarnya perlu diarahkan bukan semata pada apa saja isi berita itu. Namun yang lebih penting adalah, bagaimana berita itu muncul pada konteks seperti apa, berproses dengan cara apa, serta seberapa besar derajat kebenarannya di mata publik atau khususnya orang-orang yang disebutkan dalam berita.

Secara kontekstual, kebebasan informasi di Indonesia saat ini dalam tahap upaya menemukan pola. Perlu dipahami, bahwa situasi sosial dan konfigurasi politik yang diliputi 'ketegangan' kepentingan, nyaris diwarnai gelombang *distrust* antar pihak. Wajar saja jika kecenderungan gumpalan spekulasi kian menguat, membuat saling tuding dan curiga. Betapapun materi data itu belum memiliki kelayakan kebenarannya, tetapi sebagian besar masyarakat politik (elit) telanjur terbangun *mind set* yang membuat mereka mudah mengolahnya sebagai bahan menyerang kelompok lain.

Kali ini kebetulan saja yang dilansir oleh *The Sydney Morning Herald* dan *The Age* begitu banyak tokoh. Tidak saja yang tengah berkuasa

tetapi juga yang oposisi, pejabat maupun mantan penjabat. Sehingga, upaya "menggoreng" informasi tidak leluasa untuk dijadikan amunisi seseorang untuk menyerang yang lain. Karena bisa jadi bumerang.

Peristiwa ini hendaknya menjadi bahan refleksi untuk siapapun. Tantangan yang perlu diatasi adalah perlunya terus membangun ruang-ruang perdebatan nalar yang argumentatif, sehingga setiap berita dan informasi tidak sekadar menjadi jebakan saling tuding yang memojokkan. Sebaliknya justru mampu menciptakan kematangan bersikap.

Memang kita harus merespon berita itu, tetapi tidak perlu bereaksi berlebihan diluar nalar sehat. Jika memang berita itu tidak benar, abaikan saja atau kalau perlu diproses secara hukum jika dirasa menggangu kepentingan seseorang atau publik. Namun, jika berita itu benar, harus dijadikan bahan kritik dalam mengisi proses berdemokrasi dan kebebasan media massa.

REPUBLIKA, 15 Maret 2011

8. Sengketa dengan Malaysia

Ketegangan Indonesia dengan negara tetangga, Malaysia, hal yang sering dan terus terjadi. Sejak zaman Soekarno ancaman perang selalu berkobar, hingga kini di era pemerintahan SBY. Urusan perbatasan dan klaim teritorial, hak paten produk budaya, maupun masalah perlakuan tenaga kerja selalu menjadi daya ungkit perselisihan Indonesia dengan Negeri Jiran yang masih serumpun dalam kultur melayu ini.

Memanasnya relasi kedua negara yang terjadi akhir-akhir ini dipicu soal penangkapan tiga pengawas kelautan dan perikanan RI oleh polisi Diraja Malaysia di perairan Tanjung Berakit, lalu disekap di Johor. Penangkapan itu karuan saja melahirkan kegusaran dan kemarahan banyak pihak. Sentimen anti Malaysia yang pernah bangkit dulu, dengan cepat dimunculkan dan memanas kembali.

Bahkan, DPR juga secara provokatif mendorong agar pemerintah segera berindak tegas, atas nama harga diri dan kedaulatan bangsa. Lagi-lagi, SBY dinilai lambat dan tidak berani melawan. Api sengketa ini makin membara, saat merebaknya aksi demonstrasi di Jakarta dan beberapa daerah.

Misalnya saja sekelompok masyarakat yang tergabung 'Bendera' unjuk gigi di kedutaan Malaysia di Indonesia. Secara teatrikal mereka membakar bendera Malaysia, bahkan dituding melempar kotoran ke kantor kedutaan. Pemerintah Malaysiapun juga meradang. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak, dengan berang menilai demonstrasi di kedutaan Malaysia di Indonesia sudah keterlaluan dan harus ditindak untuk menjaga psikologi warga Malaysia.

Betapapun klaim politik batas teritorial bahwa Indonesia berposisi benar berdasar hukum Internasional, kemudian memiliki alasan

cukup kuat untuk 'menyerang' Malaysia, *toh* pemerintah Indonesia merasa dalam posisi dilematik. Betapa tidak. Jika kobaran konflik ini gagal mencapai kesepakatan melalui jalur *soft diplomatic*, kemudian memutuskan perang, tentu dihadapkan kenyataan yang tidak mudah. Mengapa? Hal ini soal kaitan ekonomi dan relasi sosial Indonesia dengan Malaysia yang beririsan dan ketergantungan.

Sampai saat ini, jumlah warga Indonesia yang bekerja mengais rejeki sebagai tenaga kerja (TKI) di Malaysia begitu banyak. Aliran penduduk Indonesia yang nekat bekerja karena struktur ekonomi di Malaysia dianggap menjanjikan, dibanding di Indonesia. Betapapun para TKI di Malaysia itu kadang diperlakukan semena-mena oleh pasukan "rela", milisi yang bertindak bengis, *toh* mereka tetap saja secara bergantian mencari penghidupan ekonomi di Malaysia.

Bahkan isu paling mutakhir dan sekaligus memprihatinkan adalah, banyaknnya warga Indonesia yang terancam hukuman mati di Malaysia dengan segala kasus yang dihadapinya. Wajar jika akhirnya SBY pusing tujuh keliling, sangat hati-hati dan terkesan lambat. Tentu berbeda di zaman Soekarno. Keberanian Soekarno kala itu untuk menyerang Malaysia, karena kenyataan memang belum ada interseksi dan ketergantungan sosial ekonomi yang begitu kuat Indonesia pada Negeri Jiran ini.

Selain karena lingkungan dan model diplomasi Internasional masih bersifat keras, juga pada awal-awal kemerdekaan itu integrasi nasional sedang dirintis, wajar saja pertarungan dan sikap keras dibutuhkan. Kasus kali ini hendaknya menjadi bahan refleksi buat pemerintah Indonesia. Bagaimanapun, suatu negara yang secara ekonomi tidak mampu mandiri, maka konflik politik dan soal kedaulatan cenderung dialirkan pada kompromi yang kadang tidak menguntungkan.

Indonesia menghadapi risiko yang berkepanjangan jika tidak segera membuat terobosan baru kebijakan dimasa-masa mendatang. Tata kelola kekayaan sumberdaya alam dan ekonomi politik yang tidak mampu menciptakan struktur kemandirian, maka secara bertahap pula kedaulatan makin digerus.

Karena itulah, menyangkut urusan konflik Indonesia dengan Malaysia kali ini, tentu tak sekadar memilih jalan perang atau damai yang

sifatnya sementara. Akan tetapi, secara fundamental perlu membuat *road map* visi kemandirian bangsa dalam kebijakan ekonomi politik, agar kedaulatan dan integrasi nasional secara nyata terwujud tidak diganggu oleh negara lain, yang dipicu oleh kasus-kasus apapun.

REPUBLIKA, 31 Agustus 2010

BAGIAN VII

Akrobat Sang Politisi

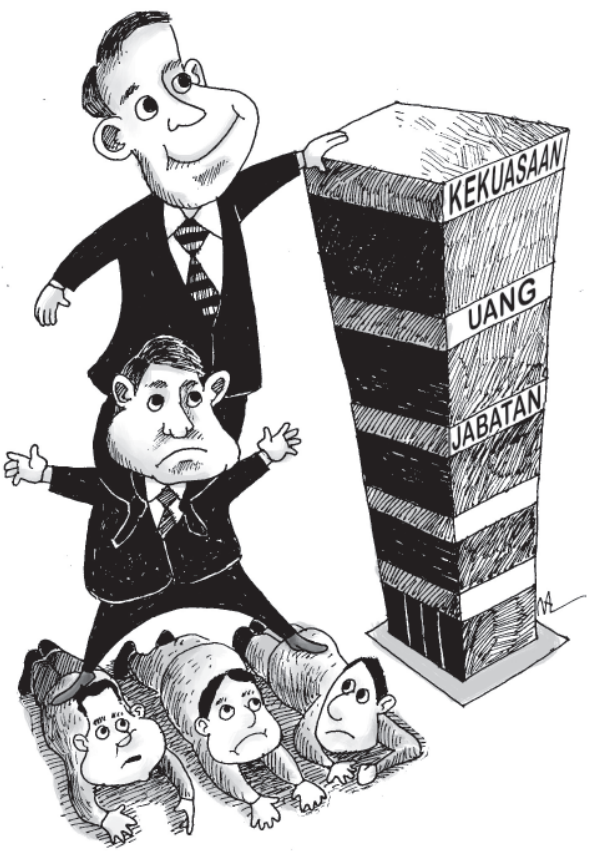

I. Politikus Muda

Sebuah hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survey Indonesia (LSI) menyebutkan bahwa, politikus muda masih mengecewakan publik, karena belum mampu menghasilkan perubahan yang berarti. Menurut survei itu, ada empat faktor penyebab kekecewaan tersebut; *pertama* banyaknya kasus korupsi yang melibatkan nama-nama politikus muda. *Kedua*, prestasi politikus muda memanfaatkan jabatan strategis ternyata tidak istimewa, hampir sama dengan politikus lainnya. *Ketiga*, politikus muda ternyata tidak memiliki pengalaman berpolitik yang memadai, cenderung terjebak kesalahan langkah. *Keempat*, masih lemahnya daya dukung politikus muda untuk menjadi puncak kepemimpinan, yakni presiden (*Republika,* 31/10/2011).

Peluang yang diambil politikus muda berkiprah pada arena politik memang begitu besar semenjak kran demokratisasi dibuka, era berakhirnya rezim otoriter. Mobilitas mereka begitu cepat, di mana reformasi memberi kesempatan tampilnya kaum muda memasuki panggung politik formal dan kepemimpinan di organisasi kemasyarakatan pada berbagai bidang. Golongan muda dengan spektrum yang berwarna begitu gairah memanfaatkan 'jabatan politik' pada lini-lini kekuasaan.

Perseberangan makna soal pemanfaatan politik di mata politikus muda kala itu juga terjadi. Di satu sisi, ada yang beranggapan bahwa politik di zaman demokratisasi dapat diistilahkan sebagai medan tempur perjuangan menjalani dan mengekspresikan komitmen nilai atau moralitas demi mengubah keadaan menuju yang lebih baik. Namun demikian, ada juga yang justru memanfaatkan politik dan kekuasaan sekadar lahan basah mencari akses ekonomi dan status sosial, hasrat pragmatis.

Hasil survei LSI itu tidak mengejutkan. Kita perlu kaitkan mengenai faktor penilaian publik atas politikus muda itu dengan latar belakang, serta kecenderungan sistem kekuasaan yang membentuk perilaku politikus muda itu. Rata-rata mereka saat ini masuk perangkap pragmatisme, meskipun ada juga politikus muda yang masih menjaga konsistensi perjuangan nilai dan komitmen pemihakan berdasar idealisme. Tetapi golongan idealis ini jumlahnya sangat terbatas.

Para politisi yang secara biologis digolongkan muda atau oleh publik dimengerti sebagai berpenampilan muda, tentu begitu beragam latar belakang pendidikan, pengalaman, komitmen serta orientasinya. Ada politikus yang dulunya mantan aktivis mahasiswa, berbekal *leadership* memadai saat berorganisasi di kampus kemudian diterapkannya dalam politik praktis. Ada juga golongan yang sebelum meniti karir politik profesinya adalah pengusaha, pengalaman bisnis atau kegiatan ekonomi dipakai sebagai modal meraih kuasa.

Namun tidak dipungkiri pula, ada banyak anak muda terjun berpolitik hanya bermodal 'profesi artis' karena populeritasnya. Bahkan, hanya mengandalkan diri sebagai anak pejabat karena memiliki jaringan (koneksi) melalui cara kolusi orang tuanya yang berhasil dikapitalisasi demi meraih posisi strategis. Begitu banyak macamnya model politikus muda ini.

Politikus muda harus berefleksi, dan berbenah diri. Ke depan hendaknya memperkuat kembali legitimasi dan daya dukung dari publik, dengan cara mengembaikan pada mandat utama dirinya sebagai politisi. Baik di parlemen maupun eksekutif, nasional maupun lokal. Bagaimanapun juga integritas politikus muda 'sebagai golongan terpelajar' senantiasa dipertaruhkan.

Meskipun kecewa, perlu diyakini bahwa publik masih berharap agar politikus muda menjadi motor perubahan untuk kebaikan Indonesia. Selain itu masyarakat juga dituntut tetap mengontrol mereka secara aktif. Di satu sisi, publik mengingatkan secara kritis politikus muda, sementara disisi lain juga memberi dukungan atas kiprah positifnya.

REPUBLIKA, 1 November 2011

2. Capres Independen

Usulan calon independen pada skema pemilihan presiden dan wapres telah melahirkan perdebatan. Wacana ini sebelumnya muncul dalam draft usulan perubahan kelima UUD 1945 oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pasal 6A bagian kedua disebutkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden berasal dari usulan partai peserta pemilihan umum atau perseorangan.

Sebagian besar reaksi negatif berasal dari parpol. Wajar jika parpol relatif menentang, karena bagi mereka jalur pintu masuk 'grup non-parpol' dalam pilpres ini jelas akan menjadi saingan baru arena pemilu presiden yang selama ini dimonopoli parpol.

Secara substansi, menyeruaknya wacana ini merupakan wujud dari tekanan publik pada parpol agar mereformasi dirinya. Kalau parpol tidak mereformasi diri, maka akan muncul kekesalan masyarakt sipil, dengan segala kecenderungan praktik oligarki. Beragam kritik tajam yang dialamatkan pada lembaga politik yang memiliki otoritas mengisi parlemen tersebut tidak mendapatkan tanggapan serius. Pada sisi yang berbeda usulan calon independen juga bagian dari respon balik dari parpol kecil yang semakin disisihkan oleh manuver parpol besar dengan naiknya *parliamentary threshold* (PT).

Berbasis pengalaman dan audit demokrasi, pada penyelenggaraan pemilu nampak sekali parpol hanyalah berfungsi seperti administrasi politik. Ibaratnya, parpol sebagai lembaga tempat membeli tiket bagi pasangan yang akan maju dalam pemilu presiden (juga terjadi dalam pemilukada). Padahal, justru dalam proses administrasi politik yang dimonopoli parpol itulah rentan terjadinya transaksi dan manuver-manuver pragmatis, sehingga berlangsung permainan berisiko penyedotan politik biaya tinggi dalam pilpres.

Bisa diprediksikan, jika parpol sudah berjalan baik, maka tuntutan capres independen tidak akan muncul. Karena telah terbangun kembali *trust* maka pengusulan capres dengan sendirinya melalui parpol. Dilandasi konteks semacam itu, gagasan calon independen dapat dimaknai untuk pembelajaran politik. Parpol selama ini begitu congkak merasa paling berhak dan memonopoli otoritas pembentukan kekuasaan, padahal fungsi dirinya sebagai lembaga representasi tidak terbukti dengan baik.

Sebagai catatan, betapapun calon independen ini dianggap 'pengimbang politik' monopoli parpol, langkah jalur calon independen belum tentu mudah dalam menjalani kompeti merebut suara pemilih. Mengapa? Lantaran pendidikan politik bagi konstituen atau masyarakat pemilih di negeri ini belum berlangsung baik. Apalagi ikatan kewargaan dalam orientasi politik juga belum kuat, dimana kesadaran warga menggunakan hak-haknya dalam mempengaruhi kebijakan dan rotasi kekuasaan belum menggunakan ukuran-ukuran rasionalitas nilai.

Situasi pragmatisme dan lingkungan politik ditandai adanya biaya-biaya pembelian suara menyedot begitu banyak uang saat kampanye. Dengan begitu, sekalipun usulan calon independen dimaknai pengimbang parpol, tantangannya adalah mengatasi lingkungan, struktur, dan budaya politik transaksional yang masih dialami saat ini.

Masa depan demokrasi Indonesia memang terus diuji. Berbagai koreksi atau pembenahan kebijakan, regulasi sistem pemilu dan kepartaian terus dilakukan. Harapannya, kian meningkatkan kualitas politik dan demokrasi Indonesia. Lepas dari segala kelebihan dan kelemahan jalur calon independen capres, debat ini semestinya dipahami secara utuh untuk mendorong reformasi parpol.

Sinyal-sinyal teguran pada parpol tersebut jika mendapatkan tanggapan konstruktif dalam wujud pembenahan strategi pendidikan politik oleh parpol, maka derajat legitimasi dan daya dukung masyarakat pada parpol semakin meningkat. Namun sebaliknya, jika kemerosotan kualitas berpolitik terus berlangsung dampaknya bisa melahirkan apatisme. Itulah tantangan jangka panjang yang harus dijawab dibalik perdebatan capres independen.

REPUBLIKA, 29 Maret 2011

3. Pasca Pemilukada

Akhirnya, pemilukada di 3 kabupaten, yakni Sleman, Bantul, dan Gunungkidul telah berhasil dilangsungkan pada 23 Mei lalu. Secara umum berlangsung damai, tidak ada kericuhan. Meskipun sambil menunggu proses berakhirnya pWenghitungan dan penetapan hasil oleh KPUD, semua telah terlihat komposisi perolehan suara.

Di Sleman suara terbanyak diraih pasangan Sri Purnomo dan Yuni Satia, lalu Bantul pasangan Ida-Sumarno, serta di Gunung Kidul Sumpeno-Badingah. Peta kemenangan ini sebenarnya tidak jauh dari perkiraan banyak orang. Karena kandidat yang mengantongi suara besar yang nantinya menjuarai pertarungan, rata-rata tokoh populer di daerahnya karena posisinya sebagai petahana (*incumbent)*.

Pemenang dari ketiga daerah itu, semuanya pernah menduduki posisi sebagai wakil bupati 2005-2010, yang akhirnya maju dengan posisi yang naik menjadi Bupati (Sleman) dan ada yang tetap sebagai wakil bupati (Bantul dan Gunung Kidul). Di Sleman, Sri Purnomo telah merintis popularitas selama 5 tahun karena posisinya wakil bupati saat berpasangan dengan Ibnu Subiyanto.

Terjeratnya kasus korupsi Bupati Ibnu, memberi kesempatan Sri Purnomo untuk menyelesaikan jabatannya pada pertengahan 2009 sampai pertengahan 2010 ini. Sementara di Bantul, Ida Idham Samawi adalah istri dari Bupati lama yakni Idham Samawi, dan Sumarno adalah wakil bupati yang telah menjabat 2005-2010. Dulu mendampingi Idham, kini mendampingi Ida.

Untuk Gunungkidul, betapapun Sumpeno merupakan pendatang baru dalam blantika *local electoral*, namun pasangan wakilnya, Badingah, adalah wakil bupati yang begitu populer saat men-

dampingi Suharto pada periode 2005-2010. Usainya pemilukada, berarti mengakhiri spekulasi dan ketegangan yang selama ini telah berlangsung. Pertarungan politik yang telah menyedot energi begitu besar di antara kandidat tersebut, yang dihadapkan situasi gelombang pragmatisme politik, tentu melelahkan kontestan.

Baik yang menang maupun kalah, pasti menghabiskan dana begitu besar. Politik biaya tinggi memang luar biasa. Sulit membangun argumen mengenai dorongan dan hasrat sang kandidat untuk berani menghamburkan uang bermiliar-miliyar demi membiayai kampanye mereka. Padahal, apakah gaji jabatan bupati jika benar-benar sesuai koridor dan normanya akan sebanding dengan pengeluaran yang telah mereka lakukan selama kampanye? Kita tidak tau persis kalkulasi ini,karena faktanya begitu banyak "kaum berduit" berlomba merebut kuasa.

Apapun yang terjadi, saatnya berfikir ke depan. Pasca pemilukada, berarti fase untuk memulai babak baru jalannya kekuasaan lokal oleh bupati dan wakil bupati terpilih. Betapapun demokratisasi selama berlangsungnya pemilukada lalu senantiasa diliputi keraguan karena proses yang tidak sempurna, tentu tugas yang harus dihadapi adalah memastikan kekuasaan itu betul-betul amanah dan akuntabel. Itu yang bisa dilakukan, untuk membendung gelombang baru pesimisme demokratisasi lokal.

Janji-janji yang telah ditebar oleh kandidat terpilih selama masa kampanye dan ragam catatan yang direkam oleh publik melalui berbagai media dan forum kampaye, sudah saatnya dibuktikan. Tugas penguasa baru adalah, membuat langkah-langkah strategis pembuktian janji untuk kurun waktu 5 tahun kedepan. Tujuannya, agar kepercayaan yang diberikan pemilih ini mengandung makna positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat secara luas.

Sementara para pemilih dan masyarakat yang memiliki hak sebagai warga negara sesuai konstitusi juga tidak boleh tinggal diam. Kekuasaan yang baik dan mampu menjalankan mandat tidak mungkin ditunggu-tunggu, namun membutuhkan langkah-langkah pro-aktif, sikap kritis dengan mengontrol jalannya kekuasaan itu.

Peran parlemen lokal, yang dulunya sebagai penyokong kekuasaan selama kampanye, harus berubah menjadi peran kontrol. Ka-

rena *toh* di antara tugas parlemen itu adalah mengontrol jalannya kekuasaan untuk memastikan agar kekuasaan berjalan pada *on the right track*, selain fungsi legislasi dan *budgeting* yang melekat pada parlemen. Perimbangan kekuasaan dalam skema *check and balances*, membutuhkan kepiawaian dan komitmen, agar akuntabilitas pemerintahan daerah diwujudkan.

Pertarungan sudah usai. Kita selalu diingatkan, '*menang ora umuk, kalah ora ngamuk*', agar energi ditumpahkan pada tugas dan agenda baru, membuktikan agar demokratisasi berhasil mencapai tujuan menyejahterakan masyarakat. Babak baru selanjutnya dimulai, mampukah para kandidat terpilih yang nantinya menjadi penguasa untuk kurun waktu 2010-2015 ini mengubah keadaan daerah menjadi lebih baik? Sejarah yang akan membuktikan.

REPUBLIKA, 25 Mei 2010

4. Politik Pilrek

Universitas Gadjah Mada (UGM) sedang punya hajatan pemilihan rektor (Pilrek) baru, untuk periode 2012-2017. Sebagai universitas nasional, peristiwa ini tentu menjadi sorotan publik. Memang kali ini agak istimewa. Selain posisi transisional dari Badan Hukum Milik Negara (BHMN) menjadi badan layanan umum (BLU), proses dan tahapan awal juga ditandai kontroversi kebijakan pengaturan oleh majelis wali amanah (MWA). Apalagi dinamika persaingan antar kandidat begitu seru.

Para pemilih terbagi dalam tiga blok, yakni para anggota senat akademik (SA) dengan masing-masing mereka memiliki tiga suara, lalu majelis guru besar (MGB) yang tiap anggotanya memiliki satu suara. Hasil pemilihan gabungan antara SA dan MGB dalam dua tahapan kemudian menghasilkan tiga nama dengan peringkat berdasarkan perolehan suara, lalu diajukan ke MWA sebagai institusi penentu memilih satu di antara tiga kandidat yang ada.

Kelangsungan Pilrek juga tidak luput dari aroma intrik dan propaganda yang berseliweran mengiringi gerak demokratisasi kampus. Kemeriahan Pilrek kali ini, pada mulanya dibayangkan sebagai arena pertarungan ide dan progam sebagai titik penentu dalam pertimbangan rasional seseorang menjadi nahkoda UGM. Apalagi, kita berkeyakinan bahwa komunitas intelektual bertarung tentu secara elegan.

Namun, tidak semua persaingan di kampus didominasi warna bercorak pertarungan gagasan atau ide. Ternyata urusan blok-blok politik berbasis aliran (agama, etnik dan haluan identitas), kelompok pertemanan, sentimen fakultas, serta patronase grup, tidak absen dari elektoral para bangsawan kampus. Memang tidak sepenuhnya keliru, atau sekadar disalahkan. Tetapi, jika pertarungan itu condong

mengarah pada gesekan dan *black* propaganda, membumbungkan nafsu kuasa dengan memperlemah nalar akademik, fenomena itu menjadi aneh dan mungkin kurang mengenakkan dirasa.

Sebaran pesan singkat (SMS) lewat *hand phone*, kasak-kusuk dan geliat manuver yang 'mengada-ada', bahkan dapat disebut sebagai info palsu, terasa mengganggu orientasi membangun visi dan nilai dalam Pilrek ini. Mungkin ini bagian ekspresi politik, tertular dari pola persaingan pemilihan umum, atau pemilu umum kepala daerah (Pemilukada).

Peristiwa semacam ini, barangkali tidak hanya terjadi di UGM, tetapi kemungkinan kampus lain juga mengalami hal yang sama. Corak politik 'komunal' dalam institusi kampus masih berlangsung sekalipun dalam kadar yang tidak sebesar Pemilukada. Betapapun demokratisasi telah menjadi cara ampuh membangun kepemimpinan, gerak sektarianisme selalu melintas dan membayangi. Sekalipun dikritik tetapi toh dihampiri pula. Tetapi kita yakin, para pemilih adalah figur terhormat dan mampu berfikir jernih serta rasional.

Lepas dari pernik dan dinamika proses Pilrek semacam itu, UGM tetap membutuhkan figur pemimpin terpilih yang benar-benar kredibel. Adalah sosok cerdas, berkomitmen pada kepentingan rakyat, serta memiliki integritas dan dedikasi akademik dan sosial bagi kemajuan bangsa.

Di situlah, harapannya Rektor terpilih mampu membuat terobosan baru, mengejawantahkan cita-cita nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanggung jawab terpenting UGM sebagai lembaga pendidikan yang dikenal dengan konstruksi 'kerakyatan' dan berjiwa nasional adalah, bagaimana mampu mentransformasi perannya sebagai pelopor pembaharuan dengan peran strategis di level lokal, nasional, serta kancah internasional.

REPUBLIKA, 20 Maret 2012

5. Demam *Voting*

Demam kontestasi dan politik *voting* telah melanda masyarakat. Gejala ini ditandai oleh kecenderungan pada tiap pengisian jabatan, posisi apapun dalam organisasi atau lembaga ditandai oleh pemungutan suara. Mulai dari tradisi di lembaga formal sampai informal, atau lembaga publik bahkan juga lembaga-lembaga privat.

Sebutlah misalnya pemilihan ketua rukun tetangga (RT), kepala dusun, kepala desa, bupati, gubernur, sampai presiden. Begitu pula memilih direktur pada organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan, koordinator panitia lomba di kampung, serta maraknya *voting* untuk dukungan pengembangan bakat menyanyi seperti Indonesia Idol, dan seterusnya.

Menjalar dan menularnya tradisi *voting* ini kian terasa terutama semenjak meningkatnya gelombang partisipasi warga yang didasari oleh keyakinan berdemokrasi ditandai oleh kompetisi melalui pemungutan suara. Merujuk pemahaman sederhana mengenai praktik berdemokrasi, *voting* memang cara paling sederhana dan mudah dalam mengambil keputusan. Makna utama *voting* melekat dalam tradisi dialog, bermusywarah untuk mencapai konsensus.

Namun dalam perkembangan sejumlah kasus, *voting* ternyata mengalami penyempitan makna, bahkan dimanipulasi sehingga mengurangi nilai berdemokrasi itu sendiri. Pertama, pengambilan keputusan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai pengejawantahan persamaan hak bersuara mengandaikan adanya kesamaan pemahaman dan kapasitas. Kenyataannya, *voting* seringkali terdistorsi karena ketimpangan kemampuan antarpihak terkait pemilihan informasi, kualitas kesadaran, dan substansi dalam sebuah keputusan.

Pada sebuah keputusan dengan situasi timpang, maka kemungkinan menghasilkan ketidakadilan baru.

Kedua, *voting* kadang digerakkan oleh nalar pragmatis, yakni mengambil keputusan yang dibatasi sekadar berorientasi hasil tanpa diimbangi proses yang elegan dan fair. Situasi ini menyuburkan pola manipulasi atas *voting* dengan perilaku suap, misalnya menggunakan uang dengan memanfaatkan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pihak-pihak yang terlibat.

Banyak kasus maraknya *money politic* dalam peristiwa Pemilu misalnya, terus berlangsung dan dianggap hal lumrah, ditoleransi sebagai hal biasa. Padahal, suap-menyuap menggunakan uang untuk mendapat dukungan melalui *voting* jelas merugikan demokrasi. Itulah konteks yang melandasi pola *high cost politic*.

Ketiga, *voting* sebenarnya ditempuh ketika proses bermusyawarah menghadapi kesulitan atau tidak berhasil mengambil kesepakatan. Apalagi kompleksitas masyarakat yang sulit mengambil keputusan secara langsung, di situlah *voting* merupakan pilihan penentu atau kunci pencapaian konsensus secara adil. Sayangnya, tanpa melalui berembug, berdebat, atau berdialog secara jujur dan elegan, kadang *voting* menjadi jalan pintas memotong proses permusyawaratan.

Sekalipun demokrasi mengakrabkan tradisi musyawarah dan *voting*, namun keduanya kadang tidak berjajar dan bertautan satu sama lain di saat mengambil keputusan. Inilah tantangan berdemokrasi Indonesia, yakni bagaimana kebiasaan musyawarah dan *voting* hendaknya saling mengisi, yang didasari kemampuan dan kesadaran kritis warga negara agar praktik demokrasi kian bermakna. Tidak sekadar merayakan dan meramaikan pemungutan suara tetapi ternyata kualitasnya dangkal.

REPUBLIKA, 12 Juni 2012

6. Kebohongan Publik

Pemerintahan SBY sedang risau, semenjak munculnya kritik keras para tokoh agama dengan tajuk melawan kebohongan publik. Reaksi bermunculan di sana-sini. Bermula pada Senin 10 Januari 2011 lalu, sejumlah LSM dan tokoh lintas agama, yakni Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Mgr Martinus Situmorang, Andreas Yewangoe, Buya Syafii Maarif, Franz Magnis Suseno, KH Salahuddin Wahid, dan Bhiksu Sri Pannyavaro, berkumpul di gedung dakwah PP Muhammadiyah.

Secara terbuka mereka melontarkan pernyataan sikap, bahwa Pemerintah dinilai telah melakukan banyak kebohongan publik. Para tokoh dan ativis itu mengingatkan 9 kebohongan lama pemerintah, sekaligus sembilan kebohongan baru. Atas dasar itu, mereka bertekad mencanangkan tahun 2011 sebagai tahun perlawanan terhadap kebohongan dan pengkhianatan.

Reaksi defensif pemerintah muncul atas tudingan itu. Pemerintah menampik dirinya dianggap berbohong. Dalam bahasa diplomatis, pemerintah merasa lebih bisa memahami jika dianggap gagal, dibandingkan dituduh berbohong. Tidak mengherankan jika pada Senin 17 Januari, SBY kemudian mengundang para tokoh agama, bermaksud mengklarifikasi sekaligus membangun dialog.

Bagaimanapun, para tokoh agama relatif memiliki kekuatan moral. Konstruksi yang terbangun selama ini, paling tidak, sikap para agamawan dianggap teguran moral yang keras. Kualitas kritik hampir sama dilakukan para politisi, aktivis gerakan sosial, akademisi, maupun media massa.

Namun, aspirasi tokoh-tokoh agama dianggap memiliki daya pukul 'moralitas' yang lebih besar. Konon, jika para tokoh agama mulai teriak

keras pada pemerintah, itulah ekspresi menumpuknya kejengkelan menyaksikan realitas yang tengah berlangsung selama ini.

Kondisi krisis politik dan ketegangan hampir terasa di berbagai isu dan sektor. Rata-rata, sasaran kritik ditujukan kepada para elit politik pemegang kuasa. Itu lumrah, karena merekalah yang memiliki mandat menjalankan perbaikan kehidupan dengan genggaman otoritas. Baik itu di tingkat nasional, maupun di daerah-daerah. Sasarannya bisa Presiden, anggota DPR, Kapolri, Jaksa, Hakim, para Menteri, dan seterusnya.

Dengan demikian, sikap kritis para tokoh agama dan aktivis LSM itu hendaknya dipahami sebagai seruan bersama untuk refleksi, saling mengingatkan. Lontaran kritik sebagai ekspresi gumpalan keresahan menjadi bagian kependulian diri sebagai komponen bangsa demi masa depan negeri ini.

Reaksi pemerintah tidak perlu berlebihan, apalagi sampai berang. Bagaimanapun demokrasi senantiasa membuka ruang dialog, sikap kritis untuk saling merespon atas situasi yang terjadi. Pembiasaan mengembangkan sikap kritis jauh lebih bermartabat dan elegan dibandingkan meledaknya rasa emosi dan saling marah, yang kadang berubah menjadi cara-cara kekerasan.

Ruang komunikasi publik harus terpelihara, karena disitulah tanda bekerjanya demokrasi. Jika pemerintah merasa tidak berbohong, maka, kritik itu perlu dijawab dengan data dan fakta-fakta yang konkrit yang mengindikasi kebenaran sesungguhnya.

Begitupun para tokoh agama, atau siapapun para pengkritik perlu mendudukkan porsinya secara tepat, agar setiap lontaran kritik bermakna bagi upaya membenahi keadaan. Usia yang makin bertambah demokratisasi Indonesia, hendaknya dianggap sebagai tantangan dan peluang mematangkan pemikiran dan sikap. Keterbukaan tentu menumbuhkan daya partisipasi warga dengan berbagai cara. Pemikiran kritis dan konstruktif adalah modal besar menemukan jawaban atas rangkaian problem negeri ini.

REPUBLIKA, 18 Januari 2011

7. Moralitas Politik

Dua isu yang tengah heboh dan menggoncang DPR adalah soal kontroversi pembangunan gedung, dan ulah politisi Senayan yang memutar video porno saat sidang paripurna. Rencana pembangunan gedung fasilitas para wakil rakyat muncul kontroversi karena terkait perkiraan besaran proyek yang bakal menelan dana Rp 1,3 triliun. Selain juga parlemen dituding tidak komitmen dengan problem bangsa terutama jika dikaitkan dengan problem kemiskinan yang dialami masyarakat, juga sejumlah bukti menunjukkan tunjangan hidup dan gaji para anggota dewan dinilai begitu mewah.

Belum lagi fakta mengenai tidak produktifnya mereka saat menjalankan tugas, di mana produk-produknya sebagai fungsi legislasi sangat rendah, serta bermacam manuver yang kadang membuat sinis publik. Betapapun kecaman keras masyarakat sipil sampai-sampai melakukan gugatan hukum, tetapi kehendak sebagian besar wakil rakyat itu tetap besar kian ngotot untuk meneruskan rencana pembangunan gedung mewah.

Dalam suasana politik kontroversial urusan gedung DPR, tiba-tiba muncul peristiwa baru yang menghebohkan. Seorang wartawan mengekspos hasil jepretannya berupa foto anggota dewan yang tengah memutar video porno saat sidang paripurna. Peristiwa ini ibarat sambaran petir di siang bolong. Apapun dalih dan pembelaan diri dari politisi DPR ini, tambahan isu tersebut 'tergoreng' menjadi kontroversi *hot* yang menghinggapi lembaga representasi ini.

Sejatinya moralitas dan etika sosial para wakil rakyat tengah diuji. Mengenai pembangunan gedung, tentu hal yang beralasan jika memang faktanya anggota DPR membutuhkan fasilitas untuk bekerja dan mampu

menunjang tugas-tugasnya dengan baik. Namun, bangunan tidak seharusnya mewah dengan menyedot uang triliunan rupiah.

Teriakan lantang politisi terkait situasi sosial ekonomi yang carut marut yang ditandai kemiskinan, hutang luar negeri, kesenjangan sosial, serta keterbelakangan masyarakat kebanyakan, maka pembangunan gedung mewah DPR dinilai mencederai suasana bathin masyarakat. Itulah konteks yang melandasi mengapa reaksi keras publik bermunculan.

Demikian halnya, urusan relaksasi anggota dewan sebagai manusia untuk menikmati hiburan memutar video adalah hak mereka, sebagai *privacy* yang tidak boleh diintervensi siapa pun. Akan tetapi, jika urusan privat tersebut diekspresikan saat dirinya tengah menjalani tugas kenegaraan di mana keteladanan moralitas diperlukan sebagai pengemban amanat atau pejabat negara, maka tindakan itu jelas kontra produktif.

Interpretasi moralitas pada konteks ini bukan ekspresi 'kesucian sempit', namun lebih pada makna sosial tindakan privat yang tidak pada tempatnya. Anggota DPR juga manusia, tetapi semestinya mengerti betul bagaimana mengoperasikan hasrat seksual dengan koridor etis. Sidang paripurna DPR bukan tempat yang layak untuk 'mengurai nafsu seksual', namun menjadi arena debat dan pembahasan mengenai agenda-agenda strategis bangsa.

Pelajaran penting yang bisa dikutip dari dua peristiwa itu adalah, moralitas pemimpin dan integritas politisi menjadi masalah yang patut mendapatkan perhatian untuk segera dibenahi. Sorotan publik atas ulah dan dan kelakuan 'aneh' politisi, selayaknya harus terus dilakukan masyarakat atau publik secara umum. Dorongan mereformasi lembaga representasi ini ke depan agar terus dilakukan, paling tidak demi menjaga integritas dan moralitas sang penguasa untuk menciptakan keteladanan.

REPUBLIKA, 12 April 2011

BAGIAN VIII

RUUK DIY
Dalam Kontroversi

I. Referendum Keistimewaan?

Pembahasan mengenai Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) DIY memang belum usai. Proses politik dan segala manuver ini berlangsung bertahun-tahun, dibanding proses pembahasan substansinya. Karena butuh waktu cukup lama, sampai-sampai jabatan Gubernur telah habis berdasar UU 32/2004, lalu diperpanjang. Selama itu senantiasa muncul letupan-letupan. Misalnya terjadi ketegangan antara SBY dengan Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, lalu HB X pernah menyatakan tidak mau dicalonkan lagi jadi Gubernur, dan seterusnya.

Kali ini, tiba-tiba Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Bowono X mengancam akan mendorong referendum jika Pemerintah bersama DPR tidak juga mengesahkan RUU Keistimewaan DIY. Karuan saja muncul reaksi berbagai pihak. Nampaknya Mendagri tak menggubris ancaman Sultan, dengan alasan masih banyak waktu untuk membahas undang-undang tersebut. Barangkali ini cara Sultan untuk memaksa agar UU keistimewaan itu segera dituntaskan sebagai kekuatan hukum dalam rotasi kekuasaan di pemerintah Provinsi DIY.

Perdebatan pokok masih pada seputar; apakah Gubernur DIY dipilih atau ditetapkan, terkait konstruksi Keistimewaan Yogyakarta. Padahal sebenarnya pengaturan mengenai keistimewaan menyangkut 3 hal penting, yakni urusan posisi Gubernur, pengaturan soal tanah, serta kultur lokal. Namun yang menjadi masalah krusial soal jabatan Gubernur. Sebagian pihak menilai agar keistimewaan tetap saja ditandai dengan model penetapan secara otomatis Gubernur dan Wakil Gubernur yakni Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam, sebagaimana gagasan awal sejarah.

Namun, sebagian pihak juga menilai bahwa, demokrasi memberikan landasan nilai kunci yakni perlunya jabatan publik itu dibuka secara kompetitif untuk umum. Paham ini memposisikan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam sebagai simbol masyarakat sipil, menjadi kekuatan strategis mengontrol dan mengimbangi jalannya pemerintahan daerah Yogyakarta.

Itulah yang dikenal dengan konsep 'Monarkhi Konstitusional', di mana posisi Kraton dan Puro Pakualaman memiliki *power* pada kebijakan-kebijakan mendasar, khususnya menyangkut hajat hidup orang banyak Yogyakarta. Pilihan kompromi antara tafsir menghargai sejarah dan adaptasi nilai demokrasi belum ketemu ujungnya.

Jika dipetakan aktor-aktornya memang tidak mudah. Selama ini yang muncul ke permukaan seolah-olah antara dua kutub, disatu sisi Pemerintah Daerah dan sebagian elit lokal yang berupaya mengusulkan agar penetapan, sementara disisi lain Pemerintah Pusat dianggap condong pro model pemilihan. Para aktor kelompok strategis dan masyarakat, nampaknya bervariasi dalam memahami semua ini. Mulai politisi dan elit lokal dan pusat, akademisi, maupun kelompok penekan lainnya. Bahkan dalam lingkungan Kraton maupun Paku Alaman memiliki variasi tafsir.

Keistimewaan Yogyakarta jelas menjadi fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Persoalannya, bagaimana kita memperlakukan sejarah sesuai konteksnya kini dan untuk menjawab tantangan masa depan. Perubahan format politik Indonesia dari masa ke masa telah mendorong adaptasi di berbagai bidang, termasuk tata pemerintahan dalam spektrum yang berkembang. Konstruksi hubungan pusat dan daerah juga beragam.

Selain penerapan otonomi daerah dan desentralisasi, ada pula otonomi khusus dan keistimewaan dengan berbagai alasan sebagai bagian dari desentralisasi asimetrik. Proses mencari, merumuskan, dan mengimplemntasikan format ini memang belum final dan senantiasa dikoreksi melalui undang-undang maupun ragam kebijakan.

Kita perlu berfikir visioner. Keistimewaan Yogyakarta semestinya menjadi bagian dari konstruksi keindonesiaan. Mau tidak mau, antara nalar lokal dan pusat harus saling bertukar, saling melengkapi, serta

saling memperkuat dan menopang sebagai bagian NKRI. Baik itu alasan sejarah, konstitusi, maupun karena cita-cita masa depan bangsa.

Keistimewaan untuk masa depan adalah, bagaimana format dan isi beririsan antara spirit menghargai lokalitas berpadu kepentingan nasional. Tantangannya, bagaimana keistimewaan harus mampu mencerminkan legitimasi historik, kultur *civilized*, politik dan demokrasi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Perdebatan soal keistimewaan dapat dijadikan titik tolak untuk terus menemukan model dan substansi demokrasi yang kontekstual Indonesia. Karenanya, nasib Keistimewaan Yogyakarta berarti menjadi kepentingan bersama, bangsa Indonesia. Bukan sekadar ditentukan orang Yogyakarta, apalagi dengan referendum. Kita yakin secara umum bangsa Indonesia mencintai Yogyakarta.

REPUBLIKA, 5 Oktober 2010

2. Polemik SBY dan Sultan

Perdebatan lanjutan soal RUUK DIY di media massa kembali mencuat, antara Presiden SBY dengan Sri Sultan HB X. Di tengah proses untuk merampungkan *draft* RUUK yang terus tertunda-tunda, SBY melontarkan pernyataan bahwa RUUK harus dilandasi spirit menghargai sejarah dan membangun konteks demokrasi, serta koridor NKRI dan konstitusi.

Karenanya, SBY berpandangan agar tata pemerintahan yang terkandung dalam RUUK tidak melanggengkan monarkhi, agar tidak bertentangan semangat dan tantangan masa depan. Pernyataan tersebut mengundang reaksi balik dari Sultan yang menegaskan bahwa pemerintah Yogyakarta bukan monarkhi, dan menilai tendensi untuk mendudukkan DIY dalam skema demokrasi sudah berlangsung lama saat integrasi terjadi dalam rentang historik Yogyakarta integrasi NKRI. Bahkan, Sultan 'mengancam' untuk mempertimbangkan kembali jabatannya sebagai Gubernur.

Kontroversi seperti ini tentu kembali memicu kobaran 'politisasi' di antara kedua tokoh, karena publik juga akhirnya punya penilaian bahwa perdebatan ini mengarah pertarungan yang mengeras. Lingkungan sosial dan aroma politik yang memengaruhi sebagian besar orang mengaitkan perdebatan ini pada wilayah perselisihan yang sifatnya personal.

Umumnya mengait-ngaitkan dengan seting posisinya sebagai tokoh politik, dan bukan sekadar sebagai pemimpin masyarakat. Melebihi sekadar antara Presiden dengan Gubernur, atau antara Kepala Negara dengan Sultan. Tetapi antara SBY dan Sultan yang berbeda parpol, beda afiliasi dan basis politik, serta antarpesaing yang pernah

bertarung secara psikologis saat menjelang Pilpres 2009 lalu. Bukan mustahil terseret pada ancangan 2014.

Suasana inilah yang begitu lekat dengan keduanya, bahkan kemungkinan juga terbangun dalam konstruksi sosial oleh pihak-pihak yang mengitarinya. Spekulasi atas konstruksi sosial semacam inilah menjadi landasan politisasi atas pertarungan keduanya. Menariknya, subtansi yang dibahas dalam perdebatan itu sesungguhnya banyak rujukan dalam *draft* yang diajukan oleh berbagai pihak terkait RUUK. Tetapi, mengapa SBY tidak mengatakannya di awal-awal pembahasan RUUK dan menjadi *guide line* lalu mendetailkan ke dalam *draft* itu sendiri?

Mengapa pula pernyataan SBY begitu normatif dan terkesan jargonik? Kemungkinan di Kementerian Dalam Negeri juga belum solid mengkonsolidasikan substansi semacam ini, sehingga hal ini meluncur ke permukaan, serta harus berlarut-larut lagi. Seharusnya SBY tidak kembali melontarkan bola api itu saat-saat seperti ini, supaya tidak melahirkan polemik baru. Begitupun Sultan jangan sampai terlalu reaktif, dengan cara terbuka menendang balik bola panas yang akhirnya digolongkan resisten karena merasa disindir atas pernyataan SBY tersebut.

Jika SBY membuat pernyataan mengenai arah RUUK mengatasnamakan demokrasi, begitupun Sultan meyakini pola pemerintahan yang ada di Yogyakarta selama ini memiliki dukungan dan kehendak rakyat. Klaim keduanya tentu tidak perlu dicari mana yang salah, atau diobral di media massa yang membentuk kontroversi politik berkepanjangan.

Elit-elit lokal dan nasional, tentu perlu untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan substansi, jangan sampai justru memprovokasi polemik secara lebih kenceng sehingga condong keluar dari konteksnya. Barangkali momentum kali ini dapat dimanfaatkan lebih serius untuk membahas materi, sebagai substansi keistimewaan lebih komprehensif. Target yang telah ditentukan perlu dicapai melalui proses yang serius dan intens, mengurangi lontaran pernyataan liar agar tidak membingungkan masyarakat.

Alangkah strategisnya jikalau kedua pemimpin ini menahan diri dari perselisihan di publik. Selanjutnya keduanya membangun komunikasi secara diplomatik, berkomitmen menemukan jalan kompromi mewujudkan kepentingan Yogyakarta dan Indonesia secara lebih utuh.

Sebuah tantangan sebagai negarawan dan pemimpin untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Itulah yang diharapkan agar proses perumusan RUUK lebih bermakna, dan kedua tokoh itu mampu mengurangi atau menghindari politisasi berlebihan.

REPUBLIKA, 30 November 2010

3. Manuver Politik RUUK

Makin meningkat kontroversi soal RUUK. Betapapun ketegangan antara SBY dan Sultan mengenai demokrasi versus monarki coba diatasi dengan saling klarifikasi, namun anehnya, muncul manuver-manuver yang kian memperuncing perdebatan. Masih dalam pokok bahasan penentuan mekanisme pengisian jabatan Gubernur, sebagian besar elit lokal mengancam melalui referendum sementara pemerintah pusat (Kemendagri) tiba-tiba bermanuver meluncurkan polling politik bahwa 71% rakyat Yogyakarta menginginkan pemilihan. Luncuran *polling* jelaslah terbaca bukan meredam masalah, justru pemicu perseteruan baru.

Tradisi berdebat, dialog, musyawarah, sampai voting untuk menemukan konsensus sebenarnya sudah melekat dalam masyarakat sejak lama, apalagi ketika demokrasi makin populer di negeri ini. Proses tersebut seringkali diwarnai berbagai tindakan manuver. Biasanya oleh elit kekuasaan yang sekaligus menjadi pemain utama. Suatu manuver politik, kadang membuat proses pengambilan keputusan makin dinamins. Tetapi manuver itu pula melahirkan sikap-sikap kontra produktif.

Babak perumusan RUUK Yogyakarta sudah berlangsung sejak awal tahun 2000-an. Sayangnya prosesnya tersendat-sendat, bahkan diliputi ketidakpastian, hingga penghujung tahun 2010. Faktor utamanya, RUUK barangkali belum menjadi bagian prioritas elit nasional (eksekutif dan legislatif) kala itu sejak zaman Gus Dur, Megawati, sampai era SBY. Pengalaman menunjukkan, bahwa suatu RUU akan menjadi bagian agenda utama, misalnya masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas), jika didalamnya disetting memiliki insentif ekonomi dan politik bagi para politisi dan sang penguasa itu.

Paling tidak isunya dianggap *'sexy'* dan memiliki dampak bagi para pengambil kebijakan. Maka, konsesi itulah menjadi titik tumpu apakah

akan ada akselerasi pembahasan ataukah tidak atas RUU. Lagi-lagi ini soal integritas dan komitmen. Padahal RUUK DIY ini sebenarnya bukan hanya menyangkut kepentingan pemerintah dan warga Yogyakarta secara eksklusif, tetapi juga kaitannya dengan bangsa, NKRI. Karena bagaimanapun RUUK adalah mandat yang tercantum dalam UU 32/2004, serta memiliki kaitan hukum dengan konstitusi UUD 1945.

Politisi nasional representasi dari Yogyakarta begitu banyak, baik itu tergabung dalam DPR, DPD, maupun tokoh-tokoh nasional yang duduk di lembaga-lembaga eksekutif dan yudikatif. Mereka itu sebenarnya berpeluang atau berkesempatan memainkan peran strategis untuk mengusulkan, mendorong dan bahkan mempengaruhi agar RUUK ini segera dibahas dan diputuskan menjadi UU sebagai acuan dasar praktik pemerintahan DIY. Peran diplomasi mereka, paling tidak bisa menjadi kekuatan dan daya tawar memadai. Pertanyaannya, apakah mereka tidak melakukan itu?

Politik serba kenyal, semua serba mungkin. Ada beberapa politisi yang sudah mengupayakan dan memperjuangkan RUUK ini, tetapi tidak sedikit pula yang menganggapnya tidak penting. Bisa jadi, dulunya tokoh lokal namun kalau sudah menjadi tokoh nasional, terlalu banyak pertimbangan karena urusan-urusan pragmatis. Sengketa yang dipicu SBY dan melahirkan kontroversi ini punya hikmah positif, paling tidak telah mendorong semangat baru agar RUUK segera diputuskan menjadi UU. Karena itulah, kini saatnya untuk menumpahkan energi agar melakukan pembahasan secara seksama, merumuskan substansi dan pokok masalah sampai menemukan titik temu sebagai konsensus nasional.

Momentum ini jangan terlalu diarahkan pada politisasi berlebihan dengan risiko keluar dari konteksnya. Opsi mengenai mekanisme pengisian jabatan Gubernur DIY yang belum disepakati; apakah melalui penetapan, pemilihan terbatas, ataukah pemilihan terbuka harus segera didiskusikan secara mendalam dan saling memperkuat komunikasi politik antar pihak yang lebih intens. Tidak perlu pula terjebak saling mengancam, misalnya mau referendum ataukah melontarkan *polling* propaganda politik. Karena proses itu akan menciptakan ketegangan tidak berkesudahan. Peristiwa ini hendaknya menjadi pelajaran penting buat kematangan politik berdemokrasi.

REPUBLIKA, 7 Desember 2010

4. Dilema Politik RUUK

Pertarungan belum usai soal nasib RUUK DI Yogyakarta. Saat ini masih dalam babak saling tekan, ragam *show of force* bermunculan menyambut pembahasan *draft* yang diajukan Kementerian Dalam Negeri ke DPR. Bahkan manuver politik makin kencang, untuk maksud membangun opini publik saling memengaruhi proses ini. Peristiwa mundurnya Prabukusumo dari jabatannya ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrat (DPD-PD), tentu menjadi pukulan telak bagi posisi PD dalam konfigurasi politik lokal Yogyakarta.

Bagaimanapun, PD masih dalam posisi rentan karena selama ini masih mengandalkan pola ketokohan, misalnya di tingkat nasional figur SBY sementara di Yogyakarta Prabukusumo sebagai kerabat Keraton. Saat ini posisi plt. Ketua PD Yogyakarta dijabat oleh Angelina Sondakh. Pengisian jabatan oleh Angelina tidak lain sebagai 'balsem politik' pengalih rasa sakit sifatnya sementara, karena bagaimanapun figur dia tidak kompatibel dibanding Prabukusumo.

Babak menarik yang mutakhir adalah pergelaran 'sidang rakyat', istilah yang dilekatkan untuk melabeli sidang terbuka DPRD Provinsi DIY Senin, 13 Desember 2010 yang mengundang berbagai lapisan masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Dengan mengekspose undangan acara ini di berbagai massa cetak, upaya mobilisasi warga dan elit lokal untuk bergabung dianggap kekuatan massif pencipta opini publik.

Meskipun posisi dan pilihan politik tidak bulat, acara ini dijadikan bagian dari daya tawar politik DPRD, dengan menunjukkan sikap kepada pemerintah pusat dan DPR yang bakal membahas RUUK. Dari fraksi-fraksi DPRD yang ada, secara terbuka bersikap agar pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan dengan cara penetapan.

Kecuali fraksi PD yang tentu harus loyal dengan sikap pemerintahan SBY karena topangan utama kekuasaan adalah PD.

Sejauh ini sikap pemerintahan SBY mengusulkan agar dipilih, di mana ada formasi jabatan Gubernur Utama secara langsung Sultan ditetapkan, sementara jabatan Gubernur diisi dengan pemilihan secara terbuka. Tekanan semacam ini memang bukan sekali saja, lima tahun lalu saat habisnya masa jabatan Sultan berdasarkan UU 32/2004, maka proses pengisian jabatan Pimpinan DIY sebagai bagian rotasi kekuasaan harus terjadi.

Namun, saat itu juga diwarnai oleh tekanan mobilisasi massa oleh elit lokal untuk menggelar sidang terbuka agar menetapkan Sultan dan Paku Alam pada posisi Gubernur dan Wakil Gubernur. Tidak heran jika model semacam ini kemungkinan akan menjadi preseden politik yang diterapkan berulang-ulang sejauh belum ada kepastian dan pelembagaan sistem pengisian jabatan secara mapan.

Memang serba dilematis soal RUUK ini. Satu sisi spirit demokrasi sebagai keyakinan politik disepakati dalam gerakan reformasi 1998 harus masuk dan memengaruhi berbagai lini. Jantung perubahan menata sistem yang demokratis di antaranya terletak pada bagaimana kekuasaan dibentuk, dikelola dan dipertanggung jawabkan sesuai prinsip dan nilai demokrasi. Akan tetapi, proses transisi demokrasi (pasca otoriterisme) sejauh ini juga tidak berlangsung secara linier, dinamika turun naik selalu penuh liku-liku tantangan yang begitu berat.

Penerapan demokrasi yang masih prosedural selalu terganggu politik transaksional, *money politic*, kekuasaan yang korup, dan berbagai penyimpangan perubahan jauh dari mandat awal. Muncullah ketidakpercayaan (*distrust*) pada perubahan yang dibawa arus demokrasi itu. Sementara disisi lain, upaya melawan penyimpangan demokrasi ternyata juga terjebak pada cara-cara konservatisme atas nama sejarah, atau sekadar melanggengkan pola lama yang tidak kompatibel dengan nilai demokrasi.

Agaknya, proses RUUK ini tidak mudah, membutuhkan kelegaan hati dan *political will* pemegang kekuasaan. Jikalau pemerintah memaksakan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, kemungkinan tidak akan efektif karena adanya ancaman boikot oleh elit-elit lokal yang tentu saja akan memobilisasi pemilih agar tidak berpartisipasi di bilik suara.

Sementara disisi lain, jikalau hanya mengakomodasi model penetapan melalui cara pemaksaan pula, akan menjadi catatan "problem" sejarah dimasa-masa mendatang. Kompromi pasti akan dirumuskan, yang penting sesuai koridor dan ada titik temu sebagai konsensus nasional bersendikan sejarah, lokalitas, prinsip demokrasi, dan konstitusi UUD 1945. Agar UU keistimewaan benar-benar bermakna membangun peradaban bangsa.

REPUBLIKA, 14 Desember 2010

5. Subjek Politik

Demokrasi, secara normatif menjanjikan rakyat berdaulat. Konsekuensinya, rakyatlah penentu dalam kebijakan. Itulah yang dikenal dengan konsep dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena alasan-alasan kompleksitas, beroperasinya kedaulatan itu diformulasikan melalui cara perwakilan, yang kemudian dikenal sebagai demokrasi perwakilan.

Namun dalam praktiknya, saat rakyat mewakilkan mandatnya untuk menjalankan kedaulatan kepada seseorang atau melalui jalur institusi, memang tidak mudah. Kisah pengingkaran sang wakil rakyat dalam proses demokrasi sejauh ini adalah cerita pedih yang sering kita dengar.

Pada zaman Orde Baru, lembaga perwakilan adalah produk 'Pemilu palsu' yang menyajikan rekayasa sistemik memanipulasi dukungan pemilih. Partai, kala itu adalah alat mobilisasi sesat mesin kekuasaan. Pemilu sudah diketahui siapa pemenangnya, sebelum dikerjakan. Kepedihan politik sebagai sejarah buruk masa lalu.

Di era reformasi, kran liberalisasi politik dan babak demokratisasi menjadi fase pencerahan. Tajuk perubahan misi reformasi memberi pengalaman awal bagaimana mengeksperimentasi kebebasan berorganisasi dan berpolitik secara leluasa. Demokrasi di awal reformasi paling tidak memberi kesan positif. Tetapi sayangnya tidak berlangsung lama.

Pemilu demokratis yang ditandai menjulangnya partisipasi pemilih tahun 1999 sebagai pintu pembuka pembaharuan, ternyata belum berkorelasi positif berperannya para wakil rakyat untuk menjalankan mandat perubahan. Kekuasaan terpilih melupakan ama-

nah. Watak lembaga representasi seperti Parpol dan parlemen, mengembangbiakkan elitisme, pragmatisme manipulatif.

Sang wakil rakyat dan elit yang berkuasa sedikit demi berjalan tidak dalam *track* yang benar. Dalam Pemilu 2004 dan 2009 kian merosot kualitas representasinya. Partai makin korup, DPR berbohong, kekuasaan eksekutif makin lalai, dan aparat hukum lincah sebagai pelaku mafia kasus.

Mengapa ini terjadi? Karena praktik elektoral, sebagai sistem rotasi kekuasaan ternyata hanya menjadikan rakyat sekadar pemilih, menjadi objek. Demokrasi dibajak oleh sang pecundang kekuasaan melalui bekerjanya logika eksploitasi. Atas nama prosedural, dengan cara menambalkan aturan hukum dalam tindakan politik toh hanya menempatkan rakyat sebagai objek.

Padahal, di dalam negara yang mengklaim demokratik, jika konsisten menjalani prinsip dengan benar, semestinya rakyat menjadi subjek politik. Bagaimana caranya? Pendidikan politik menjadi faktor kunci. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan hendaknya dipastikan agar mampu memahami apa itu prinsip dasar berdemokrasi, paham hak-haknya yang dijamin konstitusi, sekaligus memiliki ketrampilan menjalankan mekanisme kekuasaan.

Proses pendangkalan demokrasi yang ditandai hilangnya fungsi normatif Parpol sebagaimana diilustrasikan di atas, sesungguhnya bersumber dari kegagalan pendidikan politik. Karena itu, saatnya rakyat menjadi subjek. Secara otentik mengartikulasi pengorganisasian diri sehingga mampu mengimbangi peran Parpol. Sebagai subjek, rakyatlah yang menentukan arah perubahan, bukan para pengurus Parpol yang berwatak oligarki. Inilah tantangan yang harus segera dijawab.

REPUBLIKA, 16 Agustus 2011

6. UU Parpol

Pada penghujung 2010 lalu, revisi atas UU Nomor 2/2008 mengenai Partai Politik (Parpol) telah diselesaikan. Bagi parpol besar, UU tersebut telah meyakinkan posisinya untuk tetap eksis dalam dunia politik nasional. Sementara, parpol-parpol kecil masih was-was berkenaan masa depan dirinya pada percaturan politik nasional. Apalagi, beban berat terasakan bagi mereka yang akan merintis pembentukan Parpol baru agar bisa bersaing dalam pemilu 2014. Syarat pendirian parpol begitu berat.

Dalam UU Perubahan tersebut, setiap parpol harus memenuhi persyaratan, antara lain pendiri parpol harus mencapai 30 orang di setiap provinsi seluruh Indonesia. Kepengurusan parpol harus meliputi seluruh provinsi, 75 persen di kabupaten/kota di masing-masing provinsi, dan 50 persen kecamatan di tiap-tiap kabupaten/kota. Selain itu, parpol harus memiliki kantor perwakilan di seluruh provinsi. Verifikasi parpol mesti diselesaikan 2,5 tahun sebelum pemilu digelar. Dari sisi waktu, parpol hanya memiliki waktu kurang dari setahun untuk menyelesaikan persiapan.

Dilihat dari sisi prosesnya, revisi terhadap UU parpol bagaikan kilat. Jauh berbeda dengan pembahasan UU bidang politik lain, yang umumnya memakan waktu berbulan-bulan, bahkan lebih satu tahun. Tercatat pembahasan UU Parpol selesai dalam hitungan beberapa pekan. DPR mengajukan ke pemerintah RUU Perubahan UU Nomor 2/2008 akhir November lalu, kemudian Jumat (17/12/2010) RUU itu disahkan.

Mereview problem demokratisasi Indonesia sejauh ini, sebagian besar pihak senantiasa menumpukan harapan, agar mesin suara dalam pemilu bernama Parpol ini mampu mereformasi diri demi perbaikan

sistem politik Indonesia. Tetapi, menyaksikan kecenderungan orientasi dan substansi UU Parpol itu, apakah harapan itu kira-kira terjawab?

Nampaknya masih pesimistik. Kecenderungannya, hasrat mengedepankan kepentingan pembuat UU condong abai kepentingan masyarakat, atau konstituen. Kritik keras yang dialamatkan pada parpol, belum menjadi alasan kuat bagi politisi yang mengoperasikan parpol untuk segera memperbaiki diri. Fakta itu sungguh ironis.

Secara normatif, lembaga representasi seperti DPR dan pemerintah pemegang otorisasi regulasi kurang mampu menempatkan posisinya secara tepat. Ketegangan kepentingan yang berkecamuk atas UU, nampaknya mereka menjadi bagian didalamnya. DPR dan pemerintah *toh* tidak lain adalah gugusan makhluk partai politik, yang berisiko terlibat dalam konflik kepentingan.

Dengan menggenggam otoritas dan 'legitimasi representasi' DPR dan pemerintah berhasil melindungi kepentingan partai politik yang kini berkuasa. Itulah sebagai petunjuk bagaimana kartelisasi politik berproses dalam struktur parlemen dan pemerintah yang mendominasi arah politik Indonesia.

Kita bisa mengambil contoh nyata, soal watak birokratisasi pendirian parpol. Begitu ketatnya prasyarat pendirian partai politik. Padahal demokrasi semestinya memberikan ruang terbuka agar asosiasi politik seperti parpol tumbuh subur sebagai instrumen pendidikan politik warga. Bahwa syarat bagi parpol ikut pemilu diperketat itu hal yang lumrah, agar kualitas parpol makin baik dan kredibel.

Tetapi, jika persyaratan pendirian suatu parpol dipersulit, maka modus ini tak sulit ditebak sebagai upaya 'mempersempit ruang artikulasi warga' dalam berasosiasi. Tujuan penyempitan akses warga berpolitik ini, kemungkinan adalah hasrat mempertahankan status quo. Misalnya saja, agar beberapa partai yang kini tengah berkuasa, tidak diganggu oleh hadirnya partai baru.

Bukti apalagi yang mengindikasikan gugusan parpol kini enggan mereformasi diri? Perubahan UU Parpol sampai kini mempertahankan mekanisme 'tertutup' untuk urusan pengaturan dana partai politik. Misalnya, Parpol dipersilakan menerima sumbangan Rp 1 miliar dari perorangan dan Rp 7,5 miliar dari badan usaha swasta. Tetapi, kelola sumbangan itu dilakukan tidak transparan.

Wajar saja jika Parpol kemungkinan tidak luput dari sarana pencucian uang haram. Bahkan bisa pula menjadi sarana para cukong untuk mengendalikan kebijakan. Ini hampir menjadi rahasia umum. Dalam kondisi Parpol begitu konservatif dan *vested interest* seperti itu, secara bertahap kemungkinan makin menurunkan kualitas demokrasi. Ini hambatan, sekaligus tantangan bagi para pegiat demokrasi untuk segera mengatasinya ke depan.

REPUBLIKA, 11 Januari 2011

Pendangkalan Politik

Politik begitu memaklumkan dan condong terdistorsi ke dalam beragam bentuk pengingkaran nilai moralitas. Tak ayal, politik diidentikkan manipulasi, tipu-tipu atau sekadar meraih kekuasaan. Ironisnya, sebagian orang justru mahfum dengan mengatakan "namanya juga politik". Beginikah politik sesungguhnya?

Memang kita tidak sedang menghakimi keadaan. Tetapi, paling tidak merasakan ada kesalahan yang terjadi atas realitas. Sejatinya politik di dalamnya terkandung nilai. Yakni seni meraih, mendistribusi, dan mengontrol kekuasaan sesuai konteksnya. Sebagai seni berkuasa, nilai-nilai dasar itu terekspresikan berupa kemampuan saling mempengaruhi melalui diplomasi, partisipasi dan mengorganisir diri demi pencapaian tujuan dan kepentingan tertentu.

Dengan demikian, mempraktikkan politik dalam sistem demokrasi, berarti menjalani kekuasaan berlandaskan humanisme, dialogis, penghargaan perbedaan, kebebasan, partisipatif, dan keseimbangan dalam *power*. Begitu pemaduan politik demokrasi, disitu pula ekspresi peradaban manusia berproses.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan Sosiolog UGM, Arie Sujito pada kolom Analisis di surat kabar harian *Republika* yang dimuat setiap selasa selama 2010-2012. Kendati demikian, buku ini bukan himpunan berita karena tulisan yang tersaji selalu mengulas makna dari setiap peristiwa. Politik yang begitu menyesakkan, serasa dikunyah dengan renyah.

IRE

IRE Yogyakarta
Dusun Tegalrejo RT.01 RW.09 Desa Sariharjo, Ngaglik
Jalan Palagan Tentara Pelajar km 9,5 Sleman Yogyakarta 55581
Telp/Fax +62-74-867686 E-mail : office@ireyogya.org
http://www.ireyogya.org

ISBN 978-979-8198-83-0